



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 (Audited)



*Kerja Keras,
Kerja Cerdas,
Kerja Ikhlas.*

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2009 (Audited)

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN REALISASINYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
RERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2010

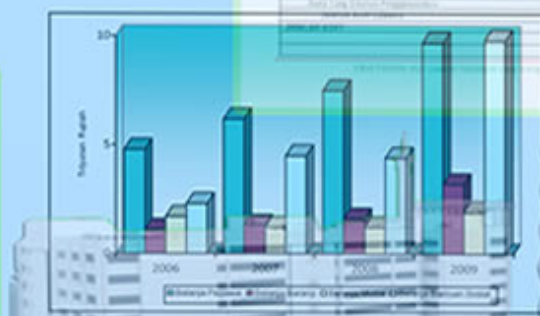
Kode	Uraian	Rencana	2009		2010	
			Revisi	Realisasi	Revisi	Realisasi
001	Saldo Awal					
002	Saldo Akhir					
003	Saldo Awal					
004	Saldo Akhir					
005	Saldo Awal					
006	Saldo Akhir					
007	Saldo Awal					
008	Saldo Akhir					
009	Saldo Awal					
010	Saldo Akhir					
011	Saldo Awal					
012	Saldo Akhir					
013	Saldo Awal					
014	Saldo Akhir					
015	Saldo Awal					
016	Saldo Akhir					
017	Saldo Awal					
018	Saldo Akhir					
019	Saldo Awal					
020	Saldo Akhir					
021	Saldo Awal					
022	Saldo Akhir					
023	Saldo Awal					
024	Saldo Akhir					
025	Saldo Awal					
026	Saldo Akhir					
027	Saldo Awal					
028	Saldo Akhir					
029	Saldo Awal					
030	Saldo Akhir					
031	Saldo Awal					
032	Saldo Akhir					
033	Saldo Awal					
034	Saldo Akhir					
035	Saldo Awal					
036	Saldo Akhir					
037	Saldo Awal					
038	Saldo Akhir					
039	Saldo Awal					
040	Saldo Akhir					
041	Saldo Awal					
042	Saldo Akhir					
043	Saldo Awal					
044	Saldo Akhir					
045	Saldo Awal					
046	Saldo Akhir					
047	Saldo Awal					
048	Saldo Akhir					
049	Saldo Awal					
050	Saldo Akhir					
051	Saldo Awal					
052	Saldo Akhir					
053	Saldo Awal					
054	Saldo Akhir					
055	Saldo Awal					
056	Saldo Akhir					
057	Saldo Awal					
058	Saldo Akhir					
059	Saldo Awal					
060	Saldo Akhir					
061	Saldo Awal					
062	Saldo Akhir					
063	Saldo Awal					
064	Saldo Akhir					
065	Saldo Awal					
066	Saldo Akhir					
067	Saldo Awal					
068	Saldo Akhir					
069	Saldo Awal					
070	Saldo Akhir					
071	Saldo Awal					
072	Saldo Akhir					
073	Saldo Awal					
074	Saldo Akhir					
075	Saldo Awal					
076	Saldo Akhir					
077	Saldo Awal					
078	Saldo Akhir					
079	Saldo Awal					
080	Saldo Akhir					
081	Saldo Awal					
082	Saldo Akhir					
083	Saldo Awal					
084	Saldo Akhir					
085	Saldo Awal					
086	Saldo Akhir					
087	Saldo Awal					
088	Saldo Akhir					
089	Saldo Awal					
090	Saldo Akhir					
091	Saldo Awal					
092	Saldo Akhir					
093	Saldo Awal					
094	Saldo Akhir					
095	Saldo Awal					
096	Saldo Akhir					
097	Saldo Awal					
098	Saldo Akhir					
099	Saldo Awal					
100	Saldo Akhir					

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2009 (Audited)

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN REALISASINYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
RERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2010

Kode	Uraian	Rencana	2009		2010	
			Revisi	Realisasi	Revisi	Realisasi
001	Saldo Awal					
002	Saldo Akhir					
003	Saldo Awal					
004	Saldo Akhir					
005	Saldo Awal					
006	Saldo Akhir					
007	Saldo Awal					
008	Saldo Akhir					
009	Saldo Awal					
010	Saldo Akhir					
011	Saldo Awal					
012	Saldo Akhir					
013	Saldo Awal					
014	Saldo Akhir					
015	Saldo Awal					
016	Saldo Akhir					
017	Saldo Awal					
018	Saldo Akhir					
019	Saldo Awal					
020	Saldo Akhir					
021	Saldo Awal					
022	Saldo Akhir					
023	Saldo Awal					
024	Saldo Akhir					
025	Saldo Awal					
026	Saldo Akhir					
027	Saldo Awal					
028	Saldo Akhir					
029	Saldo Awal					
030	Saldo Akhir					
031	Saldo Awal					
032	Saldo Akhir					
033	Saldo Awal					
034	Saldo Akhir					
035	Saldo Awal					
036	Saldo Akhir					
037	Saldo Awal					
038	Saldo Akhir					
039	Saldo Awal					
040	Saldo Akhir					
041	Saldo Awal					
042	Saldo Akhir					
043	Saldo Awal					
044	Saldo Akhir					
045	Saldo Awal					
046	Saldo Akhir					
047	Saldo Awal					
048	Saldo Akhir					
049	Saldo Awal					
050	Saldo Akhir					
051	Saldo Awal					
052	Saldo Akhir					
053	Saldo Awal					
054	Saldo Akhir					
055	Saldo Awal					
056	Saldo Akhir					
057	Saldo Awal					
058	Saldo Akhir					
059	Saldo Awal					
060	Saldo Akhir					
061	Saldo Awal					
062	Saldo Akhir					
063	Saldo Awal					
064	Saldo Akhir					
065	Saldo Awal					
066	Saldo Akhir					
067	Saldo Awal					
068	Saldo Akhir					
069	Saldo Awal					
070	Saldo Akhir					
071	Saldo Awal					
072	Saldo Akhir					
073	Saldo Awal					
074	Saldo Akhir					
075	Saldo Awal					
076	Saldo Akhir					
077	Saldo Awal					
078	Saldo Akhir					
079	Saldo Awal					
080	Saldo Akhir					
081	Saldo Awal					
082	Saldo Akhir					
083	Saldo Awal					
084	Saldo Akhir					
085	Saldo Awal					
086	Saldo Akhir					
087	Saldo Awal					
088	Saldo Akhir					
089	Saldo Awal					
090	Saldo Akhir					
091	Saldo Awal					
092	Saldo Akhir					
093	Saldo Awal					
094	Saldo Akhir					
095	Saldo Awal					
096	Saldo Akhir					
097	Saldo Awal					
098	Saldo Akhir					
099	Saldo Awal					
100	Saldo Akhir					





KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005

Nomor : SJ/B.III/4/KU.00/ 1558 /2011
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : *Penyampaian Laporan Keuangan*
Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

Jakarta, 9 Mei 2011

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 *Audited* sebagai pertanggungjawaban keuangan dari Kementerian Agama tahun 2010.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

An. Menteri Agama RI
Sekretaris Jenderal

Bahrul Hayat, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Bapak Menteri Agama, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 *(Audited)*



KATA PENGANTAR

Yang pertama sekali kami mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya bahwa Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 dapat disusun sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, Laporan Keuangan Kementerian Agama ini dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai wujud pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Keuangan Kementerian Agama *Audited* Tahun 2010 adalah Laporan Keuangan yang telah dilakukan perbaikan-perbaikan dengan menambah dan mengurangi data transaksi hasil rekonsiliasi tripartid antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Selanjutnya laporan keuangan ini adalah merupakan pertanggungjawaban Kementerian Agama yang dalam proses penyusunannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari 4.381 satker sebagai unit akuntansi di lingkungan Kementerian Agama secara berjenjang, mulai dari UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, sedangkan teknis penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama, mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010 pasal 8 ayat (2), terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan ini menyajikan tiga hal pokok, yaitu:

1. LRA menyajikan informasi tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja. Realisasi Pendapatan Kementerian Agama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp702.576.476.771,- atau 133,29 persen dari Estimasi Pendapatan terlapor sebesar Rp527.108.843.945,-. Sementara itu, realisasi Belanja Kementerian Agama adalah sebesar Rp28.047.146.918.980,- atau 91,58 persen dari pagu anggaran terlapor sebesar Rp30.627.412.668.237,-;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember. Neraca Kementerian Agama menginformasikan nilai Aset Kementerian Agama sebesar Rp29.107.295.882.908,- yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Sedangkan Kewajiban Kementerian Agama sebesar Rp353.360.764.574,- sehingga

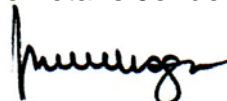
Ekuitas Dana (Kekayaan Bersih) Kementerian Agama per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28.753.935.118.334,-;

3. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2010 telah direviu oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan sudah diperiksa oleh BPK RI, maka Laporan Keuangan ini berstatus *Audited*.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi bukti atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN TA 2010 di lingkungan Kementerian Agama sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 9 Mei 2011
A.n. Menteri Agama R.I
Sekretaris Jenderal



 Bahrul Hayat, Ph.D

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Daftar Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	
Pernyataan Telah Direview	
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (perbandingan 2010 dan 2009)	4
III. Neraca (perbandingan 2010 dan 2009)	6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Profil Kementerian Agama	10
A.3. Visi, Misi dan Program Kementerian Agama	11
A.4. Alokasi Anggaran Empat Tahun Terakhir	12
A.5. Kinerja Lima Tahun Terakhir	12
A.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.7. Kebijakan Akuntansi	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	30
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	62
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	63
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	63
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	64
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	78
V. Suplemen	
1. Rincian Realisasi Anggaran Menurut Satuan Kerja	
2. Rincian Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana dan Kegiatan	
3. Laporan Rekening Per 31 Desember 2010	
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama	
5. Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan	
6. Laporan Keuangan BPIH dan DAU	
7. Ikhtisar Laporan Lembaga Non Struktural Independen	
8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKKA Tahun 2005 - 2009	

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Jumlah Entitas Akuntansi Kementerian Agama	23
2. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya	32
3. Rincian Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per Eselon 1 dan Wilayah	32
4. Realisasi Pendapatan BLU	33
5. Rincian Realisasi Pendapatan BLU per Satker BLU	34
6. Rincian Belanja Menurut Satuan Kerja	35
7. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Menurut Eselon 1 dan Wilayah	35
8. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	37
9. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana RM	38
10. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana PLN	39
11. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana Hibah LN	42
12. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana RMP	42
13. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana PNBP	43
14. Rincian Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana BLU	44
15. Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi	46
16. Realisasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum	46
17. Rincian Realisasi Anggaran Fungsi Pariwisata dan Budaya	48
18. Realisasi Anggaran Fungsi Agama	48
19. Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	49
20. Realisasi Anggaran Fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial	51
21. Rincian Belanja Pegawai	53
22. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Eselon 1 dan Wilayah	54
23. Realisasi Belanja Barang Non BLU	55
24. Rincian Belanja Barang Non BLU per Eselon 1 dan Wilayah	55
25. Realisasi Belanja Barang BLU	56
26. Rincian Realisasi Belanja Barang per Satker BLU	57
27. Realisasi Belanja Modal Non BLU	57
28. Rincian Belanja Modal Non BLU per Eselon 1 dan Wilayah	58
29. Realisasi Belanja Modal BLU	59
30. Rincian Realisasi Belanja Modal per Satker BLU	59
31. Realisasi Belanja Bantuan Sosial	60
32. Rincian Belanja Bantuan Sosial per Eselon 1 dan Wilayah	60
33. Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	63
34. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2010 dan 2009	65
35. Saldo Kas pada Rekening Penampung BOS 2010	66
36. Piutang Bukan Pajak	66
37. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	67
38. Aset Tetap	69
39. Aset Tetap Satker Non Badan Layanan Umum	71
40. Aset Tetap Satker Badan Layanan Umum	71
41. Aset Lainnya	72
42. Akun Lawan (Kontra) Utang Kepada Pihak Ketiga	74
43. Akun Lawan (Kontra) Pendapatan Yang Ditangguhkan	75
44. Akun Lawan (Kontra) Cadangan Piutang	76
45. Akun Lawan (Kontra) Dana yang Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek	75

46. Saldo Dana Lancar BLU 31 Desember 2010 dan 2009	77
47. Perbedaan Neraca SAK dan SIMAK-BMN	78

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2006 – 2010	30
2. Realisasi Belanja Kementerian Agama TA 2006 – 2010	31
3. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama di Satker Pusat dan Daerah TA 2006 – 2010	35
4. Komposisi Realisasi Enam Sumber Dana Dalam Belanja Kementerian Agama TA 2010	37
5. Persentase Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi TA 2010	52
6. Persentase Realisasi Jenis Belanja Kementerian Agama TA 2010	53
7. Perbandingan Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana pada Neraca TA 2006 -2010	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program
4. Rincian Informasi Akrual Eselon 1 dan Wilayah
5. Data Informasi Akrual Tingkat UAPA
6. Rincian Aset
7. Rincian Kewajiban
8. Rincian Ekuitas Dana
9. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DAU	: Dana Abadi Umat
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IP	: Inventarisasi dan Penilaian
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
LKKA	: Laporan Keuangan Kementerian Agama
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRAB	: Laporan Realisasi Anggaran Belanja
MAK	: Mata Anggaran Keluaran
MAP	: Mata Anggaran Penerimaan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TUP	: Tagihan Uang Persediaan
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPPA-W	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UAPPB-W	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
UAPPA-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
UAPPB-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
UIN	: Universitas Islam Negeri
UP	: Uang Persediaan
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Catatan	A.1	Dasar Hukum
Catatan	A.2	Profil Kementerian Agama
Catatan	A.3	Visi, Misi, Tata Nilai dan Program Kementerian Agama
Catatan	A.4	Alokasi Anggaran Empat Tahun Terakhir
Catatan	A.5	Kinerja Lima Tahun Terakhir
Catatan	A.6	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Catatan	A.7	Kebijakan Akuntansi
Catatan	A.7.1	Pendapatan
Catatan	A.7.2	Belanja
Catatan	A.7.3	Aset
Catatan	A.7.3.1	Aset Lancar
Catatan	A.7.3.2	Aset Tetap
Catatan	A.7.3.3	Aset Lainnya
Catatan	A.7.4	Kewajiban
Catatan	A.7.5	Ekuitas Dana

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

Catatan	B.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
Catatan	B.2	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.1.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.1.2	Pendapatan BLU
Catatan	B.2.2	Belanja
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial
Catatan	B.3	Catatan Penting LRA
Catatan	B.3.1	Laporan Belanja Secara Akrual

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Catatan	C.1	Posisi Keuangan Secara Umum
Catatan	C.2	Penjelasan Per Pos Neraca
Catatan	C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan
Catatan	C.2.3	Kas Lainnya dan Setara Kas
Catatan	C.2.4	Kas Pada BLU
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak
Catatan	C.2.6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Catatan	C.2.7	Uang Muka Belanja
Catatan	C.2.8	Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.9	Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.10	Investasi Dalam Deposito

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

Catatan	C.2.11	Persediaan
Catatan	C.2.11.1	Persediaan
Catatan	C.2.11.2	Persediaan Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.12	Aset Tetap
Catatan	C.2.12.1	Aset Tetap (Satker Non BLU)
Catatan	C.2.12.2	Aset Tetap Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.13	Aset Lainnya
Catatan	C.2.14	Utang pada Pihak Ketiga
Catatan	C.2.15	Pendapatan Diterima di Muka
Catatan	C.2.16	Uang Muka dari KPPN
Catatan	C.2.17	Pendapatan yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.18	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Catatan	C.2.19	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Catatan	C.2.20	Utang Jangka Pendek Lainnya
Catatan	C.2.21	Cadangan Piutang
Catatan	C.2.22	Cadangan Persediaan
Catatan	C.2.23	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Catatan	C.2.24	Dana Lancar BLU
Catatan	C.2.25	Barang/Jasa yang Harus Diterima
Catatan	C.2.26	Barang/Jasa yang Harus Diserahkan
Catatan	C.2.27	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Catatan	C.2.28	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Catatan	C.3	Catatan Penting Neraca



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

OPINI BPK RI



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Demikian juga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2010 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini disertai dengan Suplemen berupa Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak, Realisasi Anggaran Menurut Satuan Kerja, Realisasi Anggaran Menurut Sumber Dana Dan Kegiatan, Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama, Laporan Keuangan BPIH 1430 H dan 1431 H dan DAU, Ikhtisar Laporan Lembaga Non Struktural Independen serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

LKKA Tahun 2010 (*Audited*) ini disusun secara berjenjang mulai dari UAKPA yang berjumlah 4.381 satker, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2010 menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Kementerian Agama pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp702.576.476.771,- atau mencapai 133,29 persen dari estimasi pendapatan yang sebesar Rp527.108.843.945,-.

Realisasi Belanja Kementerian Agama pada TA 2010 adalah sebesar Rp28.047.146.918.980- atau mencapai 91,58 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp30.627.412.668.237,-. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut sumber dana TA 2010 dan 2009 disajikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	TA 2010	(dalam rupiah)	
		(<i>Audited</i>) Realisasi	Anggaran	TA 2009 (<i>Audited</i>) Realisasi
Belanja Rupiah Murni	29.056.682.080.237,00	27.065.482.492.890	25.634.003.387.000	23.832.185.669.483
Belanja Pinjaman Luar Negeri	861.484.638.000,00	356.097.357.693	867.479.649.000	488.901.316.507
Belanja Hibah LN	-	-	66.500.000.000	57.174.339.000
RM Pendamping	88.168.643.000,00	83.161.692.514	124.075.000.000	98.544.014.163
PNBP	230.944.797.000,00	197.463.430.279	224.158.945.000	193.873.568.053
BLU	390.132.510.000,00	344.941.945.604	268.474.884.000	223.603.368.161
JUMLAH	30.627.412.668.237	28.047.146.918.980	27.184.691.865.000	24.894.282.275.367

2. NERACA

Neraca Kementerian Agama menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kementerian Agama pada tanggal 31 Desember 2010.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp29.107.295.882.908,-, Kewajiban adalah sebesar Rp353.360.764.574,- dan Ekuitas Dana adalah sebesar Rp28.753.935.118.334,- Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)
Aset	29.107.295.882.908	23.787.768.694.626	5.319.527.188.282
Aset Lancar	201.270.414.739	198.014.054.789	3.256.359.950
Aset Tetap	26.224.039.992.097	22.014.388.679.125	4.209.651.312.972
Aset Lainnya	2.681.985.476.072	1.575.365.960.712	1.106.619.515.360
Kewajiban dan Ekuitas Dana	29.107.295.882.908	23.787.768.694.626	5.319.527.188.282
Kewajiban	353.360.764.574	75.330.675.020	278.030.089.554
Kewajiban Jangka Pendek	353.360.764.574	75.330.675.020	278.030.089.554
Ekuitas Dana Neto	28.753.935.118.334	23.712.438.019.607	5.041.497.098.727
Ekuitas Dana Lancar	(152.090.349.835)	122.683.379.769	(274.773.729.604)
Ekuitas Dana Investasi	28.906.025.468.169	23.589.754.639.837	5.316.270.828.332

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Agama menguraikan dasar hukum, profil, kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Di samping itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan antara lain:

- Pendapatan PNBPN selama tahun 2010 sebesar Rp702.576.476.771,- yang berasal dari NR Rp67.548.420.179,- pendidikan Rp185.206.000.133,- PNBPN Umum Rp69.775.470.219,- dan PNBPN BLU Rp380.046.586.240,-
- Alokasi terbesar dari total pagu Kementerian Agama adalah untuk Fungsi Pendidikan yaitu sebesar Rp27.214.880.446.237,- atau 88,86 persen dari total pagu Kementerian

Agama, sedangkan alokasi anggaran untuk fungsi Agama sebagai *core business* Kementerian Agama hanya sebesar Rp943.075.700.000,- atau 3,08 persen dari total pagu Kementerian Agama.

- c. Pada tahun 2010 telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) terhadap 4.028 satker di lingkungan Kementerian Agama. Satker di lingkungan kementerian agama saat ini berjumlah 4.381 dengan penambahan satker baru sebanyak 353 satker. Sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan BMN bahwa pelaksanaan IP dilakukan setiap lima tahun sekali.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR TANGGUNG JAWAB



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

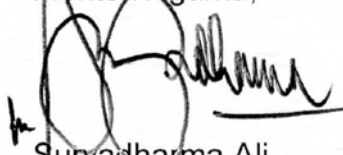
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Agama (Bagian Anggaran 025) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 (**Audited**) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan Kementerian Agama secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 10 Mei 2011

Menteri Agama,



Suryadharna Ali



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERNYATAAN REVIU



KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS. FATMAWATI NOMOR 33A KOTAK POS 3687
TELEPON 021- 75916038, 7691849 FAKSIMILI 021-7692112
JAKARTA 12420

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2010

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Agama berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lain yang terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Agama.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 16 Februari 2011
Inspektur Jenderal




DR. H. Mundzier Suparta, MA
NIP. 195407071984021001



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (UNAUDITED)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Uraian	Catatan	TA 2010 (Unaudited)		TA 2009 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1	0	0	0
I. Penerimaan Perpajakan		0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0
2. Pajak Perpajakan Internasional		0	0	0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	0	0	0
PNBP Lainnya	B.2.1.2.1	0	0	0
1. Pendapatan Pendidikan		248.778.779.775	185.206.000.133	88,94
2. Pendapatan NR		41.895.746.950	67.548.420.179	113,68
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (Umum)		7.375.220	69.775.470.219	946,080
Jumlah PNBP Lainnya		290.681.901.945	322.529.890.531	109,98
PNBP BLU	B.2.1.2.2			
1. Pendapatan Badan Layanan Umum		236.426.942.000	380.046.586.240	160,87
III. Penerimaan Hibah				0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		527.108.843.945	702.576.476.771	133,289
B. Belanja Negara	B.2.2			
Belanja Kementerian Agama	B.2.2.1			0
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	12.876.967.889.000	12.563.581.888.876	96,44
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	5.226.849.026.000	4.594.721.341.928	86,98
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	3.320.937.240.237	2.771.539.888.423	79,44
4. Pembayaran Bunga Utang				0
5. Subsidi				0
6. Bantuan Sosial	B.2.2.1.4	9.202.658.513.000	8.117.303.799.753	88,21
				91,42

Uraian	Catatan	TA 2010 (Unaudited)		TA 2009 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
7. Belanja Lain-lain		30.627.412.668.237	28.047.146.918.980	91,57
Jumlah Belanja Negara (B)				
C. Pembiayaan				
1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)		0	0	0
a. Perbankan Dalam Negeri		0	0	0
b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)		0	0	0
2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		0	0	0
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri		0	0	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0
Jumlah Pembiayaan (C.1 + C.2)		0	0	0



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

NERACA

II. NERACA (AUDITED)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1	9.723.647.912	2.922.817.411
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.2	2.931.949.230	5.445.111.193
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.3	10.915.757.698	17.479.584.537
Kas pada BLU	C.2.4	132.236.879.094	104.273.729.179
Jumlah Kas dan Bank		155.808.233.934	130.121.242.320
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.5	1.616.400.187	2.545.487.375
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.6	3.000.000	3.541.350
Uang Muka Belanja	C.2.7	3.666.667.259	
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.2.8	2.640.363.334	1.340.899.294
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.2.9	253.340.069	
Investasi dalam Deposito	C.2.10	0	8.770.000.000
Jumlah Piutang		4.513.103.590	12.659.928.019
Persediaan	C.2.11.1	29.644.935.134	54.898.054.971
Persediaan Badan Layanan Umum	C.2.11.2	7.637.474.822	334.829.479
Jumlah Aset Lancar		201.270.414.739	198.014.054.789
Aset Tetap	C.2.12		
Tanah		6.914.314.239.874	8.762.865.475.642
Peralatan dan Mesin		2.046.077.682.947	2.141.301.790.132
Gedung dan Bangunan		9.638.800.689.872	8.710.481.351.109
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		109.254.023.572	107.192.057.710
Aset Tetap Lainnya		350.085.500.172	370.669.387.322
Konstruksi Dalam Pengerjaan		740.209.726.510	905.562.495.092
Tanah Badan Layanan Umum		3.296.541.100.387	490.068.886.800
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		862.468.281.043	97.666.987.358
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		1.593.320.149.429	389.056.731.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum		67.171.209.469	1.499.429.500
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum		61.835.405.417	1.733.231.460
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum		543.961.983.405	36.290.856.000
Jumlah Aset Tetap		26.224.039.992.097	22.014.388.679.125
Aset Lainnya	C.2.13		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		4.099.200	
Aset Tak Berwujud		27.180.911.757	14.399.571.036
Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum		10.743.020.664	
Aset Lain-lain		2.641.484.115.488	11.355.594.381

Uraian	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum		2.573.328.963	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		-	1.549.610.795.295
Jumlah Aset Lainnya		2.681.985.476.072	1.575.365.960.712
JUMLAH ASET		29.107.295.882.908	23.787.768.694.626
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.14	334.119.122.227	17.293.756.010
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.15	2.962.989.081	
Uang Muka dari KPPN	C.2.16	9.723.647.912	2.922.817.411
Pendapatan yang ditangguhkan	C.2.17	6.550.962.614	18.436.691.957
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	C.2.18		35.854.577.452
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	C.2.19		803.512.568
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.20	4.042.740	19.319.622
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		353.360.764.574	75.330.675.020
JUMLAH KEWAJIBAN		353.360.764.574	75.330.675.020
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SILPA			-
Cadangan Piutang	C.2.21	4.513.103.590	12.659.928.019
Cadangan Persediaan	C.2.22	37.282.409.956	55.232.884.450
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.23	(326.826.420.653)	(49.483.161.879)
Dana Lancar BLU	C.2.24	132.236.879.094	104.273.729.179
Barang/Jasa Yang Harus Diterima		3.666.667.259	
Barang/Jasa Yang Harus Disediakan		(2.962.989.081)	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(152.090.349.835)	122.683.379.769
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.25	26.224.039.992.097	2.014.388.679.125
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.26	2.681.985.476.072	1.575.365.960.712
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		28.906.025.468.169	23.589.754.639.837
JUMLAH EKUITAS DANA		28.753.935.118.334	23.712.438.019.607
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		29.107.295.882.908	23.787.768.694.626



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

CaLK PENDAHULUAN

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Penyusunan
Laporan
Keuangan sebagai
wujud
tanggungjawab
Pengguna
Anggaran/Barang*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 ditetapkan bahwa didelegasikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB). Pada tahun anggaran 2010 jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama mencapai 4.381 satker.

Oleh karena itu, Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 sampai kepada tingkat UAPA sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penjenjangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Agama. Dalam peraturan tersebut, masing-masing jenjang pelaporan disebut Unit Akuntansi, yaitu: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).

Laporan Keuangan Kementerian Agama terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di lampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang terdapat di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (2) a. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Kementerian Agama didasarkan kepada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan & belanja dalam LRA dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, maka dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 akan dilampirkan sebagian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Agama.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN AGAMA

Sejarah berdirinya Kementerian Agama RI

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (*added value*) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercermin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi structural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para *stakeholders* baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat

Dalam pelaksanaannya nilai tambah yang diharapkan dari Kementerian Agama belum dapat terwujud dengan maksimal bila tanpa didukung peran serta dan koordinasi lintas sektoral. Hal ini dapat dilihat melalui penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 yang menegaskan tentang perlunya Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Instruksi ini berisi imbauan Menteri Agama kepada segenap jajarannya di daerah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan agama di daerahnya masing-masing. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Demikian pula struktur penganggaran program Kementerian Agama dipilah berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dengan kata lain program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama struktur penganggarnya juga diatur oleh Undang-Undang terkait.

Fungsi Kementerian Agama

Secara umum ruang lingkup tugas Kementerian Agama sangat besar. Pada tahun 2010, struktur anggaran Kementerian Agama mengemban 5 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Agama, Pendidikan, Pariwisata dan Budaya, dan Perlindungan Sosial. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Agama Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014, program-program di lingkungan Kementerian Agama terdiri dari 11 program sesuai dengan jumlah unit Eselon I yang ada, dimana Sekjen mengemban dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negera Kementerian Agama. Sedangkan Eselon I lainnya melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

A.3. VISI, MISI, TATA NILAI DAN PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA

Visi dan Misi Kementerian Agama

VISI

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin."

MISI

Berdasarkan Visi di atas, Kementerian Agama menetapkan Misi lima tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

TATA NILAI

Tata Nilai dalam penyelenggaraan pembangunan agama menggambarkan bagaimana Kementerian Agama menampilkan jati dirinya terhadap para *stakeholder*, termasuk juga seluruh anggota organisasinya. Tata nilai yang baik akan membentuk karakter yang baik terhadap pelayanan dan sistem manajemen institusi Kementerian Agama. Tata nilai yang dijunjung tinggi merupakan modal intrinsik yang sangat substansial bila dikaitkan dengan upaya mempertahankan keberlangsungan, mencapai tujuan dan memajukan penyelenggaraan pembangunan agama.

Nilai-nilai luhur yang menjadi tata nilai dalam penyelenggaraan Kementerian Agama adalah: ikhlas beramal, amanah, profesional, kebersamaan, keteladanan, taat azas, dan visioner. Secara singkat, nilai-nilai luhur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Ikhlas Beramal:**
Ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat, negara dan bangsa serta mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- **Amanah:**
Memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu mengembankan kepercayaan.
- **Profesional:**
Memeiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif.
- **Kebersamaan:**
Bekerjasama berdasarakan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan.
- **Keteladanan:**
Berusaha melakukan hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi yang lain.
- **Taat Azas:**
Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.
- **Visioner:**
Memiliki etos kerja berpandangan jauh ke depan.

A.4. ALOKASI ANGGARAN EMPAT TAHUN TERAKHIR

Pengguna Anggaran ke-4 terbesar

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang menduduki ke-4 terbesar dari 76 Kementerian/Lembaga dalam hal perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini disebabkan karena penerapan kebijakan Pemerintah untuk tetap menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Peningkatan alokasi anggaran Kementerian Agama belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan lingkup tugas dan fungsi agama yang menjadi *core* Kementerian Agama dan berkorelasi kepada tugas dan fungsi dari instansi lintas sektoral yang bersifat strategis.

Anggaran Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, anggaran Kementerian Agama adalah sebesar 15,139 triliun rupiah. Tahun 2008 meningkat menjadi 16,305 triliun rupiah kemudian tahun 2009 naik menjadi 27,182 triliun rupiah. Terakhir pada tahun 2010 naik kembali menjadi 30,635 triliun rupiah.

A.5. KINERJA LIMA TAHUN TERAKHIR

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Berdasarkan PP No 24 Tahun 2010 pasal 473 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dinyatakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Tugas ini, sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, sedikitnya meliputi 5 (lima) bidang utama, yaitu; (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas *raudhatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk perhatian pada upaya pemberantasan korupsi dan penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Agama.

Sejumlah permasalahan dan program-program strategis pembangunan bidang agama sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014 dijadikan landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program Kementerian Agama.

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Arah Program peningkatan kualitas beragama

Bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama tahun 2010 - 2014 diarahkan untuk mengatasi: rendahnya tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama; masih terjadinya distansi antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial; belum optimalnya pembinaan keluarga sakinah dan sejenisnya; rendahnya pengelolaan sumber daya keagamaan; terbatasnya SDM aparatur pelayanan keagamaan; dan ketersediaan sarana-prasarana yang belum memadai.

Upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui 4 (empat) program utama, yaitu: (1) Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (3) Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan; dan (4) Program penelitian dan pengembangan agama.

Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan ini bertujuan untuk memantapkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan etik dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengembangkan pola keberagaman yang inklusif, menghargai dan menghayati kemajemukan serta

mendorong terciptanya kesalehan individual dan kesalehan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain: meningkatkan kualitas bimbingan keagamaan, peningkatan pembinaan para penyuluh agama, juru penerang agama dan da'i, serta penyediaan kitab suci dan buku keagamaan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Penyediaan kitab suci dan buku keagamaan meliputi, antara lain pengadaan kitab suci Al Qur'an sebanyak 45.000 eksemplar, *Juz 'Amma dan Terjemah* sebanyak 50.000 eksemplar, *Al Qur'an dan Terjemah* sebanyak 10.000 eksemplar, *Surat Yasin* sebanyak 60.000 eksemplar, *Tafsir Al Qur'an* 750 eksemplar, *Mushaf Besar Al Qur'an* standar 45.000 eksemplar, Al Qur'an saku 4.500 eksemplar, Alkitab 55.000 eksemplar, Kitab Suci Deuterokanonika 3.000 eksemplar, Buku Pendamping Kitab Suci 3.000 eksemplar, Buku Kitab suci bergambar untuk anak-anak 1.500 eksemplar, Reg Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda, serta Kitab panaturan seluruhnya berjumlah 62.400 eksemplar, dan buku Penyuluhan agama Buddha sebanyak 9.025 eksemplar **-merujuk pada hal. 12-13 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009-20 Oktober 2010-**.

Di samping itu, dilaksanakan pula berbagai lomba keagamaan, seperti MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) Tingkat Nasional di Bengkulu (Juni 2010), pengiriman *qari'-qari'ah*, *hafidz-hafidzah* ke ajang MTQ Intenasional, penyelenggaraan Pergelaran Musik gerjawai Inkulturatif, Utsawa Dharma Gita, dan festival seni baca kitab suci Tipitaka/Tripitaka, optimalisasi pemanfaatan media massa bagi pembinaan keagamaan, peringatan hari-hari besar keagamaan, pengembangan sistem dan jaringan informasi keagamaan.

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan, dan meningkatkan indeks kepuasan umat di bidang pelayanan kehidupan beragama. Kegiatan yang dilakukan antara lain rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah sebanyak 3.038 buah (masjid, musholla/langgar, gereja Kristen, gereja Katolik, pura dan vihara), pemilihan KUA dan Keluarga Sakinah Teladan serta pemberian bantuan operasional kepada 5.025 KUA dan rehabilitasi 500 KUA.

Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan bertujuan untuk memberdayakan peran sosial lembaga keagamaan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga keagamaan agar tumbuh dengan baik, sehat, tertib, rukun, dan damai. Kegiatannya antara lain penyelenggaraan pelatihan atau orientasi bagi pengurus lembaga sosial keagamaan agar mampu meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan dan peran sosial lainnya di masyarakat serta pemberian bantuan kepada lembaga sosial dan ormas keagamaan, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Pokja Penyuluh dan LPTQ, Nazhir Wakaf, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI), Christian Centre, Organisasi Kategorial tingkat Pusat-Cabang-Ranting, KWI, Keuskupan, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan A.B Setya Karma, Lembaga Vipassana Indonesia, Tipitaka Fondation, Walubi, KASI, Lembaga Dhammaduta Indonesia, dan lembaga pembinaan keagamaan lainnya.

Program penelitian dan pengembangan agama diarahkan ada penyediaan hasil penelitian kebijakan yang bermutu bagi perumusan kebijakan di bidang agama dan bidang keagamaan. Untuk itu, berbagai program penelitian dan pengembangan agama disusun dan dilaksanakan dalam rangka penguatan kebijakan di bidang agama sebagaimana tertuang dalam RJPM Nasional 2010-2014.

Pencapaian program peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Hal ini antara lain ditandai

dengan semakin mantapnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, peningkatan ini juga tampak dari berkembangnya pola keberagamaan yang inklusif, saling menghargai dan menghayati kemajemukan, serta meningkatnya kesalehan individu dan sosial. Demikian pula pencapaian ini tampak dari meningkatnya gairah keagamaan masyarakat; makin suburnya majelis-majelis zikir; berkembangnya pusat kajian keagamaan; maraknya upacara keagamaan; meningkatnya kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan; meningkatnya kualitas penyuluh agama; meningkatnya kemudahan akses terhadap kitab suci dan buku-buku keagamaan; meningkatnya sumber informasi keagamaan; meningkatnya fungsi rumah ibadat; tumbuhnya perpustakaan rumah ibadat; kemudahan akses pelayanan keagamaan; meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera; serta meningkatnya pelaksanaan berbagai regulasi di bidang kehidupan keagamaan.

2. Peningkatan Kualitas Umat Beragama

Langkah-Langkah Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Sebagai bangsa multietnik, multikultur, dan memiliki keragaman anutan keagamaan, kerukunan umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama menjadi prasyarat mutlak terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dalam lima tahun terakhir telah dilakukan langkah-langkah antara lain: reharmonisasi kehidupan sosial keagamaan daerah pascakonflik; optimalisasiantisipasi disharmonisasi sosial daerah rawan konflik; penguatan peran dan pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal; peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultural; penguatan peran tokoh-tokoh agama dan pemuka agama; penguatan kualitas dan kapasitas forum-forum kerukunan; penerbitan, sosialisasi dan implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006; penerbitan, sosialisasi dan implementasi SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat AhmadiyahIndonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dalam lima tahun terakhir telah didirikan sebanyak 33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 355 FKUB Kabupaten/Kota.

Sinergi dengan langkah tersebut dilakukan pula berbagai kegiatan diklat dan orientasi kerukunan bagi para penyuluh agama, dai, dan sejenisnya; dan program bantuan buku-buku keagamaan dalam rangka pencerahan wawasan keagamaan masyarakat.

Dalam membangun kerukunan umat beragama di kalangan generasi muda lintas agama telah dilakukan sejumlah kegiatan peningkatan pemahaman dan wawasan serta pengamalan ajaran agama yang berwawasan multikultural dalam bentuk kunjungan dan dialog pemuda lintas agama, dengan melibatkan 200 pemuda dari berbagai organisasi dan latarbelakang agama setiap tahunnya.

Dalam lima tahun terakhir telah dilakukan 2 kali Kongres Tokoh Agama dan Pengurus FKUB se-Indonesia Dalam kongres tokoh agama ini dihasilkan sejumlah keputusan penting, antara lain: Negara harus menjadi zona netral dalam kehidupan umat beragama; negara tidak boleh terlibat dalam urusan internal agama-agama; negara harus menjamin kebebasan beragama dan tidak dapat diambil alih oleh negara, serta negara sebagai fasilitator dalam kehidupan umat beragama.

Di dunia internasional, Kementerian Agama juga berperan aktif dalam menjalin kerjasama kerukunan. Hal ini seperti terlihat dalam penyelenggaraan *The 2nd Asia-Europe Meeting (ASEM) Youth Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan pada tahun 2008 di Bandung, Jawa Barat. Tidak kurang dari para pemuda 40 negara anggota ASEM berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menghasilkan kesepakatan perlunya membangun kerjasama internasional pemuda dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kerjasama dalam membangun kerukunan baik nasional, regional dan internasional. Selain Dialog di tingkat pemuda, telah diselenggarakan pula kegiatan Dialog di tingkat para tokoh agama internasional melalui kegiatan *Asia-Europe Meeting (ASEM) Interfaith/Intercultural Retreat for Religious Leaders* di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri para tokoh agama dari negara-negara anggota ASEM yang ditujukan untuk Memberikan kesempatan kepada para tokoh agama Asia dan Eropa untuk bertukar pandangan atas berbagai isu yang melibatkan umat beragama dari negara masing-masing guna sampai pada titik temu dan aksi nyata yang berguna bagi peningkatan harmonisasi umat beragama di masa-masa yang akan datang.

Selain inisiatif, Kementerian Agama bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama guna terlibat aktif dalam kegiatan dialog lintas agama internasional, dengan mengirim utusan dalam setiap event yang diselenggarakan dunia internasional. Hal ini seperti terlihat dalam kepesertaan aktif Kementerian Agama dalam pertemuan-pertemuan lintas agama tingkat tinggi seperti di Nanjing, Cina (2007) dan di Amsterdam, Belanda (2008), dan lain-lain.

Sejalan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis, Kementerian Agama mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan kerukunan dengan melakukan perubahan paradigma dan pendekatan, yaitu dari paradigma formal-birokratis menjadi paradigma humanis-kultural; dari pendekatan yang lebih cenderung *top down* ke arah yang lebih bernuansa *bottom up*. Perubahan paradigma dan pendekatan ini mengindikasikan terjalannya pola hubungan antara pemerintah dan umat beragama, dari yang semula cenderung bersikap sebagai penguasa ke arah yang lebih setara sebagai mitra dialog dan pelayan umat.

Berbagai usaha tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi dan reharmonisasi kehidupan beragama pada masyarakat pasca-konflik; memantapkan kehidupan sosial yang harmonis; pemberdayaan berbagai potensi kerukunan; penguatan sikap siaga dini terhadap ancaman disintegrasi sosial berlatarbelakang agama; memberikan ruang komunikasi dan musyawarah terhadap berbagai perbedaan dan potensi konflik; memberikan jaminan kepastian hukum dalam soal pendirian rumah ibadah dan penanganan Jamaah Ahmadiyah; pengembangan budaya keagamaan bernuansa kerukunan; meningkatnya kebijakan dan tata kelola di bidang kerukunan; serta memberikan ruang partisipasi tokoh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama. Berbagai usaha yang dilakukan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan makin kondusifnya kerukunan umat beragama dalam lima tahun terakhir.

3. Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan merupakan salah satu program prioritas pada pembangunan bidang agama. Hal ini didasarkan oleh masih munculnya sejumlah persoalan yang dihadapi, seperti: kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai; sebaran penduduk yang belum merata; sarana dan prasarana pendidikan yang masih perlu ditingkatkan; adanya kesenjangan mutu lembaga pendidikan agama dan keagamaan dengan lembaga pendidikan

**Program
Peningkatan Mutu
Pendidikan Agama
dan Keagamaan**

yang setara; sebagian besar lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas; belum meratanya akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu; masih adanya perlakuan diskriminatif antara negeri dan swasta sebagai dampak politik pendidikan pada masa sebelumnya; pendidikan keagamaan, khususnya sektor non formal belum mendapat perhatian yang memadai; pembinaan pengelolaan lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan swasta yang masih perlu ditingkatkan dan belum meningkatnya peranan lembaga pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi ini memerlukan penanganan secara lebih fokus, terukur, terarah, dan berlangsung secara simultan.

Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia yang diselenggarakan atau dibina oleh Kementerian Agama terbagi menjadi 3 macam yaitu: pendidikan jenis umum yang berciri khas agama Islam, seperti raudhatul athfal dan madrasah (MI, MTs dan MA); pendidikan agama yang diselenggarakan pada pendidikan umum, seperti pendidikan agama di sekolah atau di perguruan tinggi dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan dalam bentuk pondok pesantren, sekolah minggu, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) dalam bentuk formal, pabbaja samanera, pasraman dan pendidikan keagamaan lainnya.

Sasaran strategis bidang raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing serta memperkuat jati diri bangsa.

Atas dasar itu, Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai program peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan yang diarahkan pada perluasan dan pemerataan akses pendidikan; akselarasi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Dalam upaya perluasan akses pendidikan, Kementerian Agama telah melakukan berbagai program Wajar Dikdas 9 Tahun baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal dan telah memberikan kontribusi hampir 20% terhadap keberhasilan program wajar Dikdas 9 Tahun secara nasional. Kegiatan perluasan akses ini diperoleh melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 6.794.516 peserta didik jenjang tingkat dasar di madrasah dan pondok pesantren salafiyah untuk tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp3.261.137.013.000,- (*tiga triliyun dua ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu rupiah*) -merujuk pada hal. 38 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010- beasiswa kepada kurang lebih 1.180.000 orang siswa miskin MI dan MTs sebesar Rp619.200.000.000,- (*enam ratus sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah*) selama tahun 2010 -merujuk pada hal. 38-39 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010- dan penyediaan layanan pendidikan Kelompok Belajar Paket A dan B bagi sebanyak 9.918 peserta didik -merujuk pada hal. 41 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-.

Sedang dalam upaya peningkatan mutu dan proses pendidikan, dalam tahun 2010 sedikitnya 8.515 ruang kelas MI dan MTs dibangun dan direhabilitasi, termasuk rehabilitasi ruang kelas pasca bencana alam -merujuk pada hal. 39 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-. Di samping itu sebanyak 2.152 MI dan MTs telah diberikan bantuan peningkatan mutu melalui kontrak prestasi, bantuan peningkatan mutu, bantuan perpustakaan, dan bantuan laboratorium -merujuk pada hal. 39 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-.

Untuk peningkatan akses dan kualitas madrasah aliyah telah dilakukan rehabilitasi

2.141 ruang kelas, pembangunan 793 ruang kelas baru, beasiswa kepada 320.000 siswa miskin, pendirian 549 unit MA baru, paket bantuan bagi 706 MA untuk bantuan peningkatan mutu madrasah melalui kontrak prestasi, bantuan perpustakaan dan bantuan laboratorium, pemberian beasiswa berprestasi bagi 720 orang pertahun di Madrasah Aliyah Insan Cendekia Bertaraf Internasional, dan penerangan 113 MA swasta -*merujuk pada hal. 42-43 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-*.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, selama periode Oktober 2009-Oktober 2010 juga telah dilaksanakan kegiatan antara lain melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi program S1 bagi guru sebanyak 15.124 orang, dan beasiswa S2 sebanyak 2.113 orang. Dalam satu tahun terakhir, telah dilaksanakan program percepatan sertifikasi guru untuk 93.600 orang. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, telah dilakukan program subsidi tunjangan fungsional guru non-PNS bagi 459.348 orang guru, dan tunjangan profesi bagi 52.144 guru yang memperoleh sertifikat, serta tunjangan khusus bagi 3.500 guru yang bertugas di daerah khusus -*merujuk pada hal. 63-65 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-*.

Sedangkan bagi dosen telah dilakukan program pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi 1.599 orang dosen, bantuan penyelesaian studi S2 dan S3 bagi 2.357 orang dosen).

Untuk mahasiswa PTAI juga diberikan bantuan beasiswa sebanyak 65.000 mahasiswa untuk kategori mahasiswa miskin dan sebanyak 2.035 mahasiswa untuk kategori mahasiswa berprestasi -*merujuk pada hal. 45-46 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009- 20 Oktober 2010-*, termasuk dalam hal ini adalah bantuan untuk kegiatan badan eksekutif mahasiswa sebanyak 31 paket.

Program dan kegiatan di atas adalah sebagian dari berbagai langkah, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan meningkatnya perluasan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu; meningkatnya pencapaian standar nasional dan standar kompetensi lulusan; meningkatnya mutu kurikulum dan metodologi; dilakukannya program akselarasi terhadap berbagai aspek pendukung; meningkatnya kualitas hasil ujian nasional (mencapai tingkat kelulusan rata-rata 92,89%); meningkatnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; meningkatnya mutu pembinaan dan pengembangan manajemen kelembagaan; implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; serta meningkatnya bantuan belajar dan beasiswa serta berbagai bantuan lainnya.

4. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu pelayanan keagamaan yang sangat vital. Pada tahun 1431 H/2010 M ini, secara umum kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji terbagi dalam 2 (dua) fase, yaitu:

- a. **Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri**, yang meliputi:
Pertama, kuota jamaah haji Indonesia adalah sebanyak 221.000 orang jamaah dengan peruntukkan 197.500 orang untuk jamaah haji reguler dan 23.500 orang jamaah haji khusus. Dari kuota dimaksud tersebut, yang dapat terserap atau jamaah haji yang dapat berangkat pada tahun 1431 H/2010 M ini adalah sebanyak 220.041 orang jamaah terdiri dari 196.606 orang haji reguler dan 23.435 orang dari jamaah haji khusus. Sisanya sebanyak 959 orang batal

**Langkah-Langkah
Pembenahan Sistem
Pengelolaan dan
Teknis Operasional
Penyelenggaraan
Ibadah Haji**

berangkat pada saat masa pemberangkatan dikarenakan meninggal dunia, menunda keberangkatannya, sakit, dinas dan alasan lainnya.

Kedua, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51/2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1431 H/2010 M serta dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji maka calon jamaah yang telah memperoleh nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi, bisa mendaftar dan melunasi BPIH. Waktu pelunasan BPIH bagi jamaah haji reguler dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2010, namun karena sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 masih terdapat sisa kuota maka waktu pelunasan diperpanjang hingga tanggal 6 September 2010. Jumlah jamaah haji reguler yang melunasi BPIH samapai akhir masa pendaftaran adalah sebanyak 197.623 orang. Adapun untuk waktu pelunasan BPIH bagi jamaah haji khusus yaitu dari tanggal 3 sampai 12 Agustus 2010, namun karena hingga batas akhir tersebut masih terdapat sisa kuota, maka waktu pelunasan diperpanjang beberapa kali hingga yang terakhir adalah 2 s.d 3 September. Jumlah jamaah haji khusus yang melunasi BPIH samapai akhir masa pendaftaran adalah sebanyak 23.849 orang.

Ketiga, BPIH pada tahun 1431 H/2010 M mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata BPIH berkurang dari USD3.423 (*tiga ribu empat ratus dua puluh tiga dollar Amerika Serikat*) tambah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) pada tahun 1430 H/2009 M menjadi USD3.342 (*tiga ribu tiga ratus empat puluh dua dollar Amerika Serikat*) untuk tahun 1431 H/2010 M. Sedangkan bagi jamaah haji khusus, BPIH tahun 1431 H/2010 M ditetapkan minimal sebesar USD6.500 (*enam ribu lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) -*merujuk pada hal. 20-21 Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M-*.

Keempat, calon jamaah haji mendapatkan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bimbingan secara langsung diberikan di tingkat Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) kali pertemuan dan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, berupa tatap muka, dialog, praktik manasik, dan pemutaran audio/visual mansik. Sedangkan bimbingan tidak langsung dilakukan melalui berbagai media elektronik dan film.

Kelima, untuk mewujudkan terciptanya kelancaran dalam penyelenggaraan ibadah haji maka Kementerian Agama melakukan rekrutmen petugas haji yang menyertai jamaah (petugas kloter) dan yang tidak menyertai jamaah (petugas non kloter) melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis/tes kompetensi. Petugas haji Indonesia yang ditetapkan tahun 1431 H/2010 M seluruhnya berjumlah 3.844 orang, meliputi petugas kloter sebanyak 2.459 orang, petugas non kloter 836 orang, dan tenaga musiman di Arab Saudi sebanyak 589 orang.

Keenam, seluruh calon jamaah haji juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu yang pertama di Puskesmas Kecamatan lalu yang kedua pada saat bimbingan haji di tingkat Kabupaten/Kota dan yang ketiga dilakukan di asrama haji embarkasi. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan vaksin meningokokus halal untuk seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat.

Ketujuh, penerbangan haji tahun 1431 H/2010 M menggunakan 2 (dua) maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Garuda Indonesia mengangkut jamaah haji sebanyak 119.056 orang yang

berasal dari embarkasi Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Sedangkan Saudi Arabian Airlines memberangkatkan 80.334 orang jamaah haji yang berasal dari embarkasi Batam, Jakarta-Bekasi dan sebagian jamaah haji dari embarkasi Surabaya. Disamping itu juga sempat terjadi pengalihan keberangkatan dari embarkai Solo ke embrkasi Surabaya sebanyak 25 kloter karena peristiwa erupsi Gunung Merapi dari tanggal 3 s.d 9 November 2010.

Kedelapan, keamanan dan perlindungan jamaah diarahkan agar jamaah haji memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Santunan bagi setiap jamaah yang meninggal dunia (*natural death*) sebesar Rp33.600.000,- (*tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), sedangkan yang meninggal karena kecelakaan (*by accident*) diberikan santunan sebesar Rp67.200.000,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*). Jumlah jammah haji yang wafat tahun 1431 H/2010 M sebanyak 486 orang terdiri dari 428 orang meninggal di Arab Saudi dan 58 orang di tanah air. Bagi jamaah haji yang meninggal di pesawat (16 orang) mendapat tambahan Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang diberikan oleh pihak penerbangan. Asuransi yang sudah dibayarkan hingga 14 Februari 2011 sebanyak 353 orang, sisanya sebanyak 113 orang terdiri dari 89 orang sedang dalam proses pencairan karena kurangnya persyaratan dan 44 orang belum mengajukan klaim asuransi.

- b. Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi**, yang meliputi:
- Pertama, kedatangan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi melalui dua bandara, yaitu King Abdul Azis International Airport (KAIA) Jeddah dan Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) International Airport Madinah. Jamaah haji gelombang I yang melalui KAIA Jeddah adalah embarkasi Aceh, Palembang, Jakarta-Bekasi, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Makassar, dan Medan. Sedangkan yang melalui AMAA Madinah adalah embarkasi Batam, Jakarta-Pondok Gede, dan Surabaya. Sementara jamaah haji gelombang II seluruhnya melalui KAIA Jeddah. Jamaah haji yang pertama tiba di Arab Saudi adalah Kloter 01 Banjarmasin dengan penerbangan GA-8100 melalui KAIA Jeddah, tanggal 11 Oktober 2010 pukul 16.45 WAS, jumlah penumpang 380 orang. Sedangkan kloter terakhir yang tiba adalah Kloter 44 Makassar dengan penerbangan GA-1505, tanggal 10 November 2010 pukul 21.26 WAS, jumlah penumpang 359 orang melalui KAIA Jeddah.

Kedua, kedatangan jamaah haji di Makkah dari Madinah dimulai tanggal 20 Oktober 2010, sedangkan dari Jeddah dimulai tanggal 27 Oktober 2010 dengan masa tinggal selama 24 hari di Makkah. Selama di Makkah, seluruh jamaah ditempatkan di pemondokan sebanyak 380 gedung/rumah dengan total kapasitas 202.148 orang, yang realisasi penempatannya adalah pada Ring I (jarak <2000 meter dari Masjidil Haram) dengan jumlah 216 gedung/rumah dan kapasitas 127.338 orang (63,01%) serta pada Ring II (jarak >2000 meter) dengan jumlah 164 gedung dan kapasitas 74.744 orang (36,99%).

Ketiga, jamaah haji mendapat pelayanan katering pada saat kedatangan dan kepulangan di bandara KAIA Jeddah masing-masing 1 boks, di Madinah sebanyak 18 boks (disajikan 2 kali setiap hari), Arafah 4 kali, Muzdalifah 1 boks makanan ringan, Mina 11 kali, dan di hotel transit Jeddah 3 kali. Beberapa masalah yang dialami dalam pelayanan katering tersebut, antara lain :

- Pelayanan Katering di Armina
- Pelayanan katering di Arafah dan Mina (Armina) dilaksanakan oleh 15

perusahaan catering yang melayani 32 maktab dan Muassasah Mutawwif Asia Tenggara yang melayani 39 maktab. Masih terdapat keluhan dari jamaah antara lain panjangnya antrian dan beberapa jamaah yang terlambat mendapatkan makan, hal ini disebabkan karena sebagian jamaah belum memahami sistem antrian per rombongan dan jadwal penyajian makan. Selain itu, terdapat 5 maktab di Mina yang lokasi tendanya berada di lereng bukit, sehingga menyulitkan distribusi catering karena lokasi dapur berada di bawah bukit.

- Pelayanan Catering di Bandara KAIA Jeddah
Pelayanan catering di Bandara KAIA Jeddah dilaksanakan oleh perusahaan Said Bawazir. Secara umum pelayanan berjalan lancar, walaupun di awal operasional haji terdapat 9 rombongan dari Kloter 05-Solo dan Kloter 04-Padang tidak mendapat catering di bandara, karena sebagian petugas catering tidak dapat masuk ke bandara disebabkan tidak memiliki izin tinggal. Perusahaan tersebut telah mendapat teguran dan peringatan keras.
- Pelayanan Catering di Madinah
Pelayanan catering di Madinah dilaksanakan oleh 10 perusahaan, secara umum berjalan lancar meskipun terdapat 3 perusahaan yaitu Makram, Al Fathani dan Al Haidari telah mendapatkan teguran dan peringatan keras, karena terdapat boks catering yang diterima jamaah kurang baik. Sebanyak 79 jamaah kloter 39-Solo dan 40 orang dari kloter 04-Banjarmasin mengalami diare karena mengkonsumsi makanan kurang baik akibat tidak berfungsinya pemanas makanan. Pelaksana catering tersebut telah mendapatkan sanksi berupa pengurangan alokasi pelayanan untuk 8 kloter.

Keempat, untuk melayani dan menangani kesehatan para jamaah, Kementerian Kesehatan RI telah menyiapkan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPIH) baru di Madinah dengan tipe setara Rumah Sakit Tipe C. Untuk di setiap kloter, tenaga kesehatan yang tersedia berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu dokter dan dua para medis. Penyakit yang paling banyak diderita oleh jamaah haji Indonesia antara lain diabetes mellitus dan hipertensi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan bagi jamaah haji tahun 1431 H/2010 M adalah hampir 30-40% jamaah haji yang berangkat mempunyai resiko tinggi penyakit dan usia lanjut, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang rawat inap dalam pelayanan kesehatan di sektor Madinah, ruang pelayanan kesehatan di Bandara KAIA Jeddah yang sempit, dan jumlah ambulans Misi Haji Indonesia yang masih kurang serta ada beberapa ambulans yang sudah waktunya diganti.

Kelima, puncak penyelenggaran ibadah haji adalah rangkaian kegiatan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) dimana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah/Mina dan melontar jumrah serta Tawaf Ifadah yang dimulai sejak tanggal 8-13 Zulhijjah 1431 H (14-19 November 2010 M).

- Pelayanan Arafah
Jamaah haji secara bertahap diberangkatkan dari pemondokan Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf mulai tanggal 8 Zulhijjah 1431 H pukul 09.30 WAS dan yang terakhir memasuki Arafah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah 1431 H pukul 16.00 WAS, karena keterlambatan pengiriman bus. Seluruh jamaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1431 H, kecuali yang jamaah Safari Wukuf (115 orang) dan Badal Haji (145 orang).
- Pelayanan Muzdalifah

Pemberangkatan jamaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah dimulai ba'da Maghrib. Pemberangkatan jamaah haji menuju Mina dari Muzdalifah berjalan lancar dengan bus terakhir yang diberangkatkan dari Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah 1431 H (16 November 2010) pada pukul 08.45 WAS.

- Pelayanan Mina

Seluruh jamaah haji telah berada di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah 1431 H pukul 09.15 WAS. Pelaksanaan mabit serta lontar jumrah *Aqobah* dan hari berikutnya, baik yang *nafar awal* maupun *nafar tsani* berjalan lancar walaupun sempat juga banyak jamaah yang tersesat jalan dan kelelahan setelah tawaf *Ifadah* dan lontar jumrah *Aqobah*. Seluruh jamaah haji telah meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah 1431 H pukul 18.30 WAS.

Keenam, jamaah haji dipulangkan sesuai jadwal dan kloter yang telah ditetapkan dengan prinsip awal bil awal akhir bil akhir. Seluruh jamaah haji gelombang I dipulangkan melalui bandara KAIA Jeddah. Sedangkan jamaah haji gelombang II, sebagian ada yang melalui bandara AMAA Madinah (embarkasi Batam, Jakarta-Pondok Gede, dan Surabaya), sementara jamaah haji dari embarkasi yang lain melalui bandara KAIA Jeddah. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kloter pertama yang menuju Tanah Air melalui Bandara KAIA Jeddah adalah Kloter 01-Makassar dengan penerbangan GA 1100 tanggal 20 November 2010 pukul 16.20 WAS yang tiba pada tanggal 21 November 2010 jam 06.30. Sedangkan kloter terakhir yang pulang adalah kloter 17-Banjarmasin, tanggal 20 Desember 2010 dengan penerbangan GA-1605 pukul 04.45 WAS dari bandara AMAA Madinah yang tiba di Tanah Air pada tanggal 21 Desember 2010. On time performance penerbangan selama masa pemulangan masih menghadapi persoalan serius, terutama pada hari-hari awal pemulangan, dimana dari 494 kloter sebanyak 335 kloter (67,81%) mengalami keterlambatan (*delayed*).

5. Tata Kelola Pemerintahan

Di bidang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* Kementerian Agama menekankan pada dua hal pokok yang saat ini menjadi fokus utama, yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian dan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Di bidang peningkatan kualitas laporan keuangan, Kementerian Agama telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2009. Hal yang dikecualikan terhadap LKKA 2009 tersebut adalah pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesalahan pengelompokan belanja (kesalahan penganggaran).

Untuk memperbaiki dua hal di atas dan mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Kementerian Agama telah menyusun strategi dan langkah-langkah antara lain: perbaikan pengelolaan PNBP; perbaikan penggunaan BAS; perbaikan pengelolaan kas; perbaikan pengelolaan persediaan; perbaikan pengelolaan BMN; perbaikan proses penyusunan laporan keuangan; peningkatan koordinasi dengan instansi dan unit terkait; peningkatan komitmen KPA; penyederhanaan satuan kerja sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan; penguatan tenaga akuntansi sebanyak 1.700 orang yang akan ditempatkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 1.320 orang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebanyak 165 orang, PTAN sebanyak 124 orang; Eselon I Pusat sebanyak 21 orang; Biro Keuangan dan BMN sebanyak 20 orang, dan Tenaga Audit Inspektorat Jenderal

**Upaya Penataan
Organisasi dan
Peningkatan SDM
Aparatur**

sebanyak 50 orang.

Sedang fokus kedua, yaitu penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yang merupakan amanat Presiden RI agar diterapkan di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah pada tahun 2011, Menteri Agama telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pusat yang selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan *survey* tentang informasi jabatan dan pembentukan tim teknis reformasi birokrasi.

Pada tanggal 7 Juni 2010, Kementerian Agama telah menyampaikan dokumen usulan penerapan reformasi birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Konsekuensi dari usulan tersebut, Kementerian Agama telah menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana penerapan reformasi birokrasi dan kegiatan pendukung dalam rangka penerapan reformasi birokrasi melalui sosialisai internal Kementerian Agama, penyusunan peraturan, penyediaan naskah pedoman dan kelengkapan lainnya.

Termasuk dalam upaya reformasi birokrasi, Menteri Agama telah menrubitkan Peraturan Menteri Agama No. 118 Tahun 2011 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama. Program ini merupakan program *quick wins* terdiri dari lima layanan yang diharapkan dapat memicu citra kementerian dalam waktu yang singkat. Kelima layanan tersebut adalah pendaftaran haji, penerimaan CPNS, pencatatan nikah, pemberian beasiswa guru dan dosen serta sertifikasi guru.

Selain dua fokus tersebut, Kementerian Agama juga telah melakukan penataan organisasi pusat dan daerah; peningkatan kualitas SDM aparatur; peningkatan layanan informasi publik; peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran; pengembangan hukum dan kerja sama luar negeri dan optimalisasi pengawasan kinerja serta pelaksanaan program dan anggaran.

Di bidang penataan organisasi telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui pengembangan satuan organisasi antara lain pengembangan satuan organisasi Kementerian Agama di tingkat pusat, dengan penajaman fungsi melalui pembentukan Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Ditjen Pendidikan Islam. Selama periode 2009-2010 dalam upaya memenuhi tuntutan pengembangan organisasi di daerah pemekaran, 21 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota baru dan 347 Kantor Urusan Agama Kecamatan baru. Pada Perguruan Tinggi Agama (PTA) telah dilakukan peningkatan status STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sedangkan pada madrasah telah dilakukan penegrian di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 119 MIN, 184 MTsN, dan 113 MAN **-merujuk pada hal. 89 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009-20 Oktober 2010-**.

Dalam upaya peningkatan kualitas aparatur sumber daya manusia Kementerian Agama, telah dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pegawai Kementerian Agama seluruh Indonesia. Adapun jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat sepanjang periode Oktober 2009-September 2010 adalah sebanyak 27.852 orang pegawai mengikuti Diklat Teknis, 18.402 orang pegawai mengikuti Diklat Dalam Jabatan (Struktural dan Fungsional), dan 34.808 orang pegawai mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III **-merujuk pada hal. 95 Laporan Capaian Kinerja Menteri Agama RI 21 Oktober 2009-20 Oktober 2010-**.

Di bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja, dalam lima tahun terakhir, Kementerian Agama telah dilakukan pengawasan terhadap 9.126 obyek pemeriksaan, pemberian sanksi, hukuman disiplin dan teguran kepada 870 orang

pegawai, penanganan 82 aduan dari 129 pengaduan masyarakat yang dipandang benar. Di samping itu telah dilakukan pengembangan pengawasan dengan pendekatan agama, pengembangan budaya kerja, pelaksanaan pakta integritas, dan penerapan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi.

Untuk bidang optimalisasi perencanaan program dan anggaran, Kementerian Agama mengalami kenaikan anggaran yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir, dari sebesar Rp15.139,235,761,671,- (*lima belas triliun seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp30,635,110,665,000,- (*tiga puluh triliun enam ratus tiga puluh lima milyar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) pada tahun 2010. Sejalan dengan penambahan anggaran tersebut, telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penajaman program dan sasaran secara lebih tepat dan terukur, termasuk dilakukannya pengawasan khusus fungsi pendidikan yang memperoleh alokasi terbesar dari anggaran Kementerian Agama.

A.6. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2010 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Kementerian Agama, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Unit Eselon-1 beserta jenjang struktural di bawahnya seperti 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). LKKA disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKKA Tahun 2010, entitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Agama dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi:

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah Tanggungjawab Seluruh Satker

Tabel 1
Jumlah Entitas Akuntansi Kementerian Agama

No	Unit Kerja	Jumlah Satker	
		2010	2009
1	Eselon 1 Pusat	10	10
2	Kanwil	33	33
3	Kantor Kemenag Kab/Kota	440	440
4	MAN	745	646
5	MTsN	1.405	1.253
6	MIN	1.669	1.567
7	UIN	6	6
8	IAIN	14	13
9	STAIN	32	33
10	STABN	1	1
11	STAKN	6	6

12	STAHN	2	2
13	IHDN	1	1
14	Balai Diklat	12	12
15	Balai Litbang	3	3
16	Lajnah Pentashihan Al-Quran	1	1
17	Atase Haji	1	1
Jumlah		4.381	4.028

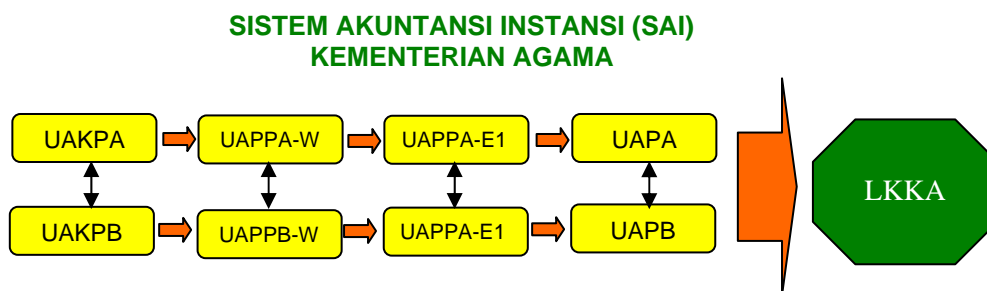
Dengan demikian LKKA Tahun 2010 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh 4.381 satker di lingkungan Kementerian Agama termasuk di dalamnya 13 satker yang sudah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yaitu :

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. UIN Malang
4. UIN Sultan Qasim Riau
5. UIN Alauddin Makassar
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. IAIN Sunan Ampel Surabaya
8. IAIN Sultan Thaha Jambi
9. IAIN Sumatera Utara
10. IAIN Walisongo Semarang
11. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
12. IAIN Raden Fatah Palembang
13. IAIN Raden Intan Lampung

Dari 13 satker BLU di atas, sudah 12 satker BLU yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan PPK-BLU, sedangkan IAIN Raden Fatah Palembang masih menggunakan penyusunan laporan keuangan dengan mekanisme yang diatur oleh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) karena baru menjadi BLU pada bulan Oktober 2010.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kementerian Agama menyelenggarakan SAI secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian Agama (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Bagan Arus Penyusunan Laporan Keuangan



A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kementerian Agama telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu :

*Cash Toward
Accrual (CTA),
Informasi Akrual
sebagai suplemen
LKKA*

1. basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. artinya pendapatan diakui sebagai penerimaan pada saat uang diterima oleh Kas Umum Negara dan belanja sebagai pengeluaran pada saat uang dikeluarkan dari Kas Umum Negara.
2. basis akrual adalah pengakuan transaksi dan peristiwa lainnya yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan aset dan kewajiban tanpa memperdulikan apakah uang sudah diterima atau sudah dikeluarkan oleh Kas Umum Negara.

LKKA menggunakan gabungan dua basis tersebut diatas. Penerapan gabungan dua basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual dalam satu laporan keuangan disebut *Cash Toward Accrual (CTA)*. Hal ini dilakukan mengingat belum sepenuhnya basis akrual mampu diimplementasikan ke dalam LKKA. Basis CTA ini menyajikan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dengan berbasis akrual.

Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 23 Desember 2009 telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kementerian Agama selaku UAPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplemen dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 yang disusun secara berjenjang berdasarkan gabungan informasi pendapatan dan belanja secara akrual mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1. Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan LKKA tahun 2010 adalah :

A.7.1. PENDAPATAN

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui saat kas diterima pada Kas Umum Negara. Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatannya.

Belanja

A.7.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

A.7.3. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima oleh atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Sedangkan di Kementerian Agama Aset hanya terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

A.7.3.1 Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara

sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

A.7.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian/lembaga berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Tanah

Aset Kementerian Agama terdiri dari :

1. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

Peralatan dan Mesin

3. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan

mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Aset Tetap Lainnya

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

KDP

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat dialokasikan ke konstruksi bangunan mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

A.7.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya di Kementerian Agama adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

A.7.4. KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah di klasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban pada satker dalam lingkup Kementerian Agama adalah kewajiban jangka pendek berupa kewajiban kepada KPPN yang disebabkan karena keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan kepada BUN/KPPN yaitu pendapatan yang ditangguhkan, Beban Belanja Pegawai, Beban daya dan jasa.

A.7.5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Dalam lingkup Kementerian Agama Ekuitas dana hanya terdiri dari Ekuitas Dana Lancar.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

CaLK LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA

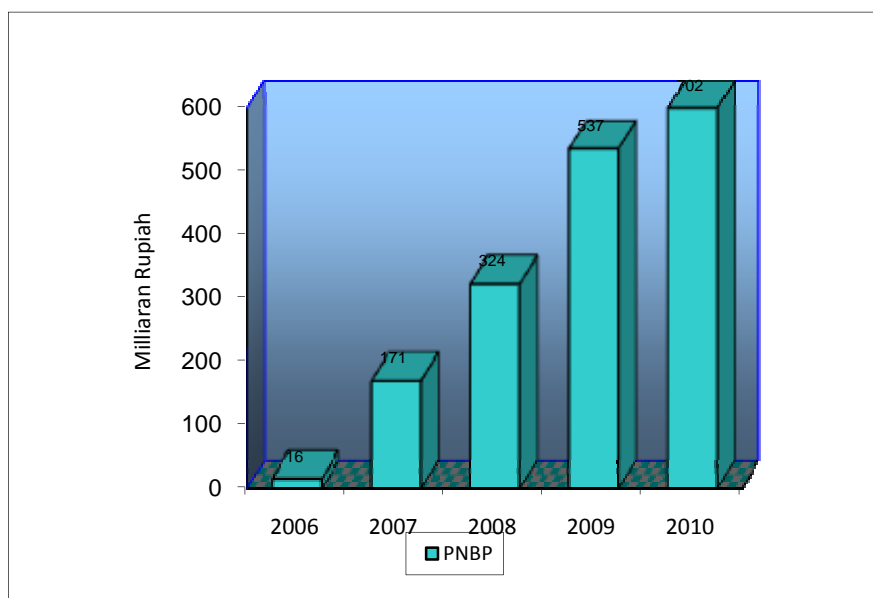
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama pada Tahun Anggaran (TA) 2010 adalah Rp702.576.476.771,- yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri dimaksud bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kebijakan yang ditempuh adalah membuat prosedur pengelolaan PNBP antara lain relokasi pengelolaan PNBP fungsional (NR) yang selama ini dikelola oleh Kantor Wilayah dialihkan ke Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan KUA. Pembinaan terus menerus dilakukan pada PTAN menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) dan penertiban PNBP umum lainnya.

Laporan Keuangan BLU di lingkungan Kementerian Agama dapat dilihat pada **Lampiran 9 Ikhtisar Laporan Keuangan BLU**.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang berasal dari PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat pada Grafik 1

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang berasal dari PNBP selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, yaitu antara lain karena bertambahnya peristiwa nikah dan rujuk yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan nikah rujuk, dan meningkatnya kesadaran satker-satker perguruan tinggi untuk melaporkan pendapatannya yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pendidikan yang berasal dari satker BLU maupun non BLU.

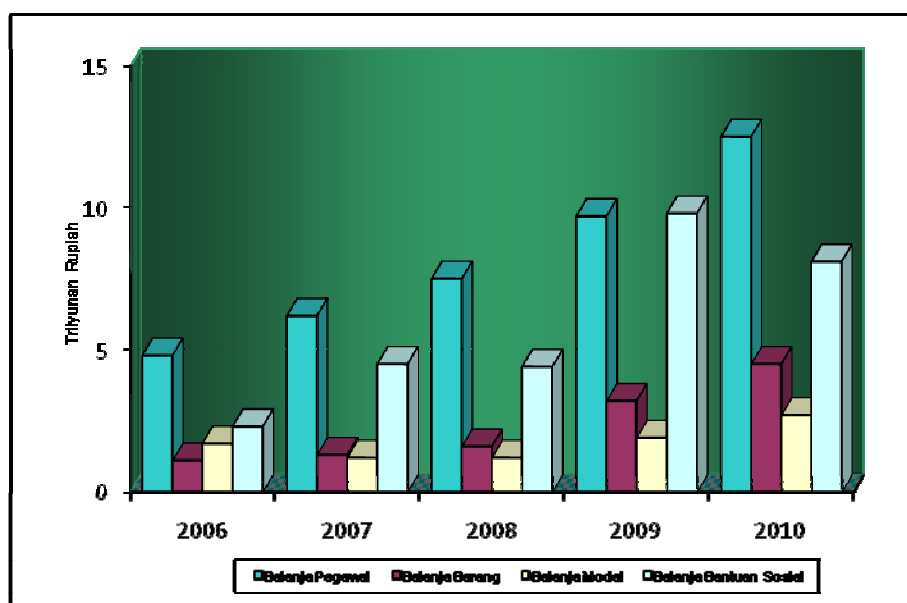


Grafik 1. Realisasi PNBP TA 2006-2010

Sementara itu, Realisasi Belanja Kementerian Agama pada TA 2010 sebesar Rp28.047.146.918.980,- terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.563.581.888.876,- Belanja Barang sebesar Rp4.594.721.341.928,- Belanja Modal sebesar Rp2.771.539.888.423,- dan Belanja Bantuan Sosial

sebesar Rp8.117.303.799.753,-.

Perkembangan Realisasi Belanja Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.



Grafik 2. Realisasi Belanja Kementerian Agama TA 2006-2010

Pendapatan Negara dan Hibah

Rp702.576.476.771,-

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama TA 2010 hanya berasal dari Realisasi PNBPN, yaitu sebesar Rp702.576.476.771,-

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN TA 2010 adalah sebesar Rp702.576.476.771,- berarti mencapai 133,289 persen dari estimasi pendapatan yang dilaporkan sebesar Rp527.108.843.945,-. Hal ini terjadi karena terdapat PNBPN Umum yang tidak dicantumkan estimasinya dalam DIPA oleh masing-masing satker disebabkan kesulitan dalam menginventarisir jenis penerimaan PNBPN Umum diantaranya adalah pemanfaatan aset yang belum diatur secara rinci oleh instansi terkait. Realisasi TA 2009 sebesar Rp537.311.907.823,- menunjukkan adanya kenaikan angka sebesar Rp165.264.568.948,- atau 30,76 persen. Rincian Pendapatan Kementerian Agama dapat dilihat pada lampiran 1.

Realisasi PNBPN berasal dari PNBPN Lainnya dan PNBPN BLU. PNBPN Lainnya terdiri dari: (i) Pendapatan Jasa Nikah dan Rujuk, (ii) Pendapatan Pendidikan dan (iii) Pendapatan Umum.

PNBPN Lainnya

Rp322.529.890.531,-

B.2.1.1.1. Pendapatan PNBPN Lainnya

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2010 adalah sebesar Rp322.529.890.531,- atau mencapai 110,96 persen dari estimasi sebesar Rp290.681.901.945,-. Hal ini berarti PNBPN Lainnya pada TA 2010 lebih besar Rp48.402.112.992,00,-

atau 17,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp274.127.777.539,-. Rincian realisasi PNBP Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 2
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Jasa KUA	67.548.420.179	65.263.675.759
Pendapatan Pendidikan	185.206.000.133	165.795.305.031
Pendapatan Umum	69.775.470.219	43.068.796.749
Jumlah	322.529.890.531	274.127.777.539

Realisasi pendapatan jasa KUA tidak dalam kelipatan Rp30.000,- sesuai dengan besaran PNBP untuk jasa layanan Nikah/Rujuk, karena masih terdapat penyetoran PNBP lainnya yang masuk ke dalam akun Pendapatan Jasa KUA.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI terdapat Pendapatan Pendidikan sebesar Rp1.897.375.000,- yang tidak disetor ke Kas Negara melainkan digunakan langsung diluar mekanisme APBN, yaitu pada satker IAIN Syekh Nurdjati Cirebon, STAIN Pekalongan, dan STAIN Parepare.

*Rincian Realisasi
Pendapatan PNBP
Lainnya per Eselon 1
dan Wilayah*

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per Eselon 1 dan Wilayah dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 3
Rincian Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
per Eselon 1 dan Wilayah
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1.888.115.947	1.411.197.049
2	02	Inspektorat Jenderal	72.622.181	153.572.401
3	03	Ditjen Bimas Islam	127.508.609	286.562.889
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	5.291.968.303	47.573.821
5	05	Ditjen Bimas Kristen	48.776.372	13.064.261
6	06	Ditjen Bimas Katolik	137.555.229	27.660.575
7	07	Ditjen Bimas Hindu	542	6.085.218
8	08	Ditjen Bimas Budha	987.433.054	126.400.647
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	428.033.800	5.692.888.611
10	11	Badan Litbang	406.909.227	141.783.413
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	3.058.193.793	2.402.723.130
2	0200	Jawa Barat	23.410.981.214	19.525.245.579
3	0300	Jawa Tengah	41.296.650.347	31.764.890.461
4	0400	DI. Yogyakarta	1.663.645.865	1.324.913.203
5	0500	Jawa Timur	38.796.073.612	41.205.919.699
6	0600	Aceh	20.038.909.840	17.256.453.341
7	0700	Sumatera Utara	9.099.966.333	11.273.606.411

8	0800	Sumatera Barat	41.991.340.704	21.146.119.990
9	0900	Riau	8.242.924.658	10.504.279.268
10	1000	Jambi	8.649.398.769	8.557.311.933
11	1100	Sumatera Selatan	10.736.949.112	8.848.447.120
12	1200	Lampung	9.720.140.354	11.512.819.691
13	1300	Kalimantan Barat	5.462.534.215	5.192.932.145
14	1400	Kalimantan Tengah	5.233.716.822	3.408.539.044
15	1500	Kalimantan Selatan	8.042.475.977	5.505.544.090
16	1600	Kalimantan Timur	4.879.111.128	3.137.725.159
17	1700	Sulawesi Utara	1.865.185.178	1.388.549.968
18	1800	Sulawesi Tengah	2.791.570.938	2.565.774.551
19	1900	Sulawesi Selatan	13.237.546.105	10.681.557.166
20	2000	Sulawesi Tenggara	2.302.003.907	2.327.301.241
21	2100	Maluku	7.388.047.183	8.318.782.901
22	2200	Bali	6.027.364.596	4.933.043.287
23	2300	NTB	10.100.571.809	6.952.274.208
24	2400	NTT	506.811.191	270.941.965
25	2500	Papua	2.043.665.117	1.086.802.673
26	2600	Bengkulu	9.805.784.106	6.701.503.652
27	2800	Maluku Utara	3.242.764.226	1.959.956.266
28	2900	Banten	7.101.318.356	11.862.651.257
29	3000	Bangka Belitung	2.286.537.319	1.746.175.671
30	3100	Gorontalo	2.127.994.595	1.534.783.253
31	3200	Kepulauan Riau	796.021.881	507.520.069
32	3300	Papua Barat	865.763.769	374.449.222
33	3400	Sulawesi Barat	329.004.248	441.451.040
JUMLAH			322.529.890.531	274.127.777.539

PNBP BLU

Rp380.046.586.240,-

B.2.1.1.2. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 adalah sebesar Rp380.046.586.240,- atau mencapai 160,746 persen dari estimasi sebesar Rp236.426.942.000,- Sementara Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 adalah sebesar Rp263.184.130.284,- atau mencapai 160,87 persen dari estimasi sebesar Rp163.593.876.000,-. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2010 meningkat sebesar Rp116.862.455.956 atau 215,95 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009.

Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Tabel. 4
Realisasi Pendapatan BLU

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	354.531.785.531	246.306.210.623
Pendapatan Hibah BLU	480.791.750	354.018.089
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	21.016.520.570	16.523.901.572
Jumlah	380.046.586.240	263.184.130.284

Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja BLU dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

**Rincian Realisasi
Pendapatan BLU**Tabel. 5
Rincian Realisasi Pendapatan BLU per Satker BLU

NO	KODE SATKER	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
1	423501	UIN Syarif Hidayatullah	103.885.081.225	130.327.749.158
2	423523	UIN Sunan Gunung Djati	27.786.316.675	31.474.725.987
3	423611	IAIN Walisongo Semarang	16.704.091.623	1.746.159.862
4	423755	UIN Sunan Kalijaga	51.778.273.062	47.626.494.998
5	423770	IAIN Sunan Ampel	30.006.391.261	-
6	423812	UIN Malang	30.904.135.020	26.631.119.446
7	424007	IAIN Sumut	14.167.968.598	6.582.968.450
8	424157	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	43.119.804.200	-
9	307314	UIN Alauddin	30.015.887.880	18.794.912.383
10	424188	IAIN Sultan Thaha	15.266.036.744	-
11	423548	IAIN SMH Banten	11.203.358.375	-
12	424260	IAIN Raden Intan Lampung	5.209.241.577	-
13	424208	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
JUMLAH			380.046.586.240	263.184.130.284

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IAIN Raden Fatah Palembang belum melaporkan pendapatan BLU, karena satker tersebut baru ditetapkan sebagai satker BLU pada tanggal 30 September 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 401/KMK.05/2010. Sedangkan untuk satker IAIN Sunan Ampel, UIN Sultan Syarif Kasim, IAIN Sultan Thaha, IAIN SMH Banten, dan IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2009 belum melaporkan pendapatan BLU karena satker-satker tersebut baru menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada tahun 2010.

Selain itu, terkait dengan pendapatan BLU tahun 2010, BPK RI menemukan pendapatan BLU tahun 2010 sebesar Rp1.191.109.000,- yang belum disahkan oleh KPPN yaitu pada satker IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Sumatera Utara Medan.

B.2.2. Belanja**Realisasi Belanja
Kementerian Agama
Rp28.047.146.918.980,-**

Realisasi Belanja Kementerian Agama TA 2010 adalah sebesar Rp28.047.146.918.980,- atau 91,58 persen dari pagu terlapor sebesar Rp30.627.412.668.237,-. Persentase Realisasi Belanja Kementerian Agama TA 2009 lebih besar 12,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar RP24.894.282.275.367,-. Rincian Belanja Kementerian Agama dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Kelompok Belanja

Belanja Kementerian Agama dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (i) Belanja Kementerian Agama menurut Jenis Satuan Kerja; (ii) Belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana dan Kegiatan; (iii) Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi, Subfungsi, Program; dan (iv) Belanja Kementerian Agama menurut Jenis Belanja.

**Belanja Kementerian
Agama Menurut Jenis
Satuan Kerja****Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Satuan Kerja**

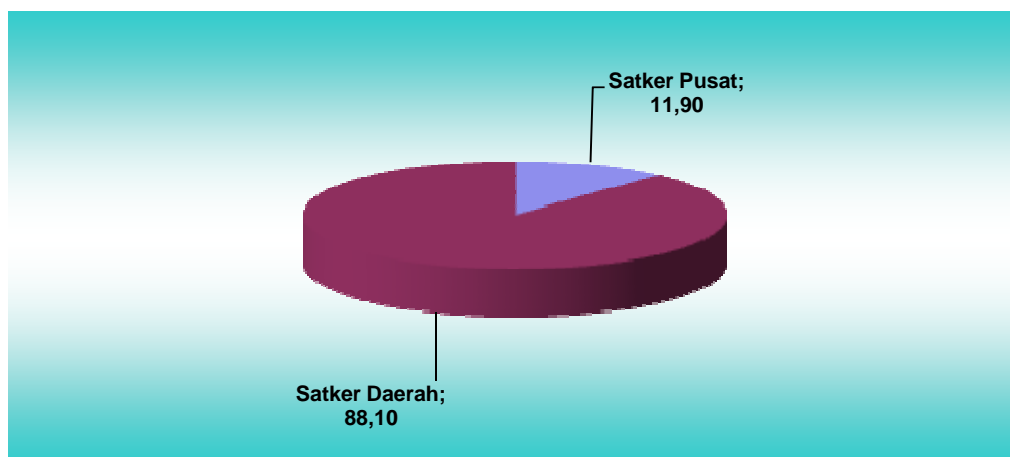
Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Satuan Kerja terdiri dari Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor Daerah. Realisasi Belanja untuk

satker kantor pusat Kementerian Agama TA 2010 sebesar Rp3.337.988.991.960,- atau 11,90 persen dari total belanja, sedangkan kantor daerah sebesar Rp24.709.157.927.020,- atau 88,10 persen dari total belanja.

Tabel. 6
Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Satker Pusat	3.337.988.991.960	2.418.844.587.505
Satker Daerah	24.709.157.927.020	22.475.437.687.862
Jumlah	28.047.146.918.980	24.894.282.275.367

Komposisi realisasi belanja di satker pusat dan satker daerah dapat dilihat pada Grafik 3.



Grafik 3. Komposisi Realisasi Belanja Kementerian Agama di Satker Pusat dan Daerah TA 2010

*Rincian Realisasi
Anggaran Belanja
Menurut Satker pusat
dan Daerah*

Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dan Wilayah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 7
Rincian Realisasi Anggaran Belanja
Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	299.825.833.865	339.765.378.065
2	02	Inspektorat Jenderal	89.995.335.058	84.771.635.600
3	03	Ditjen Bimas Islam	140.225.801.246	130.898.705.729
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	2.140.036.548.685	1.285.860.155.230
5	05	Ditjen Bimas Kristen	119.381.278.389	95.064.972.359
6	06	Ditjen Bimas Katolik	88.888.768.978	67.305.941.300

7	07	Ditjen Bimas Hindu	70.629.515.693	58.360.665.341
8	08	Ditjen Bimas Budha	50.931.013.803	42.406.621.046
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	169.705.596.556	142.324.531.553
10	11	Badan Litbang	168.369.299.687	172.085.981.282
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1.096.285.262.564	863.262.183.157
2	0200	Jawa Barat	3.144.624.594.732	3.055.164.394.466
3	0300	Jawa Tengah	2.962.374.301.416	2.806.252.377.344
4	0400	DI. Yogyakarta	558.874.212.050	465.834.079.462
5	0500	Jawa Timur	3.947.749.805.141	3.858.200.514.527
6	0600	Aceh	1.255.402.514.060	1.055.760.081.493
7	0700	Sumatera Utara	1.084.791.757.627	993.474.136.758
8	0800	Sumatera Barat	833.518.833.062	643.202.632.930
9	0900	Riau	576.389.484.805	543.415.800.375
10	1000	Jambi	509.917.607.278	534.007.783.383
11	1100	Sumatera Selatan	575.685.374.828	523.329.636.662
12	1200	Lampung	654.223.180.343	652.243.508.518
13	1300	Kalimantan Barat	373.627.565.434	326.156.734.620
14	1400	Kalimantan Tengah	350.560.754.869	309.210.397.225
15	1500	Kalimantan Selatan	702.987.283.473	577.357.819.099
16	1600	Kalimantan Timur	290.021.171.466	242.700.637.200
17	1700	Sulawesi Utara	229.422.804.097	174.863.685.113
18	1800	Sulawesi Tengah	334.398.315.713	284.164.145.338
19	1900	Sulawesi Selatan	1.199.915.791.898	1.027.470.833.441
20	2000	Sulawesi Tenggara	292.363.428.122	235.970.468.425
21	2100	Maluku	282.254.453.698	240.853.419.653
22	2200	Bali	293.156.092.103	250.976.817.781
23	2300	NTB	651.863.865.555	583.802.847.302
24	2400	NTT	284.281.627.746	242.005.532.151
25	2500	Papua	185.269.914.762	169.199.974.530
26	2600	Bengkulu	286.689.456.119	254.905.899.247
27	2800	Maluku Utara	191.126.452.566	157.547.121.087
28	2900	Banten	843.674.479.777	803.868.351.788
29	3000	Bangka Belitung	129.224.784.028	114.302.724.716
30	3100	Gorontalo	188.155.382.078	151.318.623.886
31	3200	Kepulauan Riau	120.234.060.849	96.554.705.980
32	3300	Papua Barat	123.638.147.503	107.188.612.044
33	3400	Sulawesi Barat	154.976.926.428	129.230.098.676
34	5000	Atase Haji	1.478.240.830	1.641.109.485
JUMLAH			28.047.146.918.980	24.894.282.275.367

Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Belanja Kementerian Agama Menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana dan Kegiatan terdiri dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBPN, dan BLU.

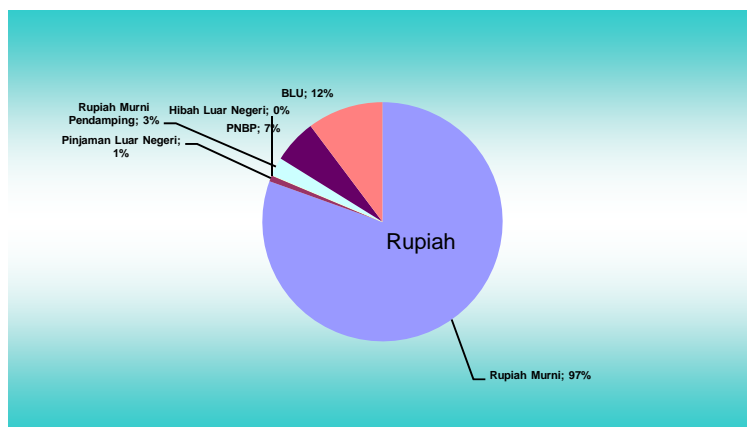
Realisasi Belanja terbesar bersumber dari Rupiah Murni, yaitu sebesar Rp27.065.482.492.890,- atau 93,15 persen dari anggaran yang dilaporkan

sebesar Rp29.056.682.080.237,- Sementara itu, realisasi Belanja Kementerian Agama yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp356.097.357.693,- atau 41,34 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp861.484.638.000,-. Realisasi belanja yang berasal dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp0,- atau 0 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp0,-. Realisasi belanja yang berasal dari Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp83.161.692.514,- atau 94,32 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp88.168.643.000,- Realisasi belanja yang berasal dari PNPB sebesar Rp197.463.430.279,- atau 85,50 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp230.944.797.000,- . Sedangkan realisasi belanja yang berasal dari BLU sebesar Rp344.941.945.604,- atau 88,42 persen dari pagu belanja BLU yang dilaporkan sebesar Rp Rp390.132.510.000,-

Tabel. 8
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Rupiah Murni	27.065.482.492.890	23.832.185.669.483
Pinjaman Luar Negeri	356.097.357.693	488.901.316.507
Hibah Luar Negeri	0	57.174.339.000
Rupiah Murni Pendamping	83.161.692.514	98.544.014.163
PNBP	197.463.430.279	193.873.568.053
BLU	344.941.945.604	223.603.368.161
Jumlah	28.047.146.918.980	24.894.282.275.367

Komposisi 6 (enam) Sumber Dana dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Komposisi Realisasi Enam Sumber Dana dalam Belanja Kementerian Agama TA 2010

Laporan Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana dapat dirinci sebagai berikut:

**Rincian Belanja
Kemenag Menurut
Sumber Dana Rupiah
Murni**

**Tabel. 9
Rincian Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Rupiah Murni
TA 2010 dan TA 2009**

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	299.825.833.865	339.765.378.065
2	02	Inspektorat Jenderal	89.995.335.058	84.771.635.600
3	03	Ditjen Bimas Islam	140.225.801.246	130.898.705.729
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.991.234.335.489	950.166.969.951
5	05	Ditjen Bimas Kristen	119.381.278.389	95.064.972.359
6	06	Ditjen Bimas Katolik	88.888.768.978	67.305.941.300
7	07	Ditjen Bimas Hindu	70.629.515.693	58.360.665.341
8	08	Ditjen Bimas Budha	50.931.013.803	42.406.621.046
9	9	Ditjen Haji dan Umroh	169.705.596.556	142.324.531.553
10	11	Badan Litbang	168.369.299.687	172.085.961.282
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	900.768.209.704	683.516.211.948
2	0200	Jawa Barat	3.096.090.007.118	3.020.001.976.966
3	0300	Jawa Tengah	2.920.601.395.343	2.774.857.491.814
4	0400	DI. Yogyakarta	514.169.356.675	422.408.904.329
5	0500	Jawa Timur	3.868.199.448.208	794.393.761.173
6	0600	Aceh	1.187.079.447.062	1.041.981.935.854
7	0700	Sumatera Utara	1.065.329.268.097	980.473.858.651
8	0800	Sumatera Barat	815.033.767.568	630.314.345.451
9	0900	Riau	536.408.087.965	462.944.482.106
10	1000	Jambi	492.677.142.941	524.369.362.433
11	1100	Sumatera Selatan	566.192.694.228	516.691.506.068
12	1200	Lampung	644.735.558.912	644.219.082.168
13	1300	Kalimantan Barat	369.270.947.078	321.845.190.920
14	1400	Kalimantan Tengah	346.409.446.559	306.542.822.620
15	1500	Kalimantan Selatan	697.624.504.118	573.790.038.553
16	1600	Kalimantan Timur	287.712.576.166	241.293.145.725
17	1700	Sulawesi Utara	228.052.621.097	173.779.736.498
18	1800	Sulawesi Tengah	332.524.721.884	282.665.686.248
19	1900	Sulawesi Selatan	1.024.824.096.287	846.906.061.901
20	2000	Sulawesi Tenggara	290.790.321.681	234.834.567.925
21	2100	Maluku	275.918.294.128	237.476.851.753
22	2200	Bali	289.114.634.878	246.767.842.878
23	2300	NTB	644.548.777.180	577.510.049.451

24	2400	NTT	284.244.030.946	241.975.432.351
25	2500	Papua	184.382.832.462	168.419.808.107
26	2600	Bengkulu	278.325.649.420	249.189.297.076
27	2800	Maluku Utara	188.554.942.700	156.054.237.225
28	2900	Banten	833.759.681.602	796.852.830.698
29	3000	Bangka Belitung	127.527.178.036	112.885.635.816
30	3100	Gorontalo	185.989.491.373	149.960.016.766
31	3200	Kepulauan Riau	119.907.876.849	96.269.857.980
32	3300	Papua Barat	123.274.149.803	107.174.212.044
33	3400	Sulawesi Barat	154.776.315.228	129.026.936.276
34	5000	Atase Haji	1.478.240.830	1.641.109.485
JUMLAH			27.065.482.492.890	23.832.185.669.483

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 10
Rincian Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri
TA 2010 dan TA 2009

*Rincian Belanja
 Kemenag Menurut
 Sumber Dana
 Pinjaman Luar Negeri*

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	04	Ditjen Pendidikan Islam	102.595.194.376	234.640.285.739
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	78.009.970.992	77.359.729.527
2	0200	Jawa Barat	2.387.302.250	-
3	0300	Jawa Tengah	-	-
4	0400	D.I Yogyakarta	-	-
5	0500	Jawa Timur	-	4.147.705.537
6	0600	Aceh	45.771.470.600	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	646.800.000	54.597.868.954
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-

18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	126.686.619.475	118.155.726.750
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	NTB	-	-
24	2400	NTT	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			356.097.357.693	488.901.316.507

Hasil rekonsiliasi tripatid yaitu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bahwa penerbitan SP3 (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 oleh KPPN VI Jakarta berakhir pada tanggal 30 April 2011. Dari hasil pertemuan dengan Satker yang mendapat PHLN diketahui bahwa realisasi PHLN di lingkungan Kementerian Agama terdapat pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar JPY170.151.602 UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebesar IDR1.811.282.500 UIN Alaudin Makasar sebesar USD228.700.000 dan IDR13.454.935.000 IAIN Ar-Raniry Aceh sebesar IDR932.908.000 yang masih dalam bentuk WA (*Withdrawal Application*) dan sampai dengan tanggal 30 April 2011 belum terbit SP3 nya.

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

No	Tgl WA	No. WA/ LC		Nilai L/C atau WA	Jns Pembayaran	Budget Code
1	18/04/11	000222/P L.3/0411	JICA	JPY 5.170.044	PL	2132.07.02.522113
2	18/04/11	000221/P L.3/0411	JICA	JPY 8.071.615	PL	2132.07.02.522113
3	16/03/11	00060/PL.3/0311	JICA	JPY1.438.639	PL	2132.07.02.532111
4	24/01/11	001/900/5964/JICA	JICA	JPY18.129.471	Loan	
5	27/01/11	001/900/5964/JICA	JICA	JPY130.259.215	Loan	
6	21/02/11	001/900/5964/JICA	JICA	JPY7.082.618	Loan	
TOTAL				JPY170.151.602		

2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

No	Tgl WA	No. WA		Nilai L/C atau WA	Jenis Pem bayaran	Budget Code
1	02/12/10	APL/07/IDB/PMU/Tgl.06-10-2010	IDB	IDR63.000.000	PL	3422.00165.533111
2	06/12/10	APL/11/IDB/PMU/Tgl.01-12-2010	IDB	IDR282.515.000	PL	3422.00165.533111
3	06/12/10	APL/12/idb/p mu	IDB	IDR30.000.000	PL	3422.00165.533111
4	27/12/10	APL/13/idb/p mu	IDB	IDR1.435.767.500	PL	3422.00165.533111
TOTAL			IDB	IDR 1.811.282.500		

3. IAIN Ar Raniry Banda Aceh

No	Tgl WA	No. WA		Nilai L/C atau WA	Jns Pemba yaran	Budget Code
1	30/12/10	212/PMU-IDB/AR Raniry/2010	IDB	IDR 804.908.000	PL	0024.04343.522113
2	30/12/10	214/PMU-IDB/AR Raniry/2010	IDB	IDR 96.000.000	PL	0024.00165.522115
3	30/12/10	218/PMU-IDB/AR Raniry/2010	IDB	IDR 32.000.000	PL	0024.00165.522115
TOTAL			IDB	IDR932.908.000		

4. UIN Alauddin Makassar

No	Tgl WA	No. WA		Nilai L/C atau WA	Jns Pemba yaran	Budget Code
1	23/12/10	Ext.Keu/UIN-PMU/260.O/XII/2010	IDB	USD 228.700	PL	0024.00272.532111
2	09/12/10	Ext.Keu/UIN-PMU/255/XII/2010	IDB	IDR 12.745.000.000	PL	3422.00165.533111
3	17/12/10	Ext.U/UIN-PMU/255/IX/2007	IDB	IDR 675.000.000	PL	3422.00165.522113
4	22/12/10	UIN-PMU/261.D/XII/2010	IDB	IDR 34.935.000	PL	3422.00165.522113

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

**Belanja Kemenag
Menurut Sumber Dana
Hibah Luar Negeri**

Tabel. 11
Rincian Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Hibah Luar Negeri
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	04	Ditjen Pendidikan Islam	0	57.174.339.000
JUMLAH			0	57.174.339.000

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping dapat dirinci sebagai berikut:

**Rincian Belanja
Kemenag Menurut
Sumber Dana Rupiah
Murni Pendamping**

Tabel. 12
Rincian Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	04	Ditjen Pendidikan Islam	46.207.018.820	43.878.560.540
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	8.930.136.569	8.184.575.812
2	0200	Jawa Barat	6.067.117.591	802.830.000
3	0300	Jawa Tengah	-	-
4	0400	D.I Yogyakarta	-	-
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	3.182.092.634	3.043.539.522
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	1.499.905.090
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	18.775.326.900	41.134.603.199
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-

21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	NTB	-	-
24	2400	NTT	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2700	Maluku Utara	-	-
28	2800	Banten	-	-
29	2900	Bangka Belitung	-	-
30	3000	Gorontalo	-	-
31	3100	Kepulauan Riau	-	-
32	3200	Papua Barat	-	-
33	3300	Sulawesi Barat	-	-
34	3400	Atase Haji	-	-
JUMLAH			83.161.692.514	98.544.014.163

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana PNBPN dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana PNBPN
TA 2010 dan TA 2009

*Rincian Belanja
 Kemenag Menurut
 Sumber Dana PNBPN*

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1.171.912.728	1.015.310.000
2	0200	Jawa Barat	14.080.167.773	11.359.587.500
3	0300	Jawa Tengah	29.329.396.213	26.819.162.498
4	0400	DI. Yogyakarta	693.767.750	695.198.600
5	0500	Jawa Timur	24.737.003.718	32.461.242.040
6	0600	Aceh	19.369.503.764	10.734.606.117
7	0700	Sumatera Utara	5.294.975.350	8,688,635,450
8	0800	Sumatera Barat	18.485.065.494	12.888.287.479
9	0900	Riau	1.025.909.741	10.946.946.065
10	1000	Jambi	3.483.395.000	9.638.420.950
11	1100	Sumatera Selatan	9.492.680.600	6.638.130.594
12	1200	Lampung	6.903.491.100	8.024.426.350
13	1300	Kalimantan Barat	4.356.618.356	4.311.543.700
14	1400	Kalimantan Tengah	4.151.308.310	2.667.574.605
15	1500	Kalimantan Selatan	5.362.779.355	3.567.780.546

16	1600	Kalimantan Timur	2.308.595.300	1.407.491.475
17	1700	Sulawesi Utara	1.370.183.000	1.083.948.615
18	1800	Sulawesi Tengah	1.873.593.829	1.498.459.090
19	1900	Sulawesi Selatan	6.095.374.825	6.138.045.952
20	2000	Sulawesi Tenggara	1.573.106.441	1.135.900.500
21	2100	Maluku	6.336.159.570	3.376.567.900
22	2200	Bali	4.041.457.225	4.208.974.903
23	2300	NTB	7.315.088.375	6.292.797.851
24	2400	NTT	37.596.800	30.099.800
25	2500	Papua	887.082.300	754.072.000
26	2600	Bengkulu	8.363.806.699	5.716.602.171
27	2800	Maluku Utara	2.571.509.866	1.492.883.862
28	2900	Banten	1.997.611.200	7.002.765.020
29	3000	Bangka Belitung	1.697.605.992	1.417.088.900
30	3100	Gorontalo	2.165.890.705	1.358.607.120
31	3200	Kepulauan Riau	326.184.000	284.848.000
32	3300	Papua Barat	363.997.700	14.400.000
33	3400	Sulawesi Barat	200.611.200	203.162.400
JUMLAH			197.463.430.279	193.873.568.053

Rincian realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana BLU dapat dirinci sebagai berikut:

*Rincian Belanja
Kemenag Menurut
Sumber Dana BLU*

Tabel. 14
Rincian Belanja Kementerian Agama
Menurut Sumber Dana Badan Layanan Umum
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	107.405.032.571	93.196.355.870
2	0200	Jawa Barat	26.000.000.000	23.000.000.000
3	0300	Jawa Tengah	12.443.509.860	4.575.723.032
4	0400	DI. Yogyakarta	44.011.087.625	42.711.516.983
5	0500	Jawa Timur	54.813.353.215	27.197.805.777
6	0600	Aceh	14.167.514.180	-
7	0700	Sumatera Utara	-	4.368.972.700
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	38.308.687.099	13.426.598.160
10	1000	Jambi	13.757.069.337	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	2.584.130.331	-

13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	23.534.374.411	15.136.395.639
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	NTB	-	-
24	2400	NTT	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	7.917.186.975	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
JUMLAH			344.941.945.604	223.603.368.161

Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program

Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi, Subfungsi, dan Program

Realisasi Belanja Kementerian Agama juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, sub fungsi, dan program. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi terbagi dalam 5 (lima) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, serta fungsi kependudukan dan perlindungan Sosial. Rincian Belanja Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program Kementerian Agama dapat dilihat pada **lampiran 3**.

Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program terdiri dari Pelayanan Umum, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.

Realisasi Belanja menurut fungsi pendidikan, yaitu sebesar Rp24.591.470.495.097,- atau 90,36 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp27.214.880.446.237,-. Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut fungsi pelayanan umum sebesar Rp2.571.897.855.189,- atau 104,28 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp2.466.436.522.000,-. Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut fungsi Parawisata dan Budaya sebesar Rp700.000.000,- atau 100,00 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp700.000.000,-. Realisasi menurut

fungsi Agama adalah sebesar Rp880.838.246.238,- atau 93,40 dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp943.075.700.000,- dan realisasi menurut fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial adalah sebesar Rp2.240.322.456,- atau 96,57 persen dari anggaran yang dilaporkan sebesar Rp2.320.000.000,-.

Realisasi Belanja Kementerian Agama per fungsi pada TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel. 15
Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi
TA 2010 dan 2009

Kode	Uraian Fungsi	TA 2010	TA 2009
01	Pelayanan Umum	2.571.897.855.189	2.458.642.025.700
08	Pariwisata dan Budaya	700.000.000	697.500.000
09	Agama	880.838.246.238	774.040.522.035
10	Pendidikan	24.591.470.495.097	21.658.676.829.063
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	2.240.322.456	2.225.398.569
	Jumlah	28.047.146.918.980	24.894.282.275.367

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pelayanan Umum berdasarkan Unit Eselon 1 dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel. 16
Realisasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum (01)
Tahun Anggaran 2010 dan 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	192.346.295.268	243.531.625.228
2	02	Inspektorat Jenderal	36.523.631.845	36.360.291.841
3	03	Ditjen Bimas Islam	19.881.689.575	19.089.070.487
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	8.898.655.449	8.640.374.694
6	06	Ditjen Bimas Katolik	6.965.702.159	6.809.351.397
7	07	Ditjen Bimas Hindu	5.914.076.207	5.856.236.513
8	08	Ditjen Bimas Budha	3.949.171.232	3.981.562.072
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	15.506.879.736	13.686.337.567
10	11	Badan Litbang	45.199.998.236	8.423.099.960
		Wilayah		
1	100	DKI Jakarta	115.176.240.383	58.309.522.288
2	200	Jawa Barat	242.991.518.956	233.393.842.719
3	300	Jawa Tengah	227.629.428.125	220.303.222.349

*Rincian Belanja
Kementerian Agama
Menurut Fungsi
Pelayanan Umum*

4	400	DI. Yogyakarta	52.473.553.102	42.705.366.617
5	500	Jawa Timur	224.209.452.679	211.381.587.754
6	600	Aceh	120.062.539.889	148.135.768.587
7	700	Sumatera Utara	89.208.944.378	79.146.797.134
8	800	Sumatera Barat	81.685.496.920	67.584.906.741
9	900	Riau	50.441.250.767	47.353.247.781
10	1000	Jambi	49.817.054.186	49.439.553.300
11	1100	Sumatera Selatan	68.477.353.272	63.085.497.601
12	1200	Lampung	66.475.629.508	61.037.800.864
13	1300	Kalimantan Barat	52.156.097.383	48.154.479.409
14	1400	Kalimantan Tengah	29.825.225.323	28.198.124.300
15	1500	Kalimantan Selatan	51.804.582.817	47.292.855.427
16	1600	Kalimantan Timur	45.159.996.205	46.711.521.520
17	1700	Sulawesi Utara	36.851.996.992	36.359.267.291
18	1800	Sulawesi Tengah	34.242.359.815	32.957.121.991
19	1900	Sulawesi Selatan	111.216.363.223	96.028.604.077
20	2000	Sulawesi Tenggara	36.202.690.496	36.291.708.662
21	2100	Maluku	36.256.358.676	33.758.364.498
22	2200	Bali	34.782.863.480	33.707.434.270
23	2300	NTB	50.801.099.028	45.150.150.173
24	2400	NTT	49.582.430.874	64.275.882.723
25	2500	Papua	41.364.565.109	40.780.641.334
26	2600	Bengkulu	39.231.728.573	36.175.172.571
27	2800	Maluku Utara	25.370.138.407	22.870.156.004
28	2900	Banten	51.671.167.676	52.417.591.434
29	3000	Bangka Belitung	21.299.341.422	25.733.919.549
30	3100	Gorontalo	22.434.342.269	24.725.824.090
31	3200	Kepulauan Riau	22.628.879.791	23.300.570.000
32	3300	Papua Barat	27.750.841.121	32.670.650.367
33	3400	Sulawesi Barat	26.837.172.041	22.020.293.760
34	5000	Atase Haji	593.052.596	806.628.756
JUMLAH			2.571.897.855.189	2.458.642.025.700

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Parawisata dan Budaya hanya terdapat pada satuan kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI adalah sebagai berikut:

**Rincian Belanja
Kementerian Agama
Menurut Fungsi
Pariwisata dan Budaya
hanya pada Satker
Eselon 1 Sekjen**

Tabel. 17
Rincian Realisasi Anggaran Fungsi Pariwisata dan Budaya (08)
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
1	01	Sekretariat Jenderal	700.000.000	697.500.000
JUMLAH			700.000.000	697.500.000

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Agama berdasarkan Unit Eselon 1 dan Wilayah adalah sebagai berikut:

**Rincian Belanja
Kementerian Agama
Menurut Fungsi
Agama**

Tabel. 18
Realisasi Anggaran Fungsi Agama (09)
Tahun Anggaran 2010 dan 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	45.527.179.500	32.406.147.374
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	120.304.521.671	111.769.745.242
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	11.429.119.140	8.149.024.840
6	06	Ditjen Bimas Katolik	9.572.396.746	7.428.017.159
7	07	Ditjen Bimas Hindu	8.278.810.168	6.360.061.189
8	08	Ditjen Bimas Budha	6.352.681.703	4.824.898.350
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	154.158.916.820	128.598.853.986
10	11	Badan Litbang	14.895.510.583	16.299.078.500
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	17.491.644.068	16.456.309.728
2	0200	Jawa Barat	44.632.351.165	39.113.877.200
3	0300	Jawa Tengah	46.973.103.942	43.754.975.133
4	0400	DI. Yogyakarta	10.652.023.171	10.325.317.850
5	0500	Jawa Timur	48.252.295.349	44.714.865.845
6	0600	Aceh	22.869.671.330	21.680.322.885
7	0700	Sumatera Utara	19.033.998.397	17.376.679.300
8	0800	Sumatera Barat	14.973.164.710	13.732.902.936
9	0900	Riau	12.596.714.035	11.313.631.730
10	1000	Jambi	11.213.475.690	10.489.439.725
11	1100	Sumatera Selatan	14.376.780.650	12.561.826.686
12	1200	Lampung	11.857.729.010	9.937.190.050
13	1300	Kalimantan Barat	11.458.997.550	10.111.235.197
14	1400	Kalimantan Tengah	9.757.305.350	9.095.794.400

15	1500	Kalimantan Selatan	12.546.480.159	11.395.055.733
16	1600	Kalimantan Timur	10.889.541.517	10.536.508.560
17	1700	Sulawesi Utara	8.785.055.160	8.613.937.950
18	1800	Sulawesi Tengah	14.796.669.900	13.392.345.530
19	1900	Sulawesi Selatan	21.829.161.452	20.216.425.110
20	2000	Sulawesi Tenggara	12.164.862.732	11.225.758.166
21	2100	Maluku	9.358.947.800	7.503.150.900
22	2200	Bali	9.892.309.565	8.794.310.500
23	2300	NTB	11.041.455.700	9.534.502.844
24	2400	NTT	11.375.569.272	9.954.699.230
25	2500	Papua	10.963.534.950	9.503.411.273
26	2600	Bengkulu	12.070.306.675	9.050.055.000
27	2800	Maluku Utara	8.368.176.000	7.511.009.000
28	2900	Banten	19.873.897.832	17.694.440.301
29	3000	Bangka Belitung	8.185.486.803	6.848.763.300
30	3100	Gorontalo	7.918.772.050	6.275.703.110
31	3200	Kepulauan Riau	7.773.539.608	6.260.432.424
32	3300	Papua Barat	7.957.088.990	6.507.033.000
33	3400	Sulawesi Barat	7.503.811.091	5.888.304.070
34	5000	Atase Haji	885.188.234	834.480.729
JUMLAH			880.838.246.238	774.040.522.035

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Pendidikan berdasarkan Unit Eselon 1 dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel. 19
Realiasi Anggaran Fungsi Pendidikan (10)
Tahun Anggaran 2010 dan 2009

*Rincian Belanja
Kementerian Agama
Menurut Fungsi
Pendidikan*

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	60.908.831.097	62.784.164.863
2	02	Inspektorat Jenderal	53.471.703.213	48.411.343.759
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	2.139.998.398.685	1.285.825.705.230
5	05	Ditjen Bimas Kristen	99.013.503.800	78.238.879.225
6	06	Ditjen Bimas Katolik	72.312.170.073	53.029.800.244
7	07	Ditjen Bimas Hindu	56.396.636.818	46.104.206.848
8	08	Ditjen Bimas Budha	40.596.813.868	33.568.653.624
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	108.233.790.868	108.835.722.078
		Wilayah		

1	0100	DKI Jakarta	963.570.839.213	788.377.591.912
2	0200	Jawa Barat	2.856.950.724.611	2.782.606.674.547
3	0300	Jawa Tengah	2.687.721.869.349	2.542.144.779.362
4	0400	DI. Yogyakarta	495.698.635.777	412.734.935.445
5	0500	Jawa Timur	3.675.239.265.113	3.602.054.129.928
6	0600	Aceh	1.112.420.412.841	885.943.990.021
7	0700	Sumatera Utara	976.498.814.852	892.531.687.624
8	0800	Sumatera Barat	736.810.611.432	561.834.823.253
9	0900	Riau	513.303.150.003	458.825.471.549
10	1000	Jambi	448.837.662.346	474.029.075.358
11	1100	Sumatera Selatan	492.785.000.906	447.632.312.375
12	1200	Lampung	575.839.821.825	581.218.517.604
13	1300	Kalimantan Barat	309.962.470.501	267.841.020.014
14	1400	Kalimantan Tengah	310.928.224.196	271.868.518.525
15	1500	Kalimantan Selatan	638.586.220.497	518.619.907.939
16	1600	Kalimantan Timur	233.941.428.744	185.403.007.120
17	1700	Sulawesi Utara	183.739.456.945	129.840.569.872
18	1800	Sulawesi Tengah	285.309.285.998	237.764.677.817
19	1900	Sulawesi Selatan	1.066.820.267.223	911.176.504.250
20	2000	Sulawesi Tenggara	243.947.074.894	188.403.001.597
21	2100	Maluku	236.589.147.222	199.541.904.255
22	2200	Bali	248.430.919.058	208.425.533.011
23	2300	NTB	589.977.310.827	529.074.194.285
24	2400	NTT	223.273.627.600	186.219.063.364
25	2500	Papua	132.891.814.703	118.839.827.500
26	2600	Bengkulu	235.343.069.871	209.631.136.676
27	2800	Maluku Utara	157.338.138.159	127.829.488.083
28	2900	Banten	772.079.414.269	733.693.563.983
29	3000	Bangka Belitung	99.689.955.803	86.670.041.867
30	3100	Gorontalo	157.752.317.759	125.267.546.686
31	3200	Kepulauan Riau	89.793.833.450	78.523.349.645
32	3300	Papua Barat	87.880.217.392	85.960.928.677
33	3400	Sulawesi Barat	120.587.643.296	111.350.579.048
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			24.591.470.495.097	21.658.676.829.063

Rincian Realisasi Belanja Kementerian Agama Menurut Fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial berdasarkan Unit Eselon 1 dan Wilayah adalah sebagai berikut:

*Rincian Realisasi
Anggaran Menurut
Fungsi Kependudukan
dan Perlindungan
Sosial*

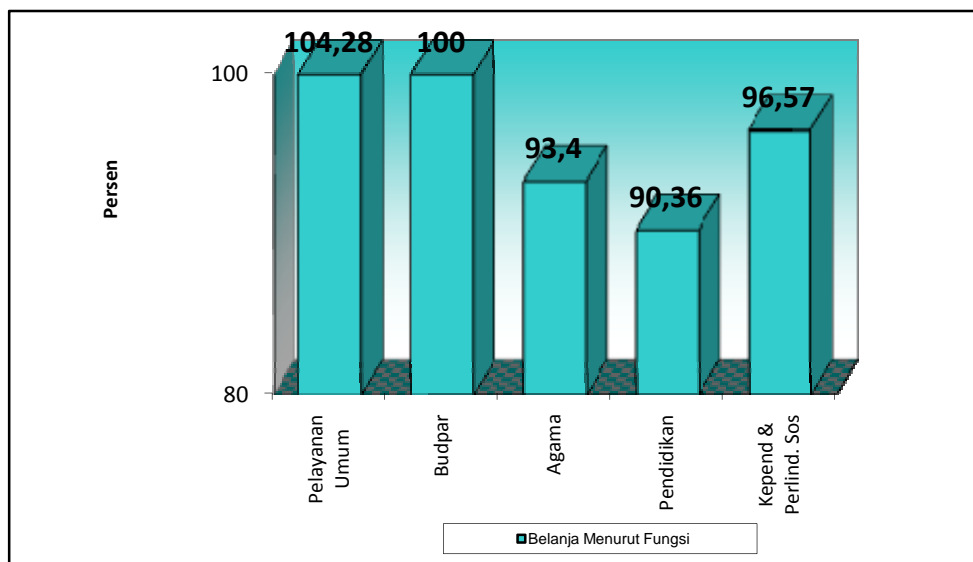
Tabel. 20
Realiasi Anggaran Fungsi Kependudukan Dan
Perlindungan Sosial (11)
Tahun Anggaran 2009 dan 2010

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	343.528.000	345.940.600
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	39.590.000	39.890.000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	38.150.000	34.450.000
5	05	Ditjen Bimas Kristen	40.000.000	36.693.000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	38.500.000	38.772.500
7	07	Ditjen Bimas Hindu	39.992.500	39.927.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	32.347.000	31.507.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	39.800.000	39.340.000
10	011	Badan Litbang	40.000.000	40.000.000
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	46.538.900	48.235.000
2	0200	Jawa Barat	50.000.000	50.000.000
3	0300	Jawa Tengah	49.900.000	49.400.500
4	0400	DI. Yogyakarta	50.000.000	50.000.000
5	0500	Jawa Timur	48.792.000	49.931.000
6	0600	Aceh	49.890.000	-
7	0700	Sumatera Utara	50.000.000	50.000.000
8	0800	Sumatera Barat	49.560.000	50.000.000
9	0900	Riau	48.370.000	50.000.000
10	1000	Jambi	49.415.056	49.715.000
11	1100	Sumatera Selatan	46.240.000	50.000.000
12	1200	Lampung	50.000.000	50.000.000
13	1300	Kalimantan Barat	50.000.000	50.000.000
14	1400	Kalimantan Tengah	50.000.000	47.960.000
15	1500	Kalimantan Selatan	50.000.000	50.000.000
16	1600	Kalimantan Timur	30.205.000	49.600.000
17	1700	Sulawesi Utara	46.295.000	49.910.000
18	1800	Sulawesi Tengah	50.000.000	50.000.000
19	1900	Sulawesi Selatan	50.000.000	49.300.000
20	2000	Sulawesi Tenggara	48.800.000	50.000.000
21	2100	Maluku	50.000.000	50.000.000

22	2200	Bali	50.000.000	49.540.000
23	2300	NTB	44.000.000	44.000.000
24	2400	NTT	50.000.000	44.201.969
25	2500	Papua	50.000.000	50.000.000
26	2600	Bengkulu	44.351.000	49.535.000
27	2800	Maluku Utara	50.000.000	50.000.000
28	2900	Banten	50.000.000	50.000.000
29	3000	Bangka Belitung	50.000.000	50.000.000
30	3100	Gorontalo	49.950.000	49.550.000
31	3200	Kepulauan Riau	37.808.000	48.000.000
32	3300	Papua Barat	50.000.000	50.000.000
33	3400	Sulawesi Barat	48.300.000	50.000.000
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			2.240.322.456	2.225.398.569

Fungsi Pendidikan merupakan nilai Realisasi Anggaran Terbesar Kementerian Agama

Besaran realisasi belanja tahun 2010 Rp28.047.146.918.980,- atau 91,58 persen dari total anggaran yang dilaporkan sebesar Rp30.627.412.668.237,- Alokasi terbesar adalah fungsi pendidikan yaitu sebesar Rp24.591.470.495.097,- atau 87,68 persen dari total realisasi belanja Kementerian Agama, Sedangkan fungsi agama dan keagamaan sebagai *core business* Kementerian Agama hanya sebesar Rp880.838.246.238,- atau 3,15 persen, Kondisi ini berakibat terhadap tidak maksimalnya pelayanan bidang agama dan keagamaan yang selalu menghadapi gejolak sosial di tengah masyarakat.



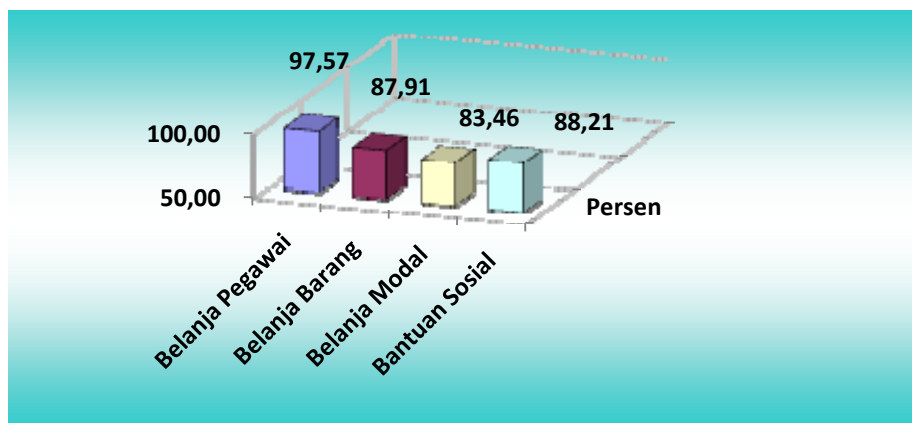
Grafik 5. Persentase Realisasi Belanja Kementerian Agama menurut Fungsi TA 2010

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Sub Fungsi dan Program dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

**Belanja Kemenag
Menurut Jenis Belanja**

Belanja Kementerian Agama Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Agama menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; dan (iv) Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Kementerian Agama menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 6.



Grafik 6. Persentase Realisasi Jenis Belanja Kementerian Agama TA 2010

**Belanja Pegawai
Rp12.563.581.888.876,-**

B.2.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 adalah sebesar Rp12.563.581.888.876,- berarti 97,57 persen dari pagu anggaran yang dilaporkan sebesar Rp12.876.967.889.000,- Sedangkan pada TA 2009 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp9,779,169,734,053,- atau 96,44 persen dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp10,139,673,541,000,- Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2010 naik 28,47 persen dari realisasi TA 2009, Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 21
Rincian Belanja Pegawai

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.144.328.812.934	9.343.521.477.038
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	2.309.000.000
Belanja Honorarium	200.965.379.437	238.120.796.258
Belanja Lembur	35.376.082.810	29.292.370.509
Belanja Vakasi	182.911.613.695	164.236.772.248
Belanja Tunj, Khusus dan belanja Transito	-	1.689.318.000
Jumlah	12.563.581.888.876	9.779.169.743.053

**Rincian Belanja
Pegawai per Eselon 1
dan Wilayah**

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per eselon 1 dan wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 22
Rincian Belanja Pegawai Per Eselon 1 dan Wilayah
TA 2010 dan TA 2009

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	37.746.369.954	32.054.935.746
2	02	Inspektorat Jenderal	14.330.382.243	12.573.321.671
3	03	Ditjen Bimas Islam	11.993.401.933	10.897.424.301
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	17.918.737.983	16.747.236.783
5	05	Ditjen Bimas Kristen	6.319.730.806	5.901.476.350
6	06	Ditjen Bimas Katolik	5.425.726.910	4.927.563.484
7	07	Ditjen Bimas Hindu	4.320.576.199	3.789.365.761
8	08	Ditjen Bimas Budha	2.398.551.245	2.157.648.867
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	11.230.182.105	9.797.292.832
10	11	Badan Litbang	16.107.468.689	14.516.589.755
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	521.620.295.996	367.698.523.109
2	0200	Jawa Barat	1.543.895.505.531	1.191.773.148.515
3	0300	Jawa Tengah	1.581.635.526.657	1.218.993.567.630
4	0400	DI. Yogyakarta	354.411.300.247	277.042.737.733
5	0500	Jawa Timur	1.672.013.901.141	1.376.562.805.710
6	0600	Aceh	796.852.928.476	625.642.995.391
7	0700	Sumatera Utara	551.306.863.562	452.234.856.371
8	0800	Sumatera Barat	504.856.233.118	358.300.965.292
9	0900	Riau	254.069.289.106	192.014.617.186
10	1000	Jambi	295.139.494.797	230.211.383.159
11	1100	Sumatera Selatan	286.295.645.085	240.408.487.941
12	1200	Lampung	314.362.975.153	259.923.323.534
13	1300	Kalimantan Barat	199.859.972.291	153.686.705.297
14	1400	Kalimantan Tengah	185.354.410.630	140.196.192.712
15	1500	Kalimantan Selatan	395.865.535.116	289.011.315.032
16	1600	Kalimantan Timur	164.095.124.755	119.191.551.686
17	1700	Sulawesi Utara	99.003.953.603	76.799.822.690
18	1800	Sulawesi Tengah	180.916.008.220	128.445.686.553
19	1900	Sulawesi Selatan	546.058.028.317	422.222.153.258
20	2000	Sulawesi Tenggara	171.673.103.221	127.337.575.887
21	2100	Maluku	141.429.723.368	113.542.077.200
22	2200	Bali	181.373.182.586	147.052.008.312
23	2300	NTB	277.324.130.746	214.246.931.252
24	2400	NTT	177.853.305.673	132.741.095.858
25	2500	Papua	85.115.706.746	69.907.118.753
26	2600	Bengkulu	165.645.530.630	134.473.375.979
27	2800	Maluku Utara	90.897.362.431	65.443.188.783
28	2900	Banten	368.639.192.850	297.633.202.671
29	3000	Bangka Belitung	55.844.336.645	44.741.664.908
30	3100	Gorontalo	90.768.757.063	66.137.930.170
31	3200	Kepulauan Riau	52.368.906.928	39.414.585.525
32	3300	Papua Barat	50.756.339.783	38.246.840.207
33	3400	Sulawesi Barat	78.488.190.338	54.528.444.199
JUMLAH			12.563.581.888.876	9.779.169.743.053

Belanja Barang

Rp4.594.721.341.928,-

B.2.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2010 adalah sebesar Rp4.594.721.341.928,- yang berarti 87,91 persen dari pagu anggaran sebesar Rp5.226.849.026.000,- Sedangkan realisasi Belanja Barang TA 2009

sebesar Rp3,293,042,741,552,- atau 86,98 persen dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp3,786,040,939,000,- Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2010 lebih besar atau naik sebesar 39,53 persen dari Realisasi TA 2009. Realisasi Belanja Barang terdiri dari realisasi belanja barang non BLU dan BLU.

Rincian Realisasi Belanja Barang Non BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 23
Realisasi Belanja Barang Non BLU

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Barang Operasional	886.208.097.111	1.053.440.823.445
Belanja Barang Non Operasional	1.906.680.677.262	785.761.693.992
Belanja Jasa	274.215.164.628	217.160.857.051
Pemeliharaan	231.233.177.900	256.852.803.475
Perjalanan Dinas DN	926.796.661.467	719.345.980.270
Perjalanan Dinas LN	72.915.774.980	71.239.019.630
Jumlah	4.298.049.553.348	3.103.801.177.863

Rincian Realisasi Belanja Barang non BLU per eselon 1 dan wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 24
Rincian Belanja Barang Non BLU Per Eselon 1 dan Wilayah
Tahun 2010 dan 2009

*Rincian Belanja
Barang per Eselon 1
dan Wilayah*

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	172.016.795.750	47.261.256.769
2	02	Inspektorat Jenderal	60.967.847.516	61.564.138.157
3	03	Ditjen Bimas Islam	78.110.418.313	72.401.476.178
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	411.521.533.088	283.675.518.098
5	05	Ditjen Bimas Kristen	69.627.372.483	37.442.338.509
6	06	Ditjen Bimas Katolik	34.271.174.513	28.916.485.466
7	07	Ditjen Bimas Hindu	32.786.299.494	23.958.042.080
8	08	Ditjen Bimas Budha	26.888.062.558	23.492.875.179
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	118.114.694.399	106.296.387.828
10	11	Badan Litbang	139.224.832.788	136.967.863.322
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	156.131.026.627	147.143.620.079
2	0200	Jawa Barat	252.842.688.364	173.733.882.130
3	0300	Jawa Tengah	304.785.667.896	190.919.603.109

4	0400	DI, Yogyakarta	55.577.359.843	75.528.319.729
5	0500	Jawa Timur	371.306.546.834	263.466.079.312
6	0600	Aceh	175.113.449.307	87.058.123.309
7	0700	Sumatera Utara	164.922.105.688	53.306.431.807
8	0800	Sumatera Barat	147.137.523.658	99.056.195.262
9	0900	Riau	71.004.295.008	73.080.516.992
10	1000	Jambi	66.941.331.051	52.424.107.182
11	1100	Sumatera Selatan	102.597.459.283	40.127.890.590
12	1200	Lampung	70.249.566.020	58.579.007.428
13	1300	Kalimantan Barat	56.890.321.343	42.676.805.617
14	1400	Kalimantan Tengah	62.275.644.072	28.940.887.734
15	1500	Kalimantan Selatan	104.397.939.006	67.359.256.602
16	1600	Kalimantan Timur	46.528.779.589	34.934.133.255
17	1700	Sulawesi Utara	56.993.944.554	46.540.469.147
18	1800	Sulawesi Tengah	47.749.469.510	38.520.185.058
19	1900	Sulawesi Selatan	160.068.088.248	125.091.454.951
20	2000	Sulawesi Tenggara	44.981.736.391	31.117.098.488
21	2100	Maluku	71.116.710.877	51.425.190.237
22	2200	Bali	62.656.046.404	49.370.947.299
23	2300	NTB	63.358.771.255	51.900.566.659
24	2400	NTT	56.943.699.191	17.438.808.907
25	2500	Papua	50.368.539.736	39.426.186.929
26	2600	Bengkulu	47.172.688.348	34.000.155.544
27	2800	Maluku Utara	39.530.557.785	32.404.820.054
28	2900	Banten	75.811.314.951	39.576.481.647
29	3000	Bangka Belitung	29.852.177.185	26.359.430.033
30	3100	Gorontalo	47.485.852.891	34.261.302.266
31	3200	Kepulauan Riau	28.447.450.558	21.414.819.357
32	3300	Papua Barat	35.085.825.860	29.458.221.832
33	3400	Sulawesi Barat	26.828.233.239	23.813.087.284
34	5000	Atase Haji	1.367.711.874	1.370.710.448
JUMLAH			4.298.049.553.348	3.103.801.177.863

Belanja Barang BLU sebesar 296.671.788.580,- terdiri dari:

Tabel. 25
Realisasi Belanja Barang BLU

**Realisasi Belanja
Barang BLU**

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	123.237.107.666	75.738.076.799
Belanja Barang	54.720.803.406	33.844.130.631
Belanja Jasa	10.893.460.939	8.121.267.551
Belanja Pemeliharaan	9.200.170.214	6.419.527.282

Belanja Perjalanan	20.619.545.210	8.226.642.288
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya	78.000.701.145	56.891.919.138
Jumlah	296.671.788.580	189.241.563.689

Rincian Belanja Barang per satker BLU dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 26
Rincian Realisasi Belanja Barang per Satker BLU

*Rincian Realisasi
Belanja Barang per
Satker BLU*

NO	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
	Pusat		
1	UIN Syarif Hidayatullah	87.568.219.945	77.748.900.566
2	UIN Sunan Gunung Djati	25.413.688.450	21.257.317.365
3	IAIN Walisongo Semarang	10.604.433.260	2.967.104.732
4	UIN Sunan Kalijaga	38.197.359.315	35.495.426.783
5	IAIN Sunan Ampel	17.858.526.226	-
6	UIN Malang	30.320.652.869	19.750.464.965
7	IAIN Sumut	13.619.419.380	4.266.500.909
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	30.568.021.081	12.719.412.710
9	UIN Alauddin	22.770.458.411	15.036.435.639
10	IAIN Sultan Thaha	10.548.197.337	-
11	IAIN SMH Banten	6.618.681.975	-
12	IAIN Raden Intan Lampung	2.584.130.331	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
	JUMLAH	296.671.788.580	189.241.563.689

B.2.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp2.771.539.888.423,-*

Realisasi Belanja Modal TA 2010 adalah sebesar Rp2.771.539.888.423 ,- yang berarti 83,46 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.320.937.240.237,- Sedangkan realisasi Belanja Modal TA 2009 sebesar Rp1,982,883,698,681,- atau 79,44 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,496,099,949,000,- Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2010 mengalami kenaikan sebesar 39,77 persen dari Realisasi TA 2009, Realisasi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Non BLU dan BLU, Total Belanja Modal Non BLU adalah 2.723.269.731.399,- dan Belanja Modal BLU 48.270.157.024,- Rincian realisasi Belanja Modal Non BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 27
Realisasi Belanja Modal Non BLU

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Modal Tanah	259.777.782.214	227.003.713.198
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.109.045.207	375.981.834.631
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.885.676.052.072	1.223.618.173.750
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.678.157.350	17.788.010.602
Belanja Pemeliharaan	-	0

dikapitalisasi Modal Fisik Lainnya	56.028.694.556	104.130.162.028
Jumlah	2.723.269.731.399	1.948.521.894.209

Rincian Realisasi Belanja Modal Non BLU per eselon 1 dan wilayah dapat dilihat pada tabel 27 (dalam Rp):

*Rincian Belanja Modal
Non BLU per Eselon 1
dan Wilayah*

Tabel. 28
Rincian Belanja Modal Non BLU Per Eselon 1 dan Wilayah

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	52.642.918.161	121.600.026.442
2	02	Inspektorat Jenderal	14.697.105.299	10.634.175.772
3	03	Ditjen Bimas Islam	3.619.954.800	4.203.748.250
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	4.391.128.250	16.698.362.190
5	05	Ditjen Bimas Kristen	355.175.100	889.157.500
6	06	Ditjen Bimas Katolik	770.367.555	194.293.000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	840.412.000	1.225.757.500
8	08	Ditjen Bimas Budha	5.000.000	378.347.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	40.360.720.052	26.230.850.893
10	11	Badan Litbang	10.516.998.210	11.131.543.205
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	175.808.824.460	120.989.831.016
2	0200	Jawa Barat	239.976.780.137	224.871.421.186
3	0300	Jawa Tengah	194.260.854.923	113.632.266.805
4	0400	D.I.Yogyakarta	46.849.175.935	35.175.605.750
5	0500	Jawa Timur	459.729.793.436	171.627.212.963
6	0600	Aceh	156.512.604.777	113.869.286.230
7	0700	Sumatera Utara	60.092.022.947	45.805.988.830
8	0800	Sumatera Barat	93.478.678.286	54.301.091.376
9	0900	Riau	46.793.706.992	87.193.233.612
10	1000	Jambi	59.113.827.593	48.311.442.042
11	1100	Sumatera Selatan	65.327.674.960	33.833.055.314
12	1200	Lampung	51.515.316.039	36.645.851.256
13	1300	Kalimantan Barat	34.856.066.800	23.189.872.706
14	1400	Kalimantan Tengah	51.470.954.167	35.303.058.779
15	1500	Kalimantan Selatan	80.004.782.106	20.270.812.365
16	1600	Kalimantan Timur	34.162.609.122	16.677.904.759
17	1700	Sulawesi Utara	49.413.577.740	26.377.370.186
18	1800	Sulawesi Tengah	48.086.773.783	32.385.602.977
19	1900	Sulawesi Selatan	278.728.469.118	214.015.454.043
20	2000	Sulawesi Tenggara	32.007.293.260	26.917.223.090

21	2100	Maluku	42.566.711.053	27.874.997.216
22	2200	Bali	21.680.219.613	20.384.857.170
23	2300	NTB	48.118.776.104	45.387.602.891
24	2400	NTT	14.929.219.132	10.101.922.753
25	2500	Papua	24.278.550.280	25.106.962.125
26	2600	Bengkulu	41.561.155.706	40.774.147.224
27	2800	Maluku Utara	19.226.094.000	14.284.647.000
28	2900	Banten	48.730.465.951	27.184.929.650
29	3000	Bangka Belitung	14.796.469.298	14.421.036.025
30	3100	Gorontalo	23.614.544.624	19.200.674.013
31	3200	Kepulauan Riau	11.429.403.863	6.980.728.098
32	3300	Papua Barat	15.568.538.860	16.549.886.075
33	3400	Sulawesi Barat	10.269.487.951	5.419.257.895
34	5000	Atase Haji	110.528.956	270.399.037
JUMLAH			2.723.269.731.399	1.948.521.894.209

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Tabel. 29
Realisasi Belanja Modal BLU

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Modal Tanah	5.316.678.000	2.539.466.850
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.170.440.861	20.141.312.638
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.361.084.860	10.579.454.420
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.268.000	10.773.400
Belanja Modal Fisik Lainnya	8.330.685.303	1.090.797.164
Total	48.270.157.024	34.361.804.472

Rincian Belanja Modal per satker BLU dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 30
Rincian Realisasi Belanja Modal per Satker BLU

*Rincian Realisasi
Belanja Modal per
Satker BLU*

NO	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	19.836.812.626	15.402.931.095
2	UIN Sunan Gunung Djati	586.311.550	1.742.682.635
3	IAIN Walisongo Semarang	1.839.076.600	1.608.618.300
4	UIN Sunan Kalijaga	5.813.728.310	7.216.090.200
5	IAIN Sunan Ampel	2.880.390.350	-
6	UIN Malang	3.753.783.770	7.447.340.792
7	IAIN Sumut	548.094.800	136.996.000
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	7.740.666.018	707.185.450
9	UIN Alauddin	763.916.000	99.960.000
10	IAIN Sultan Thaha	3.208.872.000	-
11	IAIN SMH Banten	1.298.505.000	-

12	IAIN Raden Intan Lampung	-	-
13	IAIN Raden Fatah Palembang	-	-
JUMLAH		48.270.157.024	34.361.804.472

Belanja Bantuan Sosial
Rp8.117.303.799.753,-

B.2.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 adalah sebesar Rp8.117.303.799.753 ,- atau 88,21 persen dari pagu anggaran sebesar Rp9.202.658.513.000 ,- Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2009 sebesar Rp9,839,186,101,081,- atau 91,42 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,762,877,436,000,-, Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 mengalami penurunan sebesar (17,50) persen dari Realisasi TA 2009. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 31

Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	6.148.987.500	8.259.527.500
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	7.880.088.270.553	9.624.439.460.081
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	79.943.902.400	69.281.835.000
Belanja Bantuan Sosial Lainnya	151.122.639.300	137.205.278.500
Jumlah	8.117.303.799.753	9.839.186.101.081

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial per eselon 1 dan wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 32

Rincian Belanja Bantuan Sosial Per Eselon 1 dan Wilayah

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	37.419.750.000	38.849.159.108
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	46.502.026.200	43.396.057.000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	1.706.205.149.364	968.739.038.159
5	05	Ditjen Bimas Kristen	43.079.000.000	50.832.000.000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	48.421.500.000	33.267.599.350
7	07	Ditjen Bimas Hindu	32.682.228.000	29.387.500.000
8	08	Ditjen Bimas Budha	21.639.400.000	16.377.750.000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	2.520.000.000	9.469.985.000
		Wilayah		

1	0100	DKI Jakarta	135.320.082.910	184.992.753.629
2	0200	Jawa Barat	1.081.909.620.700	1.463.043.260.000
3	0300	Jawa Tengah	869.248.742.080	1.281.098.321.500
4	0400	DI.Yogyakarta	58.025.288.400	70.852.866.500
5	0500	Jawa Timur	1.389.886.210.515	2.039.097.075.750
6	0600	Aceh	126.923.531.500	229.189.676.500
7	0700	Sumatera Utara	294.303.251.250	391.989.863.750
8	0800	Sumatera Barat	88.046.398.000	131.544.381.000
9	0900	Riau	166.213.506.600	190.420.247.135
10	1000	Jambi	74.965.884.500	203.060.851.000
11	1100	Sumatera Selatan	121.464.595.500	183.298.269.650
12	1200	Lampung	215.511.192.800	297.095.326.300
13	1300	Kalimantan Barat	82.021.205.000	106.603.351.000
14	1400	Kalimantan Tengah	51.459.746.000	84.770.258.000
15	1500	Kalimantan Selatan	122.719.027.245	200.716.435.100
16	1600	Kalimantan Timur	45.234.658.000	71.897.047.500
17	1700	Sulawesi Utara	24.011.328.200	25.146.023.090
18	1800	Sulawesi Tengah	57.646.064.200	84.812.670.750
19	1900	Sulawesi Selatan	191.526.831.804	251.005.375.550
20	2000	Sulawesi Tenggara	43.701.295.250	50.598.570.960
21	2100	Maluku	27.141.308.400	48.011.155.000
22	2200	Bali	27.446.643.500	34.169.005.000
23	2300	NTB	263.062.187.450	272.267.746.500
24	2400	NTT	34.555.403.750	55.180.509.750
25	2500	Papua	25.507.118.000	34.733.612.300
26	2600	Bengkulu	32.310.081.435	45.658.220.500
27	2800	Maluku Utara	41.472.438.350	45.414.465.250
28	2900	Banten	342.576.319.050	414.460.981.750
29	3000	Bangka Belitung	28.731.800.900	28.780.593.750
30	3100	Gorontalo	26.286.227.500	31.718.717.500
31	3200	Kepulauan Riau	27.988.299.500	28.744.573.000
32	3300	Papua Barat	22.227.443.000	22.936.420.000
33	3400	Sulawesi Barat	39.391.014.900	45.558.387.500
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			8.117.303.799.753	9.839.186.101.081

Berdasarkan temuan BPK RI terdapat kesalahan penganggaran terhadap belanja Kementerian Agama, antara lain:

- a. Terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp8.591.622.504,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja modal;

- b. Terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp807.399.500,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja barang;
- c. Terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp22.400.360.000,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja bantuan sosial;
- d. Terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1.825.500.000,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja barang;
- e. Terdapat realisasi belanja pegawai sebesar Rp4.823.000.000,- yang seharusnya direalisasikan dari belanja bantuan sosial;
- f. Terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp2.507.000.000,- yang diberikan kepada satuan kerja Kementerian Agama atau kepada unit kerja di lingkungan satuan kerja pemberi bantuan.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. Laporan Belanja Secara Akrual

Berdasarkan Laporan Belanja secara akrual terdapat penambahan belanja pegawai sebesar Rp286.637.203.406,- sehingga total Belanja Pegawai sebesar Rp12.850.219.092.282,- dan penambahan Belanja Barang sebesar Rp7.604.010.247,- sehingga total Rp4.602.325.352.175,- Rincian tambahan belanja secara akrual disajikan dalam lampiran 4 dan 5.

B.3.2. Perbedaan Realisasi Belanja antara data SAI dengan SAU

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan BPK RI pada tanggal 2 Mei 2011, terdapat selisih realisasi belanja antara data SAI dengan SAU sebesar Rp369.300,-. Realisasi belanja sebesar Rp369.300,- adalah realisasi belanja dari satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Realisasi belanja tersebut sebenarnya sudah diinput ke dalam database aplikasi SAKPA berdasarkan dokumen sumber no.284334P tanggal 3 September 2010, akan tetapi tidak muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

CaLK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 Desember dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 33
Neraca Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Aset Lancar	201.270.414.739	198.014.054.789
Aset Tetap	26.224.039.992.097	22.014.388.679.125
Aset Lainnya	2.681.985.476.072	1.575.365.960.712
Jumlah Aset	29.107.295.882.908	23.787.768.694.626
Kewajiban Jangka Pendek	353.360.764.574	75.330.675.020
Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Jumlah Kewajiban	353.360.764.574	75.330.675.020
Ekuitas Dana Lancar	(152.090.349.835)	122.683.379.769
Ekuitas Dana Investasi	28.906.025.468.169	23.589.754.639.837
Jumlah Ekuitas Dana	28.753.935.118.334	23.712.438.019.607
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	29.107.295.882.908	23.787.768.694.626

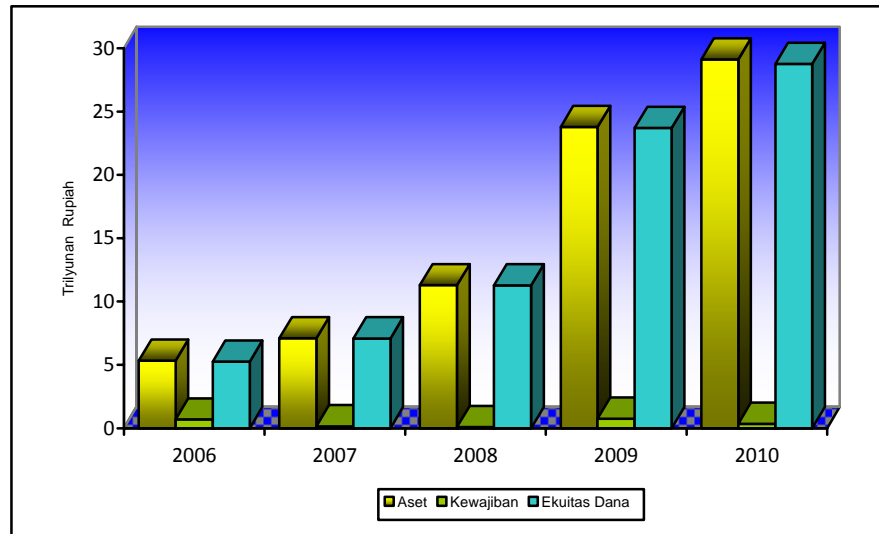
Saldo Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp29.107.295.882.908,-, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp201.270.414.739,-, Aset Tetap sebesar Rp26.224.039.992.097,- dan Aset Lainnya sebesar Rp2.681.985.476.072,-.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp353.360.764.574,- merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp353.360.764.574,-.

Saldo ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp28.753.935.118.334,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp(152.090.349.835)- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp28.906.025.468.169,-.

Peningkatan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam perbandingan pada Grafik 7.

Perkembangan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 7: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca Tahun 2006-2010

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp9.723.647.912,-

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp9.723.647.912,- dan Rp2.922.817.411,- merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Akan tetapi sisa UP dimaksud sudah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2011 sehingga saldo kas bendahara pengeluaran pada bulan Januari tahun 2011 sudah nihil. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 6.1**.

Berdasarkan temuan BPK RI, terjadi peristiwa kehilangan kas sebesar Rp208.400.050,- yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 11 Februari 2011. Atas peristiwa kehilangan kas tersebut telah dilaporkan oleh bendahara pengeluaran kepada POLRES Sidoarjo dengan surat tanda bukti lapor/pengaduan nomor STBL/57/II/2011/JATIM/RES.SDA tanggal 11 Februari 2011.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp2.931.949.230,-

C.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.931.949.230,- dan Rp5.445.111.193,- mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada UAPPA-E1 dan UAPPA-W dapat dilihat pada **Lampiran 6.2**

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp10.915.757.698,-

C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp10.915.757.698,- dan Rp17.479.584.537,- mencakup bunga dan jasa giro yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 yang belum menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP), pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung pada rekening Bendahara Pengeluaran, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum dibagikan kepada pihak lain

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada pada UAPPA-E1 dan UAPPA-W dapat dilihat pada **Lampiran 6.3**

Kas pada BLU
Rp 132.236.879.094,-

C.2.4. Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp132.236.879.094,- dan Rp104.273.729.179,- merupakan saldo kas pada BLU dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 35 (dalam Rp):

Tabel. 34
 Saldo Kas Pada BLU per 31 Desember 2010 dan 2009

BLU pada UAKPA		31 Desember 2010	31 Desember 2009
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	33.621.441.942	37.247.808.727
2	UIN Gunung Djati Bandung	9.161.588.899	14.605.701.864
3	IAIN Walisongo Semarang	6.210.767.302	1.950.185.539
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	26.083.384.687	18.316.199.250
5	IAIN Sunan Ampel	9.267.474.685	0
6	UIN Malang	7.340.640.144	6.359.878.836
7	IAIN Sumatera Utara	2.591.894.308	2.213.995.750
8	UIN Alauddin Makassar	14.777.513.560	12.933.483.438
9	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	15.457.592.876	10.646.475.775
10	IAIN SMH Banten	3.286.171.400	0
11	IAIN Raden Intan Lampung	2.625.111.246	0
12	IAIN Sultan Thaha Jambi	1.508.967.407	0
13	IAIN Raden Fatah Palembang	304.330.638	0
Jumlah		132.236.879.094	104.273.729.179

Saldo akhir tahun 2009 akun kas pada BLU di UIN Alauddin Makassar menurut LKKA adalah sebesar Rp12.933.483.438 sedangkan saldo akhir tahun 2009 menurut satker adalah Rp8.296.000.091 terdapat selisih sebesar Rp4.637.483.347 disebabkan karena terjadi dua kali koreksi tambah atas temuan BPK tahun 2009.

Saldo akhir tahun 2009 kas pada BLU di UIN Sunan Gunung Djati adalah sebesar Rp14.605.701.864, pendapatan BLU tahun 2010 Rp27.786.316.675, dan belanja BLU tahun 2010 Rp26.000.000.000, sehingga saldo kas pada BLU per 31 Desember 2010 seharusnya Rp16.392.018.539, akan tetapi saldo yang dilaporkan di LKKA 2010 adalah Rp9.161.588.899, terdapat selisih Rp7.230.429.640. Selisih ini terjadi karena adanya jurnal koreksi terhadap pendapatan yang telah

disetor ke Kas Negara pada tahun 2008, dimana UIN Sunan Gunung Djati sudah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Atas penyetoran pendapatan di atas telah dikembalikan ke UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2009, akan tetapi baru dilakukan jurnal koreksi pada tanggal 31 Maret 2010. Rincian Kas pada BLU per UAPPA-W disajikan pada **Lampiran 6.4**.

Berdasarkan penjelasan pada CaLK LRA bahwa untuk satker IAIN Raden Fatah Palembang belum melaporkan pendapatan BLU karena satker tersebut baru melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada tahun 2011, akan tetapi di neraca satker tersebut sudah disajikan Kas pada BLU karena didasarkan usulan jurnal koreksi BPK RI. Selain itu, berdasarkan temuan BPK RI terdapat selisih saldo kas antara yang disajikan di neraca dengan saldo fisik kas, yaitu pada satker UIN Malang sebesar Rp1.674.784.650,- dan IAIN Sumut sebesar Rp377.444.140,-.

Selain Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas Pada BLU, Juga terdapat saldo kas pada rekening penampung yang berfungsi sebagai penyaluran dana BOS untuk MI dan MTs swasta serta untuk PPS ULA dan PPS Wustha. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 35
Saldo Kas Pada Rekening Penampung BOS 2010

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo
1.	00000354-01-000697-30-3	Tim Manajemen BOS Depag Tingkat Prov insi Jawa Barat	42.615.750,00
2.	00000325-01-000415-30-8	Tim Manajemen BOS Depag Prov insi Jawa Tengah	78.624.993,67
3.	00000642-01-000354-30-6	Tim Manajemen BOS Provinsi Sulsel	1.290.259,90

**Piutang Bukan Pajak
Rp1.616.400.187,-**

C.2.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.616.400.187,- dan Rp2.545.487.375,-. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Piutang Bukan Pajak tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Tabel. 36
Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBK pada UAPPA-W	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1. Sekretariat Jenderal	7.065.430	0
2. Kanwil DKI Jakarta	3.095.166	0
3. Kanwil Jawa Tengah	598.900.000	0
4. Kanwil Jawa Timur	2.000.000	62.929.408
5. Kanwil Aceh	2.790.000	292.153.501
6. Kanwil Sumatera Utara	50.557.600	0
7. Kanwil Jambi	504.470.000	325.800.000
8. Kanwil Sumatera Selatan	727.056	16.334.397
9. Kanwil Lampung	156.400.000	0

10. Kanwil Bali	227.340.000	0
11. Kanwil Nusa Tenggara Barat	21.417.874	0
12. Kanwil Banten	41.637.061	0
Jumlah	1.616.400.187	2.545.487.375

Jenis piutang PNBPN, antara lain berupa piutang terhadap sewa ruang, piutang dari wisma Tugu dan PIH Batam, dan Piutang atas SPP Mahasiswa. Rincian Piutang PNBPN disajikan pada **Lampiran 6.5**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan TGR Rp3.000.000,-

C.2.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.000.000,- dan Rp3.541.350,- merupakan saldo Tagihan TGR Kementerian Agama yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan pada **Lampiran 6.6**

Uang Muka Belanja Rp3.666.667.259,-

C.2.7. Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp3.666.667.259,- dan Rp 0,-. Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran Kementerian Agama yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Kementerian Agama. Uang Muka Belanja Barang.

Saldo Uang Muka Belanja pada tahun 2009 sebesar Rp 0,- karena pada tahun 2009 transaksi akrual belum disajikan dalam aplikasi SAK, hanya disajikan sebagai lampiran informasi pendapatan dan belanja akrual. Rincian Uang Muka Belanja disajikan pada **Lampiran 6.7**

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp2.640.363.334,-

C.2.8. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.640.363.334,- dan Rp1.340.899.294,-. Rincian Piutang dari kegiatan operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 37.

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada UAKPA	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1.UIN Syarif Hidayatullah	1.124.766.256	0
2.UIN Sunan Gunung Djati	1.456.250.000	0
3.UIN Sunan Kalijaga	33.749.858	0
4.UIN Alauddin	25.597.220	0
Jumlah	2.640.363.334	0

Jenis dari Piutang Kegiatan Operasional BLU, antara lain berupa Piutang SPP Mahasiswa, Piutang pemanfaatan sewa lahan, dan

piutang jasa giro. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan pada **Lampiran 6.8.**

*Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU
Rp253.340.069, -*

C.2.9. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp253.340.069,- dan Rp 0,-, merupakan saldo piutang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasal dari penyajian akrual yang berasal dari piutang atas sewa rumah dinas.

*Investasi dalam
Deposito
Rp0, -*

C.2.10. Investasi dalam Deposito

Saldo Investasi dalam deposito per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp0,- dan Rp8.770.000.000,-.

*Persediaan
Rp29.644.935.134, -*

C.2.11. Persediaan

C.2.11.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp29.644.935.134,- dan Rp54.898.054.971,- merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca UAPPA-W dan UAPPA-E1.

Rincian Persediaan pada masing-masing UAPPA-W dan UAPPA-E1 dapat dilihat pada **Lampiran 6.9**

*Persediaan BLU
Rp7.637.474.822, -*

C.2.11.2. Persediaan Badan Layanan Umum

Saldo Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp7.637.474.822,- dan Rp334.829.479,-, dibandingkan dengan tahun 2009 persediaan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp7.302.645.343 atau 2181%. Hal ini terjadi karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2010, telah dilakukan koreksi atas penyajian persediaan di neraca untuk satker-satker BLU di Kementerian Agama. Persediaan di satker-satker BLU semula masih disajikan dengan menggunakan akun persediaan pada satker biasa yaitu dengan menggunakan kode akun 1151 kemudian dikoreksi menggunakan akun Persediaan BLU yaitu dengan kode akun 1152, sehingga persediaan untuk 13 satker BLU yang ada di Kementerian Agama sudah disajikan dengan akun persediaan BLU semua. Rincian Persediaan BLU disajikan pada **Lampiran 6.10**

*Aset Tetap
Rp26.224.039.992.097, -*

C.2.12. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp26.224.039.992.097,- dan Rp22.014.388.679.125,-. Saldo aset tetap per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp4.209.651.312.972 dari saldo aset tetap per 31 Desember 2009. Aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2010 terdiri dari dua klasifikasi akun yaitu Aset tetap pada satker biasa

Rp19.798.741.862.947,- dan Aset tetap pada satker BLU Rp6.425.298.129.150,-. Penyajian aset tetap pada neraca Kementerian Agama belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Komponen aset tetap Kementerian Agama terdiri dari :

Tabel 38.
Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	10.210.855.340.261	9.252.934.362.442	957.920.977.819
Peralatan dan Mesin	2.908.545.963.990	2.238.968.777.490	669.577.186.500
Gedung dan Bangunan	11.232.120.839.301	9.099.538.082.109	2.132.582.757.192
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	176.425.233.041	108.691.487.210	67.733.745.831
Aset Tetap Lainnya	411.920.905.589	372.402.618.782	39.518.286.807
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.284.171.709.915	941.853.351.092	342.318.358.823
Jumlah	26.224.039.992.097	22.014.388.679.125	4.209.651.312.972

Kenaikan nilai aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.209.651.312.972, diantaranya berasal dari belanja modal sebesar Rp2.771.539.888.423,-, penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan koreksi dari KPKNL (IP), serta penambahan aset tetap yang berasal dari transaksi tambah kurang pada SIMAK BMN.

Sampai dengan tahun 2010, Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Keuangan telah melakukan IP terhadap 4.045 satker. Dalam rangka melakukan monitoring atas hasil IP yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN telah dilakukan rekonsiliasi antara data hasil IP menurut DJKN dengan hasil IP yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN, yaitu:

1. Pada tahun 2009, hasil IP terhadap 4.019 satker menurut data DJKN sebesar Rp6.784.876.201.828,-, sedangkan yang telah diinput ke dalam SIMAK BMN melalui transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp6.603.894.333.660,- yang berasal dari tahun 2008 sebesar Rp2.110.213.856.959,- dan tahun 2009 sebesar Rp4.493.680.476.701,-. Sehingga masih terdapat selisih nilai koreksi aset tetap antara data DJKN dengan yang telah diinput dalam LBMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp180.981.868.168,-.
2. Pada tanggal 27 Mei 2010 diadakan rekonsiliasi IP di Gedung BPK antara DJKN dan Kementerian Agama. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, nilai koreksi Kementerian Agama mengalami kenaikan dari nilai semula sebesar Rp6.784.876.201.828,- menjadi Rp15.815.538.465.109,-
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat hasil IP satker di luar Kementerian Agama masuk ke dalam hasil IP Kementerian Agama, yaitu:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KOREKSI IP
1.	KPKNL Singkawang		
	532039	Pengadilan Agama Bengkayang	719.013.000
2.	KPKNL Bogor		
	189772	Institut Pertanian Bogor	1.477.719.716.548
	532860	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pertanian	47.838.576.321
	580836	Pusat Studi Regional Penelitian Biotrop (Searneo Biotrop)	15.605.837.848
3.	KPKNL Makassar		
		Embarkasi Haji Makasar	45.687.605.833
TOTAL			1.587.570.749.550

Berdasarkan data di atas, hasil IP Kementerian Agama dikoreksi sebesar Rp1.587.570.749.550,- menjadi Rp14.227.967.715.559,-. Selain itu, terdapat koreksi di Provinsi Aceh, yaitu pada satker MIN Kutacane dan MAN Matangkuli yang tidak wajar sebesar Rp5.102.871.716.000 sehingga hasil IP dikoreksi dari semula sebesar Rp14.227.967.715.559,- menjadi sebesar Rp9.125.095.999.559,-.

Dari nilai koreksi tersebut, terdapat perbaikan data dari KPKNL (LP-01) sebesar Rp2.245.516.500, sehingga nilai koreksi bertambah menjadi Rp9.127.341.516.059. Dari total hasil IP sebesar Rp9.127.341.516.059, yang sudah diinput ke dalam SIMAK BMN melalui transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp5.772.321.272.238 sehingga masih terdapat selisih koreksi sebesar Rp3.355.020.243.821.

- Pada tanggal 5 April 2011 diadakan rekonsiliasi dengan DJKN, IP Kementerian Agama menjadi Rp7.292.316.240.156,-. Dari angka tersebut terdapat aset satker embarkasi haji sebesar Rp45.687.605.833,- sehingga koreksi hasil IP menjadi Rp7.246.628.634.323,-. Dari hasil IP tersebut yang sudah diinput ke dalam SIMAK BMN berdasarkan formulir isian hasil IP yang telah dimasukkan ke dalam SIMAK BMN (formulir R-02) sebesar Rp7.208.401.275.557,-, yang terdiri dari transaksi saldo awal (100) sebesar Rp1.318.564.602.675,-, transaksi koreksi perubahan nilai (204) sebesar Rp221.726.096.593,-, transaksi koreksi tim penertiban aset (205) sebesar Rp5.743.974.277.443,-, transaksi penghapusan (301) sebesar -Rp76.081.874.154,-, dan transaksi lainnya sebesar Rp218.173.000,-, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp38.227.358.766,-.

Aset Tetap Satker Non BLU
Rp19.798.741.862.947

C.2.12.1. Aset Tetap (Satker Non BLU)

Saldo Aset Tetap pada satker biasa per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp19.798.741.862.947,- dan Rp20.998.072.557.007,- merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca UAPPA-W dan UAPPA-E1. Penurunan Aset Tetap sebesar Rp.(1.199.330.694.060),- diantaranya terjadi karena adanya reklasifikasi pencatatan aset tetap pada satker-satker BLU di Kementerian Agama berdasarkan koreksi atas hasil pemeriksaan BPK tahun 2010. Aset tetap pada satker-satker BLU semula dicatat dengan menggunakan akun aset tetap biasa, kemudian dikoreksi dengan menggunakan akun aset tetap BLU.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 39
 Aset Tetap Satker Non BLU

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	6.914.314.239.874	8.762.865.475.642	(1.848.551.235.768)
Peralatan dan Mesin	2.046.077.682.947	2.141.301.790.132	(95.224.107.185)
Gedung dan Bangunan	9.638.800.689.872	8.710.481.351.109	928.319.338.763
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.254.023.572	107.192.057.710	2.061.965.862
Aset Tetap Lainnya	350.085.500.172	370.669.387.322	(20.583.887.150)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	740.209.726.510	905.562.495.092	(165.352.768.582)
Jumlah	19.798.741.862.947	20.998.072.557.007	(1.199.330.694.060)

C.2.12.2. Aset Tetap Badan Layanan Umum

Aset Tetap BLU
Rp6.425.298.129.150

Saldo Aset Tetap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp6.425.298.129.150,- dan Rp1.016.316.122.118,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.408.982.007.032. Kenaikan nilai Aset Tetap BLU ini disebabkan oleh belanja modal BLU sebesar Rp48.270.157.024,-, penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan koreksi dari KPKNL (IP) serta penambahan aset tetap yang berasal dari transaksi tambah kurang pada SIMAK BMN. Selain itu juga karena reklasifikasi pencatatan aset tetap pada 13 satker BLU Kementerian Agama, yang semula baru 2 satker BLU yang menggunakan akun aset tetap BLU, tetapi sekarang sudah semua satker BLU menggunakan akun aset tetap BLU untuk melakukan pencatatan aset tetapnya. Reklasifikasi pencatatan ini didasarkan pada koreksi atas hasil pemeriksaan BPK tahun 2010

Rincian daftar Aset Tetap Badan Layanan Umum disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 40
 Aset Tetap Badan Layanan Umum

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	3.296.541.100.387	490.068.886.800	2.806.472.213.587

Peralatan dan Mesin	862.468.281.043	97.666.987.358	764.801.293.685
Gedung dan Bangunan	1.593.320.149.429	389.056.731.000	1.204.263.418.429
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.171.209.469	1.499.429.500	65.671.779.969
Aset Tetap Lainnya	61.835.405.417	1.733.231.460	60.102.173.957
Konstruksi Dalam Pengerjaan	543.961.983.405	36.290.856.000	507.671.127.405
Jumlah	6.425.298.129.150	1.016.316.122.118	5.408.982.007.032

Rincian Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 6.11 s.d 6.22**.

Aset Lainnya
Rp2.681.985.476.072

C.2.13. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp2.681.985.476.072,- terdiri dari Tagihan TP/TGR Rp4.099.200,-, Aset lainnya pada satker biasa Rp2.668.665.027.245,- dan Aset Lainnya pada satker BLU Rp13.316.349.627,-. Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel. 41
Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Tagihan TP/TGR	4.099.200	0
Aset Tak Berwujud	27.180.911.757	14.399.571.036
Aset Tak Berwujud BLU	10.743.020.664	0
Aset Lain-lain	2.641.484.115.488	11.355.594.381
Aset Lain-lain BLU	2.573.328.963	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	1.549.610.795.295
Jumlah	2.681.985.476.072	1.575.365.960.712

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp4.099.200,- dan Rp 0,-. Rincian Tagihan TP/TGR disajikan pada **Lampiran 6.25**

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp27.180.911.757,- dan Rp14.399.571.036,- merupakan aset yang berupa software yang berada di UAPPA-W dan UAPPA-E1. Rincian Aset Tak Berwujud pada UAPPA-W dan UAPPA-E1 dapat dilihat pada **Lampiran 6.23**

Aset Tak Berwujud BLU

Saldo Aset Tak Berwujud BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp10.743.020.664,- dan Rp0,- merupakan aset yang berupa software. Rincian Aset Tak Berwujud BLU pada UAPPA-W dan UAPPA-E1 disajikan pada **Lampiran 6.24**

Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.641.484.115.488,- dan Rp11.355.594.381,-. Aset Lain-lain dimaksud berupa Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan. Termasuk ke dalam aset lain-lain adalah:

1. Dana Abadi Umat (DAU) yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999. Pemasukan BPDAU selain dari efisiensi BPIH juga berasal dari bunga deposito, jasa giro, dividen atas saham Bank Muamalat Indonesia, dan imbalan jasa SBSN. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat di bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Nilai yang semula dilaporkan adalah berdasarkan nilai yang ada di rekening BP DAU, sedangkan nilai yang dilaporkan sekarang adalah nilai bersih Dana Abadi Umat berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU, yaitu sebesar Rp 1.739.384.628.574,83.
2. Aset BPIH yang semula dilaporkan di Laporan Keuangan Kementerian agama adalah Aset Terikat BPIH, yaitu aset yang dibatasi penggunaannya berupa setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program ini atau adanya keputusan dari pejabat berwenang. Aset yang terikat terdiri dari:
 - a. Kas dan Setara Kas Terikat adalah akun untuk mencatat setoran awal BPIH biasa/khusus dan hasil dari pengelolaan dana setoran awal BPIH tersebut dalam berbagai bentuk investasi
 - b. Investasi Terikat adalah akun untuk mencatat pengelolaan dana setoran awal dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan No.S-3410/PB.6/2011 tanggal 30 Maret 2011, penyajian aset yang berasal dari BPIH adalah sebesar *net asset* (aset bersih) BPIH. Aset bersih BPIH berdasarkan Laporan Keuangan BPIH adalah sebesar Rp 877.852.430.013,-. Aset BPDAU dan BPIH ini disajikan sebagai aset lain-lain berdasarkan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Dr:Aset Lain-lain Rp2.617.237.058.587,83

Cr:Diinvestasikan dalam aset lainnya Rp2.617.237.058.587,83

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran. 6.26**

Aset Lain-lain BLU

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.573.328.963,- dan Rp 0,-. Aset Lain-lain dimaksud berupa Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi

dalam kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Aset Lain-lain BLU disajikan pada **Lampiran 6.27**

*Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp334.119.122.227*

C.2.14. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp334.119.122.227,- dan Rp17.293.756.010,- merupakan kewajiban Kementerian Agama atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Kementerian Agama lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang, dan utang belanja modal. Utang merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 42
Akun Lawan (Kontra) Utang Kepada Pihak Ketiga

Akun Lawan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Kas di Lainnya dan Setara Kas (yang bukan lawan dari pendapatan yang ditangguhkan)	7.296.744.314	4.488.003.773
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	326.822.377.913	12.805.752.237
Jumlah	334.119.122.227	17.293.756.010

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 7.1**.

*Pendapatan Diterima di Muka
Rp2.962.989.081*

C.2.15. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.962.989.081,- dan Rp0,-, merupakan pendapatan yang diterima oleh Kementerian Agama dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Kementerian Agama, atau pendapatan bukan pajak yang telah disetor oleh wajib bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar bukan pajak. Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada **Lampiran 7.2**.

*Uang Muka dari KPPN
Rp9.723.647.912*

C.2.16. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp9.723.647.912,- dan Rp2.922.817.411,-. Jumlah Uang Muka dari KPPN merupakan pasangan perkiraan kas di bendahara pengeluaran yaitu sisa UP yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara. Rincian Uang Muka dari KPPN disajikan pada **Lampiran 7.3**.

Pendapatan yang Ditangguhkan
Rp6.550.962.614

C.2.17. Pendapatan yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp6.550.962.614,- dan Rp18.436.691.957,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UAPPA-W dan UAPPA-E1 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 43
Akun Lawan (Kontra) Pendapatan yang Ditangguhkan

Akun Lawan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Kas di Bendahara Penerimaan	2.931.949.230	5.445.111.193
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.619.013.384	12.991.580.764
Jumlah	6.550.962.614	18.436.691.957

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan disajikan pada **lampiran 7.4**

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Rp 0,-

C.2.18. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2010 NIHIL dan 31 Desember 2009 Rp.35.854.577.452,-. Saldo Nihil pada Tahun 2010 disebabkan karena akun Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar yang diinput diaplikasi SAKPA akan disajikan di neraca sebagai akun Utang Kepada Pihak Ketiga. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar disajikan dalam **Lampiran 7.5**

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Rp 0,-

C.2.19. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2010 NIHIL dan 31 Desember 2009 sebesar Rp.803.512.568,-. Saldo Nihil pada Tahun 2010 karena akun Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar yang diinput diaplikasi SAKPA akan disajikan di neraca sebagai akun Utang Kepada Pihak Ketiga. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar disajikan dalam **Lampiran 7.6**.

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp4.042.740

C.2.20. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp4.042.740,- dan Rp19.319.622,-.

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2010 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu minus Rp1.633.500,- karena terdapat kesalahan penggunaan akun pada waktu melakukan jurnal balik atas transaksi utang kepada pihak ketiga pada tahun 2009. Pada 31 Desember 2009 satker MTsN Ketahun melakukan jurnal penyesuaian transaksi akrual menggunakan akun utang kepada pihak

ketiga sedangkan jurnal baliknya per 1 Januari 2010 menggunakan akun utang jangka pendek lainnya. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **lampiran 7.7**

Cadangan Piutang
Rp4.513.103.590

C.2.21. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp4.513.103.590,- dan Rp12.659.928.019,-. Jumlah cadangan piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 44
Akun Lawan (Kontra) Cadangan Piutang

Akun Lawan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Piutang Bukan Pajak	1.616.400.187	2.545.487.375
Bagian Lancar Tagihan TGR	3.000.000	3.541.350
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2.640.363.334	1.340.899.294
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	253.340.069	0
Investasi dalam Deposito	0	8.770.000.000
Jumlah	4.513.103.590	12.659.928.019

Rincian Cadangan Piutang disajikan dalam **Lampiran 8.1**.

Cadangan Persediaan
Rp37.282.409.956

C.2.22. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp37.282.409.956,- dan Rp55.232.884.450,-. Jumlah ini merupakan lawan dari perkiraan persediaan yang dilaporkan UAPPA-W dan UAPPA-E1, termasuk persediaan pada BLU. Rincian Cadangan Persediaan disajikan pada **Lampiran 8.2**.

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Rp(326.826.420.653)

C.2.23. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah perkiraan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp(326.826.420.653) dan minus Rp49.483.161.879. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek 2010. Jumlah Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek merupakan akun lawan (pasangan) atas akun-akun di bawah ini (dalam Rp):

Tabel. 45
Akun Lawan (Kontra) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Utang Kepada Pihak Ketiga (selain lawan dari Kas Lainnya dan Setara Kas)	(326.822.377.913)	(12.805.752.237)
Utang Jangka Pendek Lainnya	(4.042.740)	(19.319.622.)
Pendapatan Diterima di Muka	0	(36.658.090.020)
Jumlah	(326.826.420.653)	(49.483.161.879)

Rincian Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan pada **Lampiran 8.3**

Dana Lancar BLU
Rp132.236.879.094

C.2.24. Dana Lancar BLU

Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2010 Rp132.236.879.094,- dan 31 Desember 2009 sebesar Rp104.273.729.179,-. Jumlah ini merupakan lawan dari Kas pada BLU. Rincian Dana Lancar BLU per satker BLU disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 46
Saldo Dana Lancar BLU 31 Desember 2010 dan 2009

BLU pada UAKPA	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	33.621.441.942	37.247.808.727
2 UIN Gunung Djati Bandung	9.161.588.899	14.605.701.864
3 IAIN Walisongo Semarang	6.210.767.302	1.950.185.539
4 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	26.083.384.687	18.316.199.250
5 IAIN Sunan Ampel	9.267.474.685	6.359.878.836
6 UIN Malang	7.340.640.144	2.213.995.750
7 IAIN Sumatera Utara	2.591.894.308	12.933.483.438
8 UIN Alauddin Makassar	14.777.513.560	10.646.475.775
9 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	15.457.592.876	0
10 IAIN SMH Banten	3.286.171.400	0
11 IAIN Raden Intan Lampung	2.625.111.246	0
12 IAIN Sultan Thaha Jambi	1.508.967.407	0
13 IAIN Raden Fatah Palembang	304.330.638	0
Jumlah	132.236.879.094	104.273.729.179

Sedangkan rincian Dana Lancar BLU Per UAPPA-W disajikan pada **Lampiran 8.4**

Barang/Jasa yang
Harus Diterima
Rp3.666.667.259

C.2.25. Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Jumlah Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.666.667.259,- dan Rp0,-. Jumlah ini merupakan lawan dari Uang Muka Belanja. Rincian Barang/Jasa Yang Harus Diterima disajikan pada **Lampiran 8.5**.

**Barang/Jasa yang
Harus Diserahkan
Rp(2.962.989.081)**

C.2.26. Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Jumlah Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp(2.962.989.081),- dan Rp0,- Jumlah ini merupakan lawan dari Pendapatan Diterima di Muka. Rincian Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan disajikan pada **Lampiran 8.6.**

**Diinvestasikan dalam
Aset Tetap
Rp26.224.039.992.097**

C.2.27. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar dan Rp26.224.039.992.097,- Rp22.014.388.679.125,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Kementerian Agama dalam bentuk aset tetap. Jumlah ini merupakan lawan dari Aset Tetap. Rincian Diinvestasikan dalam Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 8.7.**

**Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya
Rp2.681.985.476.072**

C.2.28. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.681.985.476.072,- dan Rp1.575.365.960.712,- jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Kementerian Agama dalam bentuk aset lainnya. Jumlah ini merupakan akun lawan dari Aset Lainnya. Rincian Diinvestasikan dalam Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.8.**

C.3. CATATAN PENTING NERACA

1. Posisi aset pada neraca SAK masih terdapat perbedaan dengan posisi BMN di neraca, yaitu sebesar Rp13.888.701.676. Perbedaan ini terdapat di 4 wilayah seperti yang disajikan dalam tabel di bawah in

Tabel 47
Perbedaan Neraca SAK dan SIMAK

NO	ESELON 1/WILAYAH	SAK	SIMAK BMN	SELISIH
1	Ditjen Bimas Hindu	4.827.843.973	4.700.210.973	127.633.000
2	Kanwil DKI Jakarta	1.886.226.348.900	1.873.084.032.272	13.142.316.628
3	Kanwil Jawa Barat	1.629.690.288.932	1.629.184.083.932	506.205.000
4	Kanwil Jawa Timur	3.322.303.392.577	3.322.303.393.270	(693)
5	Kanwil Aceh	1.780.251.233.869	1.780.251.233.964	(95)

Perbedaan aset yang terjadi di satu eselon 1 pusat dan empat wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimas Hindu
Perbedaan sebesar Rp127.633.000 disebabkan karena adanya rehab rumah dinas Direktur Jenderal Bimas Hindu yang merupakan aset milik Sekretariat Jenderal (aset tetap dalam renovasi)

2. DKI Jakarta
Perbedaan sebesar Rp13.142.316.628 disebabkan karena adanya rehab gedung pihak ketiga (aset tetap dalam renovasi), mebelair yang telah dibagikan ke sekolah swasta pada TA 2009 sebesar, dan pengiriman persediaan yang tidak dilakukan.
 3. Jawa Barat
Perbedaan sebesar Rp506.205.000 disebabkan karena adanya rehab gedung pihak ketiga (aset tetap dalam renovasi)
 4. Jawa Timur
Perbedaan sebesar minus Rp693 disebabkan karena adanya permasalahan sistem aplikasi. Posisi neraca antara SAK dengan SIMAK BMN sudah sama dimasing-masing satker, akan tetapi setelah dikirim ke aplikasi UAPPA-W terjadi selisih sebesar minus Rp693
 5. Aceh
Perbedaan sebesar Rp95 disebabkan karena adanya permasalahan sistem aplikasi. Posisi neraca antara SAK dengan SIMAK BMN sudah sama dimasing-masing satker, akan tetapi setelah dikirim ke aplikasi UAPPA-W terjadi selisih sebesar Rp95
2. Penyajian aset BPDAU dan BPIH di Laporan Keuangan Kementerian Agama.
Nilai Aset BPDAU yang disajikan di neraca Kementerian Agama tahun 2010 adalah sebesar nilai bersih per tanggal 31 Desember 2010, sedangkan nilai aset BPIH yang disajikan adalah sebesar nilai bersih per tanggal 31 Januari 2011. Terjadi perbedaan *cut off* antara Laporan Keuangan Kementerian Agama dengan Laporan Keuangan BPIH, hal ini karena adanya perbedaan periode akuntansi antara Laporan Keuangan Kementerian Agama dengan Laporan Keuangan BPIH. Periode akuntansi untuk Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sedangkan periode akuntansi untuk Laporan Keuangan BPIH berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 1431 H/2010 M, periode pelaporan adalah 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Januari 2011. Pada tahun 2010, BPIH belum bisa menyajikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2010, akan tetapi untuk tahun selanjutnya akan dibuat Laporan Keuangan per 31 Desember untuk kepentingan Laporan Keuangan Kementerian Agama dan Laporan Keuangan per 31 Januari.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 1
PROG. ID : lui_penc01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	U R A I A N	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	I. IKHTISAR MENURUT MAP						
42	Penerimaan Dalam Negeri						
423	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
4231	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
42311	Pendapatan Penjualan dan Sewa						
423117	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	21,810,000	59,880,000	0	59,880,000	0.00
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	0	6,412,000	0	6,412,000	0.00
42312	Jumlah Penerimaan 42311	0	21,810,000	66,292,000	0	66,292,000	0.00
423121	Pendapatan Penjualan Aset						
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah	0	0	19,700,000	0	19,700,000	0.00
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	0	7,650,000	44,645,000	0	44,645,000	0.00
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	0	220,825,000	1,588,791,735	0	1,588,791,735	0.00
42314	Jumlah Penerimaan 42312	0	228,475,000	1,653,136,735	0	1,653,136,735	0.00
423141	Pendapatan Sewa						
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	6,625,220	60,567,243	303,222,422	0	303,222,422	4,576.79
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	0	278,760,771	805,492,711	0	805,492,711	0.00
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	0	0	16,353,910	0	16,353,910	0.00
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	0	500,000	18,544,386	0	18,544,386	0.00
423149	Jumlah Penerimaan 42314	6,625,220	339,828,014	1,143,613,429	0	1,143,613,429	17,261.51
4232	Jumlah Penerimaan 4231	6,625,220	590,113,014	2,863,042,164	0	2,863,042,164	43,214.29
42321	Pendapatan Jasa						
42321	Pendapatan Jasa I						
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	0	0	28	0	28	0.00
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan DJBC	0	0	840,000	0	840,000	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 2
PROG. ID : lui_penc01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3					8
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	41,895,746,950	6,777,125,448	67,548,420,179	0	67,548,420,179	161.22
	Jumlah Penerimaan 42321	41,895,746,950	6,777,125,448	67,549,260,207	0	67,549,260,207	161.23
42322	Pendapatan Jasa II	0	0	0	0	0	0.00
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	340,846,505	2,612,464,281	3,468	2,612,460,813	0.00
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	0	0	1,287	0	1,287	0.00
	Jumlah Penerimaan 42322	0	340,846,505	2,612,465,568	3,468	2,612,462,100	0.00
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	39,483	402,881	0	402,881	0.00
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	39,483	402,881	0	402,881	0.00
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	61,076,450	0	61,076,450	0.00
	Jumlah Penerimaan 42329	0	0	61,076,450	0	61,076,450	0.00
4233	Pendapatan Bunga	41,895,746,950	7,118,011,436	70,223,205,106	3,468	70,223,201,638	167.61
42331	Pendapatan Bunga	0	0	0	0	0	0.00
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	0	0	5,598	0	5,598	0.00
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0	220,695	10,165,826	0	10,165,826	0.00
	Jumlah Penerimaan 42331	0	220,695	10,171,424	0	10,171,424	0.00
42335	Pendapatan Pendidikan	0	220,695	10,171,424	0	10,171,424	0.00
42351	Pendapatan Pendidikan	212,959,485,038	5,127,797,986	138,456,838,877	17,801,173,159	120,655,665,718	65.01
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	7,251,287,737	388,925,000	6,117,745,000	0	6,117,745,000	84.36
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	16,549,350,000	915,250,000	24,729,254,529	982,800,000	23,746,454,529	149.42
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	12,018,657,000	1,801,835,845	15,902,161,727	708,198,929	15,193,962,798	132.31
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	248,778,779,775	8,233,808,831	185,206,000,133	19,492,172,088	165,713,828,045	74.44

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 3
PROG. ID : luj_penc01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND					
		ESTIMASI PENDAPATAN	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI						
								3	4	5	6	7
1	2											
4236	Jumlah Penerimaan 4235	248,778,779,775	8,233,808,831	185,206,000,133	19,492,172,088	165,713,828,045	74.44					
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi											
423613	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	0	238,593,210	0	238,593,210	0.00					
	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	0	0	238,593,210	0	238,593,210	0.00					
	Jumlah Penerimaan 42361	0	0	238,593,210	0	238,593,210	0.00					
4237	Jumlah Penerimaan 4236	0	0	238,593,210	0	238,593,210	0.00					
4237	Pendapatan Iuran dan Denda											
42375	Pendapatan Denda I											
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	186,116,070	1,192,208,892	0	1,192,208,892	0.00					
	Jumlah Penerimaan 42375	0	186,116,070	1,192,208,892	0	1,192,208,892	0.00					
	Jumlah Penerimaan 4237	0	186,116,070	1,192,208,892	0	1,192,208,892	0.00					
4239	Pendapatan Lain-lain											
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu											
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	727,728,576	25,418,892,787	0	25,418,892,787	0.00					
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	0	8,550,000	42,303,610	0	42,303,610	0.00					
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	750,000	1,752,297,033	31,870,271,724	0	31,870,271,724	***.***					
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	0	0	42,918,065	0	42,918,065	0.00					
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	0	0	4,341,500	0	4,341,500	0.00					
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	37,763,464	2,721,234,750	0	2,721,234,750	0.00					
	Jumlah Penerimaan 42391	750,000	2,526,339,073	60,099,962,436	0	60,099,962,436	***.***					
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang											
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	0	132,240,876	0	132,240,876	0.00					
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/JGR) Bendahara	0	193,447,512	1,194,056,051	0	1,194,056,051	0.00					
	Jumlah Penerimaan 42392	0	193,447,512	1,326,296,927	0	1,326,296,927	0.00					
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening											
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	2,224,961	0	2,224,961	0.00					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 4
PROG. ID : lui_pend01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	U R A I A N	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND
		ESTIMASI PENDAPATAN	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2						8
42399	Jumlah Penerimaan 42393	0	0	2,224,961	0	2,224,961	0.00
	Pendapatan Lain-lain						
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,626,100	37,954,126	0	37,954,126	0.00
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	54,385,189	1,330,231,152	0	1,330,231,152	0.00
	Jumlah Penerimaan 42399	0	56,011,289	1,368,185,278	0	1,368,185,278	0.00
	Jumlah Penerimaan 4239	750,000	2,775,797,874	62,796,669,602	0	62,796,669,602	***,***,**
	Jumlah Penerimaan 423	290,681,901,945	18,904,067,920	322,529,890,531	19,492,175,556	303,037,714,975	110.95
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM						
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum						
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat						
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	196,127,355,000	19,376,105,036	334,474,773,678	0	334,474,773,678	170.53
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	18,359,195,000	12,143,035,442	20,057,011,853	0	20,057,011,853	109.24
	Jumlah Penerimaan 42411	214,486,550,000	31,519,140,478	354,531,785,531	0	354,531,785,531	165.29
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat						
424136	Pendapatan Investasi	3,589,497,000	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42413	3,589,497,000	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 4241	218,076,047,000	31,519,140,478	354,531,785,531	0	354,531,785,531	162.57
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum						
42421	Pendapatan Hibah Terikat						
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	10,496,335,000	480,791,750	480,791,750	0	480,791,750	4.58
	Jumlah Penerimaan 42421	10,496,335,000	480,791,750	480,791,750	0	480,791,750	4.58
	Jumlah Penerimaan 4242	10,496,335,000	480,791,750	480,791,750	0	480,791,750	4.58
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7,854,560,000	6,110,860,899	21,016,520,570	0	21,016,520,570	267.57
	Jumlah Penerimaan 42431	7,854,560,000	6,110,860,899	21,016,520,570	0	21,016,520,570	267.57

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 5
PROG. ID : lui_pend01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
			4	5	6	7	
1	2	3					8
		7,854,560,000	6,110,860,899	21,016,520,570	0	21,016,520,570	267.57
4249	Jumlah Penerimaan 4243						
	Pendapatan BLU Lainnya						
42491	Pendapatan BLU Lainnya	0	1,435,496,393	4,017,488,389	0	4,017,488,389	0.00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,435,496,393	4,017,488,389	0	4,017,488,389	0.00
	Jumlah Penerimaan 42491						
	Jumlah Penerimaan 4249	0	1,435,496,393	4,017,488,389	0	4,017,488,389	0.00
	Jumlah Penerimaan 424	236,426,942,000	39,546,289,520	380,046,586,240	0	380,046,586,240	160.74
	Jumlah Penerimaan 42	527,108,843,945	58,450,357,440	702,576,476,771	19,492,175,556	683,084,301,215	133.28
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	527,108,843,945	58,450,357,440	702,576,476,771	19,492,175,556	683,084,301,215	133.28
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	527,108,843,945	58,450,357,440	702,576,476,771	19,492,175,556	683,084,301,215	133.28
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON						
01	SEKRETARIAT JENDERAL	527,108,843,945	57,728,663,796	695,075,669,454	19,492,175,556	675,583,493,898	131.86
02	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	72,622,181	0	72,622,181	0.00
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	0	7,690,754	127,508,609	0	127,508,609	0.00
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	0	700,085,890	5,291,968,303	0	5,291,968,303	0.00
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	0	0	48,776,372	0	48,776,372	0.00
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	0	0	137,555,229	0	137,555,229	0.00
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	0	0	542	0	542	0.00
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	0	13,217,000	987,433,054	0	987,433,054	0.00
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	0	0	428,033,800	0	428,033,800	0.00
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	0	700,000	406,909,227	0	406,909,227	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	527,108,843,945	58,450,357,440	702,576,476,771	19,492,175,556	683,084,301,215	133.28
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT-WILAYAH						
0199	PUSAT	0	987,851,301	9,388,923,264	0	9,388,923,264	0.00
0100	PROP. DKI JAKARTA	122,005,944,500	9,648,604,158	106,943,275,018	0	106,943,275,018	87.65
0200	PROP. JAWA BARAT	42,879,152,180	7,339,261,859	51,197,297,889	0	51,197,297,889	119.39

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 6
PROG. ID : lui_penc01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	U R A I A N	ESTIMASI PENDAPATAN	R E A L I S A S I P E N D A P A T A N					% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0300	PROP. JAWA TENGAH	43,273,804,000	2,884,611,989	58,000,741,970	0	58,000,741,970	134.03	
0400	PROP. D.I. YOGYAKARTA	49,742,032,000	7,021,588,315	53,441,918,927	0	53,441,918,927	107.43	
0500	PROP. JAWA TIMUR	62,687,463,000	7,965,075,359	99,706,599,893	6,851,609,929	92,854,989,964	159.05	
0600	PROP. D.I. ACEH	18,399,223,400	1,078,402,465	20,038,909,840	3,468	20,038,906,372	108.91	
0700	PROP. SUMATERA UTARA	25,936,628,750	949,017,805	23,267,934,931	0	23,267,934,931	89.71	
0800	PROP. SUMATERA BARAT	9,054,709,500	574,097,180	41,991,340,704	0	41,991,340,704	463.75	
0900	PROP. RIAU	42,825,185,500	2,490,426,019	51,362,728,858	5,555,766,218	45,806,962,640	119.93	
1000	PROP. JAMBI	3,622,683,538	407,342,363	23,915,435,513	3,397,046,461	20,518,389,052	660.15	
1100	PROP. SUMATERA SELATAN	7,591,806,500	319,766,925	10,736,949,112	0	10,736,949,112	141.42	
1200	PROP. LAMPUNG	11,674,564,000	5,572,952,573	14,929,381,931	255,869,480	14,673,512,451	127.87	
1300	PROP. KALIMANTAN BARAT	4,819,803,750	126,563,694	5,462,534,215	0	5,462,534,215	113.33	
1400	PROP. KALIMANTAN TENGAH	4,517,601,000	194,111,206	5,233,716,822	0	5,233,716,822	115.85	
1500	PROP. KALIMANTAN SELATAN	5,524,992,000	518,135,138	8,042,475,977	0	8,042,475,977	145.56	
1600	PROP. KALIMANTAN TIMUR	750,431,500	185,397,895	4,879,111,128	0	4,879,111,128	650.17	
1700	PROP. SULAWESI UTARA	551,777,500	87,903,649	1,865,185,178	0	1,865,185,178	338.03	
1800	PROP. SULAWESI TENGAH	370,264,000	657,304,097	2,791,570,938	0	2,791,570,938	753.94	
1900	PROP. SULAWESI SELATAN	27,111,011,327	3,964,385,807	43,253,433,985	0	43,253,433,985	159.54	
2000	PROP. SULAWESI TENGGARA	168,615,000	258,974,614	2,302,003,907	0	2,302,003,907	1,365.24	
2100	PROP. MALUKU	5,715,036,000	48,368,706	7,388,047,183	0	7,388,047,183	129.27	
2200	PROP. BALI	4,419,580,000	1,429,310,520	6,027,364,596	0	6,027,364,596	136.37	
2300	PROP. NUSA TENGGARA BARAT	6,797,763,750	1,064,192,831	10,100,571,809	0	10,100,571,809	148.58	
2400	PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	97,902,500	48,748,870	506,811,191	0	506,811,191	517.66	
2500	PROP. IRIAN JAYA	945,102,000	416,092,350	2,043,665,117	0	2,043,665,117	216.23	
2600	PROP. BENGKULU	9,507,716,000	316,173,273	9,805,784,106	0	9,805,784,106	103.13	
2800	PROP. MALUKU UTARA	2,947,623,000	768,697,631	3,242,764,226	0	3,242,764,226	110.01	
2900	PROP. BANTEN	10,176,713,000	662,228,890	18,304,676,731	3,431,880,000	14,872,796,731	179.86	
3000	PROP. BANGKA BELITUNG	1,853,129,750	55,260,461	2,286,537,319	0	2,286,537,319	123.38	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KD. LAPORAN : LRPK.B01
TANGGAL : 05/05/11
HAL : 7
PROG. ID : lui_penc01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND
			BULAN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7	8	
1	2	3						
3100	PROP. GORONTALO	235,929,000	174,453,712	2,127,994,595	0	2,127,994,595	901.96	
3200	PROP. KEPULAUAN RIAU	545,376,000	45,855,799	796,021,881	0	796,021,881	145.95	
3300	PROP. PAPIA BARAT	69,840,000	173,629,193	865,763,769	0	865,763,769	1,239.63	
3400	PROP. SULAWESI BARAT	289,440,000	15,570,793	329,004,248	0	329,004,248	113.66	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	527,108,843,945	58,450,357,440	702,576,476,771	19,492,175,556	683,084,301,215	133.28	



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 3
Prog.id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	621,307,800,000	651,307,800,000	116,468,822,131	611,674,585,373	(1,752,273,309)	609,922,312,064	93.91	39,633,214,627	
02	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	124,334,800,000	124,334,800,000	46,462,056,246	122,508,906,206	(124,894,090)	122,384,012,116	98.53	1,825,893,794	
09	program tidak ada	0	0	0	0	(24,778,406)	(24,778,406)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 01	745,642,600,000	775,642,600,000	162,930,878,377	734,183,491,579	(1,901,945,805)	732,281,545,774	94.65	41,459,108,421	
02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA									
01	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	30,050,000,000	30,500,000,000	7,003,947,502	29,545,381,549	(96,940,000)	29,448,441,549	96.87	954,618,451	
03	LITBANG AGAMA	30,050,000,000	30,500,000,000	7,003,947,502	29,545,381,549	(96,940,000)	29,448,441,549	96.87	954,618,451	
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	33,033,700,000	33,033,700,000	4,800,670,250	28,739,392,607	(30,439,950)	28,708,952,657	87.00	4,294,307,393	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 03	33,033,700,000	33,033,700,000	4,800,670,250	28,739,392,607	(30,439,950)	28,708,952,657	87.00	4,294,307,393	
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA									
01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	39,607,000,000	39,607,000,000	4,758,288,000	39,444,938,000	(15,042,200)	39,429,895,800	99.59	162,062,000	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 90	39,607,000,000	39,607,000,000	4,758,288,000	39,444,938,000	(15,042,200)	39,429,895,800	99.59	162,062,000	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	848,333,300,000	878,783,300,000	179,493,784,129	831,913,203,735	(2,044,367,955)	829,868,835,780	94.67	46,870,096,265	
10	PENDIDIKAN									
01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	45,271,400,000	45,271,400,000	2,599,536,225	44,883,784,875	(27,845,900)	44,855,938,975	99.14	387,615,125	
03	program tidak ada	0	0	0	0	(200,000)	(200,000)	0.00	0	
09	program tidak ada	0	0	0	0	(6,555,000)	(6,555,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 01	45,271,400,000	45,271,400,000	2,599,536,225	44,883,784,875	(34,600,900)	44,849,183,975	99.14	387,615,125	
02	PENDIDIKAN DASAR									
01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	5,659,355,840,000	6,340,636,762,237	960,411,100,422	5,764,198,078,645	(11,066,978,470)	5,753,129,100,175	90.91	576,438,683,592	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 4
Prog.id : lu_lrab1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03	program tidak ada	0	0	0	0	(184,270,500)	(184,270,500)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	5,659,355,840,000	6,340,636,762,237	960,411,100,422	5,764,198,078,645	(11,253,248,970)	5,752,944,829,675	90.91	576,438,683,592	
03	PENDIDIKAN MENENGAH									
01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	992,588,000,000	1,800,251,560,000	555,851,918,063	1,562,444,479,863	(1,812,362,809)	1,560,632,117,054	86.79	237,807,080,137	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 03	992,588,000,000	1,800,251,560,000	555,851,918,063	1,562,444,479,863	(1,812,362,809)	1,560,632,117,054	86.79	237,807,080,137	
04	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL									
01	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	48,306,700,000	73,106,700,000	9,914,621,550	65,184,921,800	(39,255,200)	65,145,666,600	89.16	7,921,778,200	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 04	48,306,700,000	73,106,700,000	9,914,621,550	65,184,921,800	(39,255,200)	65,145,666,600	89.16	7,921,778,200	
06	PENDIDIKAN TINGGI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	946,745,235,000	1,529,981,092,000	569,479,745,457	1,429,986,507,060	(1,094,926,679)	1,428,891,580,381	93.46	99,994,584,940	
03	program tidak ada	0	0	0	0	(52,095,096)	(52,095,096)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	946,745,235,000	1,529,981,092,000	569,479,745,457	1,429,986,507,060	(1,147,021,775)	1,428,839,485,285	93.46	99,994,584,940	
07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN									
	program tidak ada	0	0	0	0	(841,500)	(841,500)	0.00	0	
01	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,384,529,035,000	3,499,815,335,000	1,215,240,615,110	2,935,253,295,584	(3,431,969,929)	2,931,821,325,655	83.87	564,562,039,416	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	(121,494,400)	(121,494,400)	0.00	0	
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	11,236,801,763,800	11,647,630,949,000	1,919,179,641,028	11,128,461,106,838	(13,283,722,282)	11,115,177,384,556	95.54	519,169,842,162	
031	program tidak ada	0	90,000,000	0	0	0	0	0.00	90,000,000	
08	program tidak ada	0	0	0	0	(4,755,500)	(4,755,500)	0.00	0	
09	program tidak ada	0	0	0	0	(877,350)	(877,350)	0.00	0	
10	program tidak ada	0	117,240,000	0	0	0	0	0.00	117,240,000	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 07	14,621,330,798,800	15,147,653,524,000	3,134,420,256,138	14,063,714,402,422	(16,843,660,961)	14,046,870,741,461	92.84	1,083,939,121,578	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 6
Prog.Id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	97.248.000.000	154.619.432.000	5.344.199.889	32.503.189.101	0	32.503.189.101	21.02	122.116.242.899	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 03	97.248.000.000	154.619.432.000	5.344.199.889	32.503.189.101	0	32.503.189.101	21.02	122.116.242.899	
06	PENDIDIKAN TINGGI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	279.523.000.000	627.134.370.000	99.984.849.937	253.502.163.317	0	253.502.163.317	40.42	373.632.206.683	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	279.523.000.000	627.134.370.000	99.984.849.937	253.502.163.317	0	253.502.163.317	40.42	373.632.206.683	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	416.871.000.000	861.484.638.000	139.079.609.643	356.097.357.693	0	356.097.357.693	41.34	505.387.280.307	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 02	416.871.000.000	861.484.638.000	139.079.609.643	356.097.357.693	0	356.097.357.693	41.34	505.387.280.307	
04	RUPIAH MURNI PENDAMPI									
10	PENDIDIKAN									
02	PENDIDIKAN DASAR									
01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	48.450.000.000	48.450.000.000	17.927.909.871	46.207.018.820	0	46.207.018.820	95.37	2.242.981.180	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 02	48.450.000.000	48.450.000.000	17.927.909.871	46.207.018.820	0	46.207.018.820	95.37	2.242.981.180	
06	PENDIDIKAN TINGGI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	36.400.000.000	39.718.643.000	9.700.270.898	36.954.673.694	0	36.954.673.694	93.04	2.763.969.306	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	36.400.000.000	39.718.643.000	9.700.270.898	36.954.673.694	0	36.954.673.694	93.04	2.763.969.306	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	84.850.000.000	88.168.643.000	27.628.180.769	83.161.692.514	0	83.161.692.514	94.32	5.006.950.486	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	84.850.000.000	88.168.643.000	27.628.180.769	83.161.692.514	0	83.161.692.514	94.32	5.006.950.486	
05	PNBP									
09	AGAMA									
01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA									
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	64.222.400.000	64.292.400.000	22.446.519.738	48.925.042.503	(12.726.000)	48.912.316.503	76.10	15.367.357.497	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 09 . 01	64.222.400.000	64.292.400.000	22.446.519.738	48.925.042.503	(12.726.000)	48.912.316.503	76.10	15.367.357.497	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	64.222.400.000	64.292.400.000	22.446.519.738	48.925.042.503	(12.726.000)	48.912.316.503	76.10	15.367.357.497	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 7
Prog.id : lu_lrab11b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	PENDIDIKAN									
06	PENDIDIKAN TINGGI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	251,714,257,000	166,593,107,000	44,563,515,780	148,492,209,776	(67,185,435)	148,425,024,341	89.13	18,100,897,224	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	251,714,257,000	166,593,107,000	44,563,515,780	148,492,209,776	(67,185,435)	148,425,024,341	89.13	18,100,897,224	
07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN									
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	0	59,290,000	46,178,000	46,178,000	(1,712,000)	44,466,000	77.89	13,112,000	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 07	0	59,290,000	46,178,000	46,178,000	(1,712,000)	44,466,000	77.88	13,112,000	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	251,714,257,000	166,652,397,000	44,609,693,780	148,538,387,776	(68,897,435)	148,469,490,341	89.13	18,114,009,224	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 05	315,936,657,000	230,944,797,000	67,056,213,518	197,463,430,279	(81,623,435)	197,381,806,844	85.50	33,481,366,721	
06	BLU									
10	PENDIDIKAN									
06	PENDIDIKAN TINGGI									
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	251,624,808,000	390,132,510,000	161,628,603,511	344,941,945,604	0	344,941,945,604	88.42	45,190,564,396	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 06	251,624,808,000	390,132,510,000	161,628,603,511	344,941,945,604	0	344,941,945,604	88.42	45,190,564,396	
07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN									
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	0	0	0	0	(7,000,000)	(7,000,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10 . 07	0	0	0	0	(7,000,000)	(7,000,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	251,624,808,000	390,132,510,000	161,628,603,511	344,941,945,604	(7,000,000)	344,934,945,604	88.42	45,190,564,396	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	251,624,808,000	390,132,510,000	161,628,603,511	344,941,945,604	(7,000,000)	344,934,945,604	88.42	45,190,564,396	
	JUMLAH BELANJA	27,243,107,223,800	30,627,412,668,237	6,262,399,677,933	28,047,146,918,980	(39,081,205,164)	28,008,065,713,816	91.58	2,580,265,749,257	
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I										
01	SEKRETARIAT JENDERAL	24,762,759,505,800	26,955,632,486,237	5,178,076,838,870	25,008,983,760,885	(27,460,282,376)	24,981,523,478,509	92.78	1,946,648,725,352	
02	INSPEKTORAT JENDERAL	92,832,091,000	95,332,091,000	18,280,570,705	89,995,335,058	(1,013,489,651)	88,981,845,407	94.40	5,336,755,942	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 8
Prog.id : lu_lrab1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	143,756,138,000	143,756,138,000	19,613,445,816	140,225,801,246	(293,082,906)	139,932,718,340	97.54	3,530,336,754	
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	1,601,699,664,000	2,707,027,128,000	910,945,003,127	2,140,036,548,685	(6,831,719,222)	2,133,204,829,463	79.05	566,990,579,315	
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	104,422,444,000	124,292,444,000	18,766,199,325	119,391,278,389	(28,034,337)	119,353,244,052	96.05	4,911,165,611	
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	80,675,200,000	96,045,200,000	13,294,591,740	88,888,768,978	(14,647,067)	88,874,121,911	92.55	7,156,431,022	
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	60,599,772,000	72,594,772,000	8,243,497,989	70,629,515,693	(265,731,201)	70,363,784,492	97.29	1,965,256,307	
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	47,523,366,000	56,893,366,000	7,766,455,958	50,931,013,803	(1,771,091,961)	49,159,921,842	89.52	5,962,352,197	
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	162,353,574,000	189,353,574,000	50,092,824,812	169,705,596,556	(1,246,708,607)	168,458,887,949	89.62	19,647,977,444	
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	186,485,469,000	186,485,469,000	37,330,249,591	168,369,299,667	(156,417,836)	168,212,881,851	90.29	18,116,169,313	
	JUMLAH BELANJA	27,243,107,223,800	30,627,412,668,237	6,262,399,677,933	28,047,146,918,980	(39,081,205,164)	28,008,065,713,816	91.58	2,580,265,749,257	
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH										
0199	INSTANSI PUSAT	2,896,744,595,000	3,984,519,424,000	1,131,937,880,122	3,337,988,991,960	(12,532,994,222)	3,325,455,997,738	83.77	646,530,432,040	
0100	Prop. DKI Jakarta	926,444,586,000	1,166,360,638,000	297,105,340,023	1,096,285,262,564	(875,245,630)	1,095,410,016,934	93.99	70,075,375,436	
0200	Prop. Jawa Barat	3,298,986,461,800	3,511,495,965,000	502,216,956,324	3,144,624,594,732	(4,035,413,417)	3,140,589,181,315	89.55	366,871,370,268	
0300	Prop. Jawa Tengah	2,940,794,545,000	3,087,338,217,000	632,475,306,699	2,962,374,301,416	(6,028,859,340)	2,956,345,442,076	95.95	124,963,915,584	
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	541,585,386,000	593,857,998,000	122,452,035,011	556,874,212,050	(407,028,152)	558,467,183,898	94.11	34,983,785,950	
0500	Prop. Jawa Timur	3,988,071,981,000	4,230,601,569,000	1,041,527,738,035	3,947,749,805,141	(2,859,417,391)	3,944,890,387,750	93.31	282,851,763,859	
0600	Prop. D.I. Aceh	1,178,261,005,000	1,422,702,321,000	306,373,488,469	1,255,402,514,060	(1,395,017,461)	1,254,007,496,599	88.24	167,299,806,940	
0700	Prop. Sumatera Utara	1,131,809,567,000	1,190,579,012,000	202,810,124,207	1,084,791,757,627	(331,917,086)	1,084,459,840,541	91.11	105,787,254,373	
0800	Prop. Sumatera Barat	860,226,209,000	894,564,321,000	193,300,401,515	833,518,833,062	(1,764,624,428)	831,754,208,634	93.18	61,045,487,938	
0900	Prop. Riau	582,160,499,000	602,439,261,000	130,659,365,547	576,389,484,805	(434,874,044)	575,954,610,761	95.68	26,049,776,195	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 9
Prog.id : lu_rlab1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1000	Prop. Jambi	485.882,481,000	543,519,053,000	115,222,830,905	509,917,607,278	(268,135,062)	509,649,472,216	93.82	33,601,445,722	
1100	Prop. Sumatera Selatan	556,684,155,000	592,330,294,237	94,608,228,706	575,685,374,828	(654,413,752)	575,030,961,076	97.19	16,644,919,409	
1200	Prop. Lampung	681,526,303,000	725,919,266,000	127,684,056,991	654,223,180,343	(424,503,666)	653,798,676,677	90.12	71,696,085,657	
1300	Prop. Kalimantan Barat	371,744,205,000	397,112,250,000	70,517,901,424	373,627,565,434	(227,475,026)	373,400,090,408	94.09	23,484,684,566	
1400	Prop. Kalimantan Tengah	338,843,164,000	373,709,016,000	63,870,075,274	350,560,754,869	(534,021,141)	350,026,733,728	93.81	23,148,261,131	
1500	Prop. Kalimantan Selatan	637,348,963,000	712,161,460,000	136,295,748,467	702,987,283,473	(609,518,092)	702,377,765,381	98.71	9,174,176,527	
1600	Prop. Kalimantan Timur	310,768,805,000	337,696,094,000	63,364,924,887	290,021,171,466	(416,315,831)	289,604,855,635	85.88	47,674,922,534	
1700	prop. Sulawesi Utara	193,241,778,000	245,928,998,000	52,275,232,239	229,422,804,097	(466,932,249)	228,955,871,848	93.29	16,506,193,903	
1800	Prop. Sulawesi Tengah	303,178,369,000	347,418,807,000	54,150,489,832	334,398,315,713	(207,290,714)	334,191,024,999	96.25	13,020,491,287	
1900	Prop. Sulawesi Selatan	1,057,813,421,000	1,376,531,610,000	257,505,145,264	1,199,915,791,898	(1,237,599,332)	1,198,678,192,566	87.17	176,615,818,102	
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	274,947,485,000	303,680,972,000	55,348,038,827	282,363,428,122	(210,519,845)	282,152,908,277	96.27	11,317,543,878	
2100	Prop. Maluku	288,814,047,000	282,344,597,000	40,712,583,772	282,254,453,698	(228,774,220)	282,025,679,478	99.97	90,143,302	
2200	Prop. Bali	290,799,475,000	308,979,187,000	53,444,587,994	293,156,092,103	(280,154,114)	292,875,937,989	94.88	15,823,094,897	
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	630,289,588,000	677,286,003,000	104,190,844,751	651,863,865,555	(594,132,402)	651,269,733,153	96.25	25,402,137,445	
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	324,612,252,000	317,186,330,000	52,069,823,756	284,281,627,746	(204,408,571)	284,077,219,175	89.63	32,904,702,254	
2500	Prop. Irian Jaya	174,560,657,000	189,941,212,000	26,240,282,866	185,269,914,762	(105,523,188)	185,164,391,574	97.54	4,671,297,238	
2600	Prop. Bengkulu	280,140,789,000	298,414,093,000	48,705,014,321	286,689,456,119	(270,503,120)	286,418,952,999	96.07	11,724,636,881	
2800	Prop. Maluku Utara	190,388,749,000	194,210,371,000	27,035,576,644	191,126,452,566	(47,182,866)	191,079,269,698	98.41	3,083,918,434	
2900	Prop. Banten	846,478,076,000	955,300,714,000	131,217,955,307	843,674,479,777	(570,178,211)	843,104,301,566	88.32	111,626,234,223	
3000	Prop. Bangka Belitung	129,312,987,000	146,813,287,000	22,770,702,315	129,224,784,028	(121,444,759)	129,103,339,269	88.02	17,588,502,972	
3100	Prop. Gorontalo	175,983,622,000	198,778,239,000	31,852,016,521	188,155,382,078	(106,855,575)	188,048,526,503	94.66	10,622,856,922	
3200	Prop. Kepulauan Riau	119,166,343,000	128,585,637,000	23,542,096,731	120,234,060,849	(73,001,308)	120,161,059,541	93.51	8,351,576,151	
3300	PROP. PAPUA BARAT	124,116,123,000	131,150,592,000	20,208,523,688	123,638,147,503	(352,747,669)	123,285,399,834	94.27	7,512,444,497	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 10
Prog.Id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3400	PROP. SULAWESI BARAT	128.380.552,000	151.975.860,000	28.208.360,499	154.976.926,428	(204,183,278)	154,772,743,150	101,97	(3.001,066,428)	
5000	ATASE HAJI	3.000.000,000	6.000.000,000	500.000,000	1.478.240,830	0	1.478.240,830	24,64	4.521,759,170	
	JUMLAH BELANJA	27.243,107,223,800	30.627,412,668,237	6.262,399,677,933	28.047,146,918,980	(39,081,205,164)	28,008,065,713,816	91,58	2,580,265,749,257	
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK										
51	BELANJA PEGAWAI									
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			0	0			0	0,00	72,000,000
5111	jenis belanja tidak ada	72,000,000	72,000,000							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.542,672,762,600	5.483,600,902,100	468,431,163,800	6,011,454,744,912	(1,666,396,888)	6,009,788,348,024	109,63	(527,853,842,812)	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	148,702,000	148,857,000	86,109,304	825,750,785	(200,067,158)	625,683,627	554,73	(676,893,785)	
511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	427,527,513,000	427,628,632,000	34,125,164,395	436,377,059,312	(271,133,751)	436,105,925,561	102,05	(8,748,427,312)	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	135,147,212,000	135,190,626,000	10,994,074,587	138,332,326,240	(42,726,812)	138,289,599,428	102,32	(3,141,700,240)	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	104,461,418,000	104,719,977,000	7,389,931,140	97,178,408,555	(132,534,291)	97,045,874,264	92,80	7,541,568,445	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	743,554,967,000	729,894,768,000	59,158,171,000	736,091,597,762	(905,004,925)	735,186,592,837	100,85	(6,196,829,762)	
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	172,718,560,000	172,782,145,000	11,203,740,999	137,657,505,516	(20,621,102)	137,636,884,414	79,67	35,124,639,484	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	313,973,140,000	314,626,981,000	33,061,833,533	440,963,372,535	(142,781,972)	440,820,590,563	140,15	(126,336,391,535)	
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,282,656,661,000	1,338,582,009,000	226,308,710,087	1,059,710,684,095	(929,702,600)	1,058,780,981,495	79,17	278,871,324,905	
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	0	942,000,000	0	0	0	0	0,00	942,000,000	
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	3,073,550,000	3,071,405,000	228,150,000	2,782,143,000	(2,200,000)	2,779,943,000	90,58	289,262,000	
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi	5,676,000,000	2,120,000,000	243,659,100	1,955,536,300	0	1,955,536,300	92,24	164,463,700	
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	14,123,030,000	14,118,330,000	1,170,695,000	13,853,080,000	(1,725,000)	13,851,355,000	98,12	265,250,000	
511142	Belanja Tunj. Resstitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	0	0	0	0	(225,000)	(225,000)	0,00	0	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 11
Prog.id : lu_lrab11b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	101,068,400	971,143,900	307,865,124	5,878,981,294	0	5,878,981,294	605.37	(4,907,837,394)	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	133,959,717,000	135,351,290,000	14,000,933,400	185,299,885,840	(3,784,883,388)	181,515,002,452	136.90	(49,948,595,840)	
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	2,189,237,776,800	2,632,898,453,000	894,982,758,155	2,268,618,088,652	(1,041,241,432)	2,267,576,847,220	86.16	364,280,364,348	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	139,052,799,000	139,700,970,000	21,447,419,500	118,400,868,540	(38,750,065)	118,362,108,475	84.75	21,300,111,460	
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	32,051,010,000	33,046,348,000	4,607,958,100	27,417,700,796	(5,294,900)	27,412,405,896	82.97	5,628,647,204	
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	8,206,750,000	691,975,522,000	112,584,259,200	461,531,088,800	(2,657,778,978)	458,873,309,822	66.70	230,444,433,200	
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri	0	0	0	0	(634,291)	(634,291)	0.00	0	
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri	0	0	0	0	(93,500)	(93,500)	0.00	0	
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI	430,000,000	405,000,000	0	0	0	0	0.00	405,000,000	
5112	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,248,844,636,800	12,361,847,359,000	1,900,332,596,424	12,144,328,812,934	(11,843,796,053)	12,132,485,016,881	98.24	217,518,546,066	
511211	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0	0	(11,173,981)	(11,173,981)	0.00	0	
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	0	0	0	(11,173,981)	(11,173,981)	0.00	0	
5115	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	0	0	0	0	(11,173,981)	(11,173,981)	0.00	0	
511511	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0	(1,400,200)	(1,400,200)	0.00	0	
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	0	0	0	(1,400,200)	(1,400,200)	0.00	0	
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0	(10,500,000)	(10,500,000)	0.00	0	
511519	Belanja Tunjangan Lainnya	0	0	0	0	(6,093,727)	(6,093,727)	0.00	0	
5121	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	0	0	0	(17,993,927)	(17,993,927)	0.00	0	
5121	Belanja Honorarium	0	0	0	0	(17,993,927)	(17,993,927)	0.00	0	
512111	Belanja Uang Honor Tetap	241,904,700,000	239,423,731,000	59,870,947,711	200,965,379,437	(724,456,756)	200,240,922,681	83.94	38,458,351,563	
5122	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	241,904,700,000	239,423,731,000	59,870,947,711	200,965,379,437	(724,456,756)	200,240,922,681	83.94	38,458,351,563	
5122	Belanja Lembur	0	0	0	0	(3,841,800)	(3,841,800)	0.00	0	
512211	Belanja uang lembur	40,492,694,000	41,708,762,000	9,656,578,060	35,376,082,810	(3,841,800)	35,372,241,010	84.82	6,332,679,190	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 12
Prog.id : lu_lrab11b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5123	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	40.492.694,000	41.708.762,000	9.656.578,060	35.376.082,810	(3.841,800)	35.372.241,010	84,82	6.332.679,190	
	Belanja Vakasi									
512311	Belanja Vakasi	194.971.291,000	202.413.470,000	35.542.981,996	182.911.613,695	(208.446,350)	182.703.167,345	90,37	19.501.856,305	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5123	194.971.291,000	202.413.470,000	35.542.981,996	182.911.613,695	(208.446,350)	182.703.167,345	90,37	19.501.856,305	
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit									
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)	0	-247.920,000	0	0	0	0	0,00	(247.920,000)	
512412	Belanja Pegawai Transit	749.477.464,000	31.822.487,000	0	0	(12.080,000)	(12.080,000)	0,00	31.822.487,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	749.477.464,000	31.574.567,000	0	0	(12.080,000)	(12.080,000)	0,00	31.574.567,000	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12.475.690.785,800	12.876.967.889,000	2.005.403.104,191	12.563.581.888,876	(12.821.788,867)	12.550.760.100,009	97,57	313.386.000,124	
52	BELANJA BARANG									
5211	Belanja Barang Operasional									
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	209.712.656,100	213.419.764,500	34.913.097,002	197.429.211,655	(308.380,849)	197.120.830,806	92,51	15.990.552,845	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan	3.922.977,000	4.688.833,000	1.049.688,225	4.396.972,875	0	4.396.972,875	93,78	291.860,125	
521113	Belanja penambahan daya tahan tubuh	210.400,000	142.155,000	49.733,000	131.241,250	0	131.241,250	92,32	10.913,750	
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	6.024.178,000	5.597.538,000	1.433.347,233	3.760.591,990	(2.500,000)	3.758.091,990	67,18	1.836.946,010	
521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	89.553.662,900	91.862.219,900	24.155.328,604	87.859.524,725	(195.590,000)	87.663.934,725	95,64	4.002.695,175	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	695.870.112,000	641.580.554,400	105.067.172,596	592.630.554,616	(549.533,715)	592.081.020,901	92,37	48.949.999,784	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1.005.293.986,000	957.291.064,800	166.688.366,660	886.208.097,111	(1.056.004,564)	885.152.092,547	92,57	71.082.967,689	
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521211	Belanja Bahan	463.328.098,200	541.952.342,473	107.551.703,656	487.793.484,374	(339.357,145)	487.454.127,229	90,01	54.158.858,099	
521212	Belanja Barang Transit	0	0	0	4.180,000	(830,000)	3.350,000	0,00	(4.180,000)	
521213	Honor Terkait Output Kegiatan	347.305.550,325	444.467.613,668	101.138.029,448	427.291.319,257	(377.598,227)	426.913.721,030	96,14	17.176.294,411	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.067.388.124,475	1.278.114.897,059	284.689.642,709	991.591.693,631	(1.320.700,160)	990.270.993,471	77,58	286.523.203,428	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 14
Prog.id : lu_lrab11b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGENBALIAN S/D BULAN INI			JUMLAH NETO S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri	68.585.980,000	70.067.803,000	351.647,480	67.282.093,446	(366,712,750)	66.915,380,696	96,02	2,785,709,554
524219	Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri	8.308.246,000	6.506.353,000	1.350.923,104	5.633.681,534	(5,185,300)	5.628,496,234	86,59	872,671,466
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	76.894,226,000	76.574,156,000	1,702,570,584	72,915,774,980	(371,898,050)	72,543,876,930	95,22	3,658,381,020
5251	Belanja Barang BLU								
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	123.205.784,000	133.067.773,000	51.986.437,809	123.237,107,666	0	123,237,107,666	92,61	9,830,665,334
525112	Belanja Barang	38.657,962,000	62,477,306,000	27,354,540,069	54,720,803,406	0	54,720,803,406	87,59	7,756,502,594
525113	Belanja Jasa	9,579,110,000	13,543,505,000	6,594,323,289	10,893,460,939	0	10,893,460,939	80,43	2,650,044,061
525114	Belanja Pemeliharaan	8,493,084,000	12,025,346,000	5,319,907,562	9,200,170,214	0	9,200,170,214	76,51	2,825,175,786
525115	Belanja Perjalanan	14,134,579,000	25,282,444,000	9,454,380,856	20,619,545,210	0	20,619,545,210	81,56	4,662,898,790
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	75,197,392,000	86,242,980,000	29,101,624,668	78,000,701,145	0	78,000,701,145	90,44	8,242,278,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	269,267,911,000	332,639,354,000	129,811,214,253	296,671,788,580	0	296,671,788,580	89,19	35,967,566,420
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,650,142,700,000	5,226,849,026,000	1,012,945,842,550	4,594,721,341,928	(11,203,931,698)	4,583,517,410,230	87,91	632,127,684,072
53	BELANJA MODAL								
5311	Belanja Modal Tanah								
531111	Belanja Modal Tanah	95,326,759,000	303,307,950,000	153,036,256,776	252,410,875,445	0	252,410,875,445	83,22	50,897,074,555
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000	0	410,000,000	100,00	0
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	79,425,000	149,825,000	100,500,000	109,925,000	0	109,925,000	73,37	39,900,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	727,500,000	2,073,406,000	721,906,710	1,217,860,419	0	1,217,860,419	58,74	855,545,581
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	922,905,000	4,690,904,000	3,027,391,750	4,548,749,450	0	4,548,749,450	96,97	142,154,550
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	5,250,000	86,195,000	23,195,000	34,501,300	(11,306,300)	23,195,000	40,03	51,693,700
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	47,500,000	48,000,000	37,500,000	45,000,000	0	45,000,000	93,75	3,000,000
531121	Belanja Penambahan Nilai Tanah	698,208,000	1,070,893,000	315,107,360	1,000,870,600	0	1,000,870,600	93,46	70,022,400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 15
Prog.id : lu_rabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA						% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	98.217.547,000	311.837.173,000	157.261.857,616	259.777.782,214	(11.306,300)	259.766.475,914	83,31	52.059.390,786		
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.507.921,000	562.144.891,000	186.916.759,752	496.504.981,632	(222.639,685)	496.282.341,947	88,32	65.639.909,368		
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	204.235,000	231.610,000	29.459,500	190.479,000	0	190.479,000	82,24	41.131,000		
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	18.685,000	26.310,000	6.168,500	23.188,500	0	23.188,500	88,14	3.121,500		
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	150.100,000	349.500,000	248.500,000	345.400,000	0	345.400,000	98,83	4.100,000		
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	60.000,000	346.100,000	280.999,000	293.348,000	0	293.348,000	84,76	52.752,000		
532118	Belanja Modal Perijanaan Peralatan dan Mesin	300,000	1.300,000	0	0	0	0	0,00	1.300,000		
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	810.544,000	868.429,000	254.110,000	751.648,075	(500,000)	751.148,075	86,55	116.780,925		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	308.751.785,000	563.968.140,000	187.735.996,752	498.109.045,207	(223.139,685)	497.885.905,522	88,32	65.859.094,793		
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.110.407.803,000	1.517.519.997,500	425.722.232,187	1.117.592.817,151	(419.261,408)	1.117.173.555,743	73,65	399.927.180,349		
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	8.500,000	114.489,000	94.610,300	104.664,800	0	104.664,800	91,42	9.824,200		
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	647.646,000	1.242.331,000	553.922,000	928.632,500	0	928.632,500	74,75	313.698,500		
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	3.527.679,000	7.213.718,500	2.412.124,850	7.223.549,000	0	7.223.549,000	100,14	(9.830,500)		
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	3.500,000	93.500,000	75.000,000	75.000,000	0	75.000,000	80,21	18.500,000		
533118	Belanja Modal Perijanaan Gedung dan Bangunan	28.150,000	54.351,000	8.060,000	46.870,000	0	46.870,000	86,24	7.481,000		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	593.147.770,000	775.238.400,237	207.548.118,120	759.704.518,621	(43.808,695)	759.660.709,926	98,00	15.533.881,616		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1.707.771.048,000	2.301.476.787,237	636.414.067,457	1.885.676.052,072	(463.070,103)	1.885.212.981,969	81,93	415.800.735,165		
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan										
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.148.358,000	14.489.144,000	6.820.944,280	13.862.798,800	0	13.862.798,800	95,68	626.345,200		
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	2.750,000	17.315,000	2.242,250	3.563,750	0	3.563,750	20,58	13.751,250		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 16
Prog.id : lu_lrab11b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	49,776,000	74,111,000	44,150,000	64,827,000	0	64,827,000	87.47	9,284,000	
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	93,707,000	328,507,000	90,870,000	317,061,000	0	317,061,000	96.52	11,446,000	
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00	2,000,000	
534121	Belanja Modal Irigasi	382,220,000	716,950,000	38,397,000	709,407,000	0	709,407,000	98.95	7,543,000	
534131	Belanja Modal Jaringan	6,476,301,000	7,589,345,000	3,453,989,400	7,246,375,800	(6,518,100)	7,239,857,700	95.48	342,969,200	
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	54,080,000	57,080,000	0	49,060,000	0	49,060,000	85.95	8,020,000	
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	10,120,000	10,120,000	10,120,000	0	10,120,000	100.00	0	
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0	26,999,000	13,541,750	26,925,000	0	26,925,000	99.73	74,000	
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan	0	1,000,000	0	0	0	0	0.00	1,000,000	
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	230,000,000	828,825,000	540,467,000	805,291,000	0	805,291,000	97.16	23,534,000	
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	375,000,000	601,325,000	45,075,000	582,728,000	0	582,728,000	96.91	18,597,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	9,812,192,000	24,742,721,000	11,059,796,680	23,678,157,350	(6,518,100)	23,671,639,250	95.70	1,064,563,650	
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya									
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	53,662,639,000	60,893,745,000	27,451,866,023	55,506,027,056	(83,222,339)	55,422,804,717	91.15	5,387,717,944	
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya	0	525,518,000	299,600,000	522,667,500	0	522,667,500	99.46	2,850,500	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	53,662,639,000	61,419,263,000	27,751,466,023	56,028,694,556	(83,222,339)	55,945,472,217	91.22	5,390,568,444	
5371	Belanja Modal BLU									
537111	Belanja Modal Tanah	3,720,050,000	6,309,298,000	5,316,678,000	5,316,678,000	0	5,316,678,000	84.27	992,620,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,374,403,000	32,010,507,000	14,763,780,605	27,170,440,861	0	27,170,440,861	84.88	4,840,066,139	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,202,298,000	9,793,797,000	4,848,425,160	7,361,084,860	0	7,361,084,860	75.16	2,432,712,140	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,000,000	118,254,000	71,280,000	91,268,000	0	91,268,000	77.18	26,986,000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	5,469,571,000	9,281,300,000	6,817,225,493	8,330,685,303	0	8,330,685,303	89.95	930,614,697	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB.01
Tanggal : 05 Mei 2011
Halaman : 17
Prog.id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	34.787.322.000	57.493.156.000	31.817.389.258	48.270.157.024	0	48.270.157.024	83.96	9.222.998.976	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2.213.002.533.000	3.320.937.240.237	1.052.040.573.786	2.771.539.888.423	(787.256.527)	2.770.752.631.896	83.46	549.397.351.814	
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL									
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial									
57111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.557.488.000	6.557.488.000	0	6.148.987.500	0	6.148.987.500	93.77	408.500.500	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5711	6.557.488.000	6.557.488.000	0	6.148.987.500	0	6.148.987.500	93.77	408.500.500	
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan									
572111	Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru	5.720.754.636.000	7.877.167.894.500	1.924.509.369.067	6.805.251.816.502	(13.876.233.982)	6.791.375.582.520	86.39	1.071.916.077.998	
572112	Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	4.165.000.000	4.492.000.000	80.000.000	4.396.000.000	0	4.396.000.000	97.86	96.000.000	
572113	Belanja Bantuan Beasiswa	967.645.558.000	1.081.063.027.500	225.737.662.089	1.070.440.454.051	(297.228.800)	1.070.143.225.251	99.02	10.622.573.449	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5721	6.692.565.194.000	8.962.722.922.000	2.150.327.031.156	7.880.088.270.553	(14.173.462.782)	7.865.914.807.771	87.92	1.082.634.651.447	
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan									
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	78.218.281.000	80.152.281.000	9.345.223.000	79.943.902.400	(22.500.000)	79.921.402.400	99.74	208.378.600	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5722	78.218.281.000	80.152.281.000	9.345.223.000	79.943.902.400	(22.500.000)	79.921.402.400	99.74	208.378.600	
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya									
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	126.930.242.000	153.225.822.000	32.337.903.250	151.122.639.300	(72.265.290)	151.050.374.010	98.63	2.103.182.700	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	126.930.242.000	153.225.822.000	32.337.903.250	151.122.639.300	(72.265.290)	151.050.374.010	98.63	2.103.182.700	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	6.904.271.205.000	9.202.658.513.000	2.192.010.157.406	8.117.303.799.753	(14.268.228.072)	8.103.035.571.681	88.21	1.085.354.713.247	
	JUMLAH BELANJA	27.243.107.223.800	30.627.412.668.237	6.262.399.677.933	28.047.146.918.980	(39.081.205.164)	28.008.065.713.816	91.58	2.580.265.749.257	



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01d
Tanggal : 06 Mei 2011
Halaman : 1
Prog.id : lu_lrabif5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKHTISAR MENURUT PROGRAM								
	FUNGSI TIDAK ADA								
	SUB FUNGSI INI TIDAK ADA program ini tidak ada	0	0	0	0	(4,050,000)	(4,050,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI	0	0	0	0	(4,050,000)	(4,050,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI	0	0	0	0	(4,050,000)	(4,050,000)	0.00	0
00	FUNGSI TIDAK ADA								
	SUB FUNGSI INI TIDAK ADA program ini tidak ada	0	0	0	0	(7,250,000)	(7,250,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 00.	0	0	0	0	(7,250,000)	(7,250,000)	0.00	0
00	SUB FUNGSI INI TIDAK ADA								
000	program ini tidak ada	0	0	0	0	(14,325,000)	(14,325,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 00.00	0	0	0	0	(14,325,000)	(14,325,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 00	0	0	0	0	(21,575,000)	(21,575,000)	0.00	0
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
101	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	0	0	0	0	(42,039,233)	(42,039,233)	0.00	0
109	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	2,321,053,702,000	2,318,545,322,000	286,801,797,514	2,429,895,317,718	(2,458,732,546)	2,427,436,585,172	104.80	(111,349,995,718)
110	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	4,000,000,000	4,000,000,000	790,001,850	3,636,765,550	(68,775,766)	3,567,989,784	90.92	363,234,450
112	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	2,500,000,000	2,500,000,000	271,120,000	2,132,766,442	0	2,132,766,442	85.31	367,233,558

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01d
Tanggal : 06 Mei 2011
Halaman : 2
Prog.id : lu_lrabif5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	17,896,800,000	17,896,800,000	2,475,021,535	15,545,605,480	(25,381,500)	15,520,223,980	86.86	2,351,194,520
115	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	28,500,000,000	28,500,000,000	6,856,766,100	27,752,464,865	(134,293,700)	27,618,171,165	97.38	747,535,135
117	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	94,994,400,000	94,994,400,000	12,698,807,713	92,934,935,134	(23,480,802)	92,911,454,332	97.83	2,059,464,866
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	2,468,944,902,000	2,466,436,522,000	309,893,514,712	2,571,897,855,189	(2,752,703,547)	2,569,145,151,642	104.28	(105,461,333,189)
02	BANTUAN LUAR NEGERI								
201	program ini tidak ada	0	0	0	0	(3,037,895)	(3,037,895)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.02	0	0	0	0	(3,037,895)	(3,037,895)	0.00	0
03	PELAYANAN UMUM								
301	PROGRAM KESERASIAN KEBUJUKAN KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	(123,719,800)	(123,719,800)	0.00	0
303	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0	0	0	0	(36,065,000)	(36,065,000)	0.00	0
308	program ini tidak ada	0	0	0	0	(191,644,600)	(191,644,600)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03	0	0	0	0	(351,429,400)	(351,429,400)	0.00	0
07	LITBANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN								
7	program ini tidak ada	0	0	0	0	(10,800,000)	(10,800,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.07	0	0	0	0	(10,800,000)	(10,800,000)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	2,468,944,902,000	2,466,436,522,000	309,893,514,712	2,571,897,855,189	(3,117,970,842)	2,568,779,884,347	104.28	(105,461,333,189)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA								
02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
202	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA	700,000,000	700,000,000	36,300,000	700,000,000	(2,064,700)	697,935,300	100.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 08.02	700,000,000	700,000,000	36,300,000	700,000,000	(2,064,700)	697,935,300	100.00	0
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 08	700,000,000	700,000,000	36,300,000	700,000,000	(2,064,700)	697,935,300	100.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

Kode Lap. : LRBKB 01d
Tanggal : 06 Mei 2011
Halaman : 3
Prog.id : lu_irabi5b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	AGAMA								
01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA								
101	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	685.530.200,000	715.600.200,000	136.915.341,869	660.599.627,876	(1.764.999,309)	658.834.628,567	92.31	55,000,572,124
102	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	124.334.800,000	124.334.800,000	46.462,056,246	122.509,906,206	(124.894,090)	122.384,012,116	98.53	1,825,893,794
109	program ini tidak ada	0	0	0	0	(24,778,406)	(24,778,406)	0.00	0
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.01	809,865,000,000	839,935,000,000	185,377,398,115	783,108,534,082	(1,914,671,805)	781,193,862,277	93.23	56,826,465,918
02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA								
201	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	30,050,000,000	30,500,000,000	7,003,947,502	29,545,381,549	(96,940,000)	29,448,441,549	96.87	954,618,451
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.02	30,050,000,000	30,500,000,000	7,003,947,502	29,545,381,549	(96,940,000)	29,448,441,549	96.87	954,618,451
03	LITBANG AGAMA								
301	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	33,033,700,000	33,033,700,000	4,800,670,250	28,739,392,607	(30,439,950)	28,708,952,657	87.00	4,294,307,393
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.03	33,033,700,000	33,033,700,000	4,800,670,250	28,739,392,607	(30,439,950)	28,708,952,657	87.00	4,294,307,393
90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA								
001	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	39,607,000,000	39,607,000,000	4,758,288,000	39,444,938,000	(15,042,200)	39,429,895,800	99.59	162,062,000
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 09.90	39,607,000,000	39,607,000,000	4,758,288,000	39,444,938,000	(15,042,200)	39,429,895,800	99.59	162,062,000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 09	912,555,700,000	943,075,700,000	201,940,303,867	880,838,246,238	(2,057,093,955)	878,781,152,283	93.40	62,237,453,762
10	PENDIDIKAN								
01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								
101	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	45,271,400,000	45,271,400,000	2,599,536,225	44,883,784,875	(27,845,900)	44,855,938,975	99.14	387,615,125
103	program ini tidak ada	0	0	0	0	(200,000)	(200,000)	0.00	0
109	program ini tidak ada	0	0	0	0	(6,555,000)	(6,555,000)	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01d
Tanggal : 06 Mei 2011
Halaman : 4
Prog.id : lu_lrab5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.01	45,271,400,000	45,271,400,000	2,599,536,225	44,883,784,875	(34,600,900)	44,849,183,975	99.14	387,615,125
201	PENDIDIKAN DASAR								
	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	5,747,905,840,000	6,468,817,598,237	1,012,089,570,110	5,880,497,102,740	(11,068,978,470)	5,869,428,124,270	90.91	588,320,495,497
203	program ini tidak ada	0	0	0	0	(184,270,500)	(184,270,500)	0.00	0
03	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.02	5,747,905,840,000	6,468,817,598,237	1,012,089,570,110	5,880,497,102,740	(11,253,248,970)	5,869,243,853,770	90.91	588,320,495,497
301	PENDIDIKAN MENENGAH								
	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1,089,836,000,000	1,954,870,992,000	561,196,117,952	1,594,947,668,964	(1,812,362,809)	1,593,135,306,155	81.59	359,923,323,036
04	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.03	1,089,836,000,000	1,954,870,992,000	561,196,117,952	1,594,947,668,964	(1,812,362,809)	1,593,135,306,155	81.59	359,923,323,036
401	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL								
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	48,306,700,000	73,106,700,000	9,914,621,550	65,184,921,800	(39,255,200)	65,145,666,600	89.16	7,921,778,200
06	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.04	48,306,700,000	73,106,700,000	9,914,621,550	65,184,921,800	(39,255,200)	65,145,666,600	89.16	7,921,778,200
601	PENDIDIKAN TINGGI								
	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1,766,007,300,000	2,753,559,722,000	885,356,985,583	2,213,877,499,451	(1,162,112,114)	2,212,715,387,337	80.40	539,682,222,549
603	program ini tidak ada	0	0	0	0	(52,095,096)	(52,095,096)	0.00	0
07	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.06	1,766,007,300,000	2,753,559,722,000	885,356,985,583	2,213,877,499,451	(1,214,207,210)	2,212,663,292,241	80.40	539,682,222,549
7	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN								
	program ini tidak ada	0	0	0	0	(841,500)	(841,500)	0.00	0
701	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,384,529,035,000	3,499,815,335,000	1,215,240,615,110	2,935,253,295,584	(3,431,969,929)	2,931,821,325,655	83.87	564,562,039,416
702	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	(121,494,400)	(121,494,400)	0.00	0
703	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	11,236,801,763,800	11,647,690,239,000	1,919,225,819,028	11,128,507,284,838	(13,292,434,282)	11,115,214,850,556	95.54	519,182,964,162
7031	program ini tidak ada	0	90,000,000	0	0	0	0	0.00	90,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01d
Tanggal : 06 Mei 2011
Halaman : 5
Prog.id : lu_lrab5b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 DEPARTEMEN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
708	program ini tidak ada	0	0	0	0	(4,755,500)	(4,755,500)	0.00	0	
709	program ini tidak ada	0	0	0	0	(877,350)	(877,350)	0.00	0	
710	program ini tidak ada	0	117,240,000	0	0	0	0	0.00	117,240,000	
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.07	14,621,330,798,800	15,147,712,814,000	3,134,466,434,138	14,063,760,580,422	(16,852,372,961)	14,046,908,207,461	92.84	1,083,952,233,578	
08	PEMBINAAN KEAGAMAAN									
801	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	539,928,563,000	771,541,220,000	144,274,098,796	728,318,938,845	(2,565,634,617)	725,753,302,228	94.40	43,222,283,155	
809	program ini tidak ada	0	0	0	0	(96,768,000)	(96,768,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 10.08	539,928,563,000	771,541,220,000	144,274,098,796	728,318,938,845	(2,662,402,617)	725,656,534,228	94.40	43,222,283,155	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	23,858,586,621,800	27,214,880,446,237	5,749,897,364,354	24,591,470,495,097	(33,868,450,667)	24,557,602,044,430	90.36	2,623,409,951,140	
11	KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL									
05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
501	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	2,320,000,000	2,320,000,000	632,195,000	2,240,322,456	0	2,240,322,456	96.57	79,677,544	
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 11.05	2,320,000,000	2,320,000,000	632,195,000	2,240,322,456	0	2,240,322,456	96.57	79,677,544	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 11	2,320,000,000	2,320,000,000	632,195,000	2,240,322,456	0	2,240,322,456	96.57	79,677,544	
87	FUNGSI TIDAK ADA									
	SUB FUNGSI INI TIDAK ADA									
	program ini tidak ada	0	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 87.	0	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 87	0	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0.00	0	
	JUMLAH BELANJA	27,243,107,223,800	30,627,412,668,237	6,262,399,677,933	28,047,146,918,980	(39,081,205,164)	28,008,065,713,816	91.58	2,580,265,749,257	



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINCIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA BASIS AKRUAL

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009

No	Satuan Kerja	Mursi, KP dan KGB	Gaji CPNS	Gaji ke-13	Gaji (Terusm, Rapel, Susulan, Pembulatan & Kekurangan)	Utang Belanja Pegawai					Utang Belanja Barang				Retensi atas Pemeliharaan	Jumlah Utang Belanja Modal	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	Jumlah Utang Belanja Sosial	Jumlah
						Tunjangan Beras	Tunjangan Makan	Tunjangan Tambahan Guru PNS	Uang Duka Waif	Tunjangan Profesi	Uang Lembur	Tunjangan Pegawai Non PNS	Jumlah Utang Belanja Pegawai Telepon & Air Listrik,	Internet					
I ESION 1																			
1	Sekretariat Jenderal																		
2	Inspektoral Jenderal																		
3	Direktorat Jenderal Bimas Islam																		
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam																		
5	Direktorat Jenderal Bimas Kristen																		
6	Direktorat Jenderal Bimas Katolik																		
7	Direktorat Jenderal Bimas Hindu																		
8	Direktorat Jenderal Bimas Buddha																		
9	Direktorat Jenderal PHU																		
10	Badan Litbang dan Diklat																		
II Kantor Wilayah																			
1	DKI Jakarta	198.149.114	1.844.831.091	11.994.800	854.171.898	43.040.000	49.727.160	14.450.000	939.469.500	7.766.200	39.810.360.073	42.690.271.659	37.164.200	595.154.777	6.707.000	0	0	0	3.275.091.977
2	Jawa Barat																		4.598.820.065
3	Jawa Tengah																		21.075.984.641
4	DI Yogyakarta																		4.840.899.518
5	Jawa Timur																		4.840.899.518
6	Aceh																		32.578.500.000
7	Sumatera Utara																		174.483.086.318
8	Sumatera Barat																		1.309.832.928
9	Riau																		42.717.077.768
10	Lampung																		2.355.512.192
11	Sulawesi Selatan																		9.565.884.122
12	Lampung																		2.569.095.465
13	Kalimantan Barat																		7.074.823.230
14	Kalimantan Tengah																		1.127.786.932
15	Kalimantan Selatan																		3.851.198.626
16	Kalimantan Timur																		210.215.834
17	Sulawesi Utara																		562.991.529
18	Sulawesi Tengah																		3.187.787.014
19	Sulawesi Selatan																		583.568.434
20	Sulawesi Tenggara																		174.343.807
21	Maluku																		97.195.959
22	Bali																		1.951.026.867
23	NTB																		22.050.594.939
24	NTT																		1.336.147
25	Papua																		358.715.938
26	Bengkulu																		236.134.020
27	Maluku Utara																		36.010.749
28	Banten																		221.360.880
29	Bangka Belitung																		1.024.555.072
30	Gorontalo																		133.276.941
31	Ken. Riau																		1.078.948.741
32	LIU																		0
33	Sulawesi Barat																		0
Jumlah		4.100.669.990	1.418.757.225	4.700.302	20.951.957.021	2.914.758.068	153.102.040.382	323.420.000	3.178.283.340	110.117.718	78.403.080.108	31.724.650	6.812.900	57.126.734	6.707.000	0	0	0	326.826.420.853

(dalam rupiah)



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

DATA INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA BASIS AKRUAL

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010**

(Dalam rupiah)

No.	Kode Akun	Pendapatan & Belanja Uraian	LRA Basis Kas Rp		: 025 - Kementerian Agama Penyesuaian Akrua		Informasi Akrua	Dokumen Sumber
			DR	CR	DR	CR		
A	42	PNBP	702.576.476.771		158.048	677.196.128	703.253.514.851	
	423217	Pendapatan Jasa KUJA	67.548.420.179			31.608.000	67.580.028.179	
	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	2.612.464.281		158.048	54.428	2.612.360.661	
	423511	Pendapatan Uang Pendidikan	138.456.838.877			640.283.700	139.097.122.577	
	423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	15.902.161.727			5.250.000	15.907.411.727	
B	51	Belanja Pegawai	12.563.581.888.876		286.637.203.406		12.850.219.092.282	SK Pegawai
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.011.454.744.912		26.476.083.938		6.037.930.828.850	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional	736.091.597.762		78.403.080.108		814.494.677.870	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	440.963.372.535		153.102.040.382		594.065.412.917	
	511129	Belanja Tunj. Uang Makan PNS	1.059.710.684.095		2.914.758.036		1.062.625.442.131	
	511147	Belanja Uang Duka PNS	5.878.981.294		110.117.718		5.989.099.012	
	511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	461.531.088.800		3.178.283.340		464.709.372.140	
	512111	Belanja Uang Honor Tetap	200.965.379.437		323.420.000		201.288.799.437	
	512211	Belanja Uang Lembur	35.376.082.810		9.004.000		35.385.086.810	
	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	-		7.848.000		7.848.000	
	52	Belanja Barang	4.594.721.341.928		7.604.010.247		4.602.325.352.175	Tagihan
	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	71.846.050.612		7.546.883.513		79.392.934.125	
	522119	Belanja Jasa Lainnya	32.447.819.497		57.126.734		32.504.946.231	
53	Barang Modal	2.771.539.888.423		6.707.000		2.771.546.595.423		
	Retensi atas Pemeliharaan	425.722.232.187		6.707.000		425.728.939.187		
57	Barang Sosial	8.117.303.799.753		32.578.500.000		8.149.882.299.753		
572111	Belanja Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	6.801.617.616.502		32.578.500.000		6.834.196.116.502		

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010**

(Dalam rupiah)

BA (UAPA)	Pendapatan & Belanja		: 025 - Kementerian Agama		Informasi Akreal	Keterangan
	Kode Akun	Uraian	LRA Basis Kas Rp	Penyesuaian Akreal		
No.				DR	CR	
A		Pendapatan Diterima Dimuka			2.962.989.081	2.962.989.081
		Sekretariat Jenderal	471.645.441	174.434.654	341.349.365	638.560.152
		Inspektorat Jenderal			565.100	565.100
		DKI Jakarta			2.147.282.283	2.147.282.283
		Jawa Barat	560.000		255.000.000	255.560.000
		Jawa Tengah			6.583.333	6.583.333
		DIY			80.000.000	80.000.000
		Jambi			10.209.000	10.209.000
		Banten			122.000.000	122.000.000



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINCIAN AKUN-AKUN ASET

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	932,349,260
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	100,000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	284,431,150	(566,228,968)
2	0200	Jawa Barat	304,367,158	98,551,546
3	0300	Jawa Tengah	106,045,385	124,995,837
4	0400	DI. Yogyakarta	3,221,150	5,297,630
5	0500	Jawa Timur	149,909,366	146,110,322
6	0600	Aceh	321,991,396	49,150,969
7	0700	Sumatera Utara	1,207,627,372	131,496,169
8	0800	Sumatera Barat	127,091,441	360,095,495
9	0900	Riau	145,914,384	99,086,519
10	1000	Jambi	183,463,743	339,000,069
11	1100	Sumatera Selatan	32,320,450	14,589,490
12	1200	Lampung	490,402,075	30,008,440
13	1300	Kalimantan Barat	79,457,683	31,772,509
14	1400	Kalimantan Tengah	31,009,450	10,875,893
15	1500	Kalimantan Selatan	146,057,196	100,176,793
16	1600	Kalimantan Timur	1,205,196	74,362,500
17	1700	Sulawesi Utara	201,196,309	61,514,838
18	1800	Sulawesi Tengah	174,188,933	73,492,904
19	1900	Sulawesi Selatan	83,576,450	87,069,155
20	2000	Sulawesi Tenggara	39,038,965	-
21	2100	Maluku	205,902,353	119,587,500
22	2200	Bali	5,921,536	53,943,504
23	2300	Nusa Tenggara Barat	195,366,849	77,099,678
24	2400	Nusa Tenggara Timur	360,958,246	19,972,081
25	2500	Papua	30,819,300	64
26	2600	Bengkulu	73,574,832	53,539,780
27	2800	Maluku Utara	12,458,500	36,658,400
28	2900	Banten	67,523,674	97,313,134
29	3000	Bangka Belitung	15,533,188	11,225,852
30	3100	Gorontalo	11,634,241	3,300,000
31	3200	Kepulauan Riau	61,696,050	66,944,468
32	3300	Papua Barat	1,378,091	75,390,184
33	3400	Sulawesi Barat	2,728,800	35,693,400
34	5000	Atase Haji	4,565,637,000	68,281,996
JUMLAH			9,723,647,912	2,922,817,411

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	4,860,000	15,930,000
2	0200	Jawa Barat	155,229,337	330,477,795
3	0300	Jawa Tengah	717,270,824	1,294,239,746
4	0400	DI. Yogyakarta	-	4,470,000
5	0500	Jawa Timur	69,432,451	33,573,973
6	0600	Aceh	479,399,686	2,670,000
7	0700	Sumatera Utara	82,219,307	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	10,730,439	20,919,000
10	1000	Jambi	3,540,692	3,200,739,452
11	1100	Sumatera Selatan	42,425,664	-
12	1200	Lampung	52,347,280	3,642,368
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	258,588,000	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	15,516,567
17	1700	Sulawesi Utara	300,000	14,924,784
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	21,385,545	201,496,651
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	802,917,825	6,960,000
22	2200	Bali	-	1,728,500
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	184,783,014
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	2,743,480	73,759,253
26	2600	Bengkulu	14,050,000	155,412
27	2800	Maluku Utara	1,000,000	-
28	2900	Banten	17,915,000	1,684,678
29	3000	Bangka Belitung	4,380,000	-
30	3100	Gorontalo	186,113,700	-
31	3200	Kepulauan Riau	5,100,000	37,440,000
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			2,931,949,230	5,445,111,193

KAS LAINNYA SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2008

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	112,600,000	1,787,833,198
3	03	Ditjen Bimas Islam	200,529,920	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	770,459,054	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	107,848,844
6	06	Ditjen Bimas Katolik	9,499,000	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	853,000	44,655,000
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	506,424,365	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	13,749,890	681,977,269
2	0200	Jawa Barat	172,801,687	31,442,528
3	0300	Jawa Tengah	1,653,087,941	12,647,570
4	0400	DI. Yogyakarta	3,123,948,015	284,884,404
5	0500	Jawa Timur	3,239,251,091	9,276,121,946
6	0600	Aceh	85,440,500	126,374,283
7	0700	Sumatera Utara	293,114,568	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	42,049,877	-
10	1000	Jambi	12,631,714	399,815,393
11	1100	Sumatera Selatan	333,231,298	109,600
12	1200	Lampung	119,319,970	-
13	1300	Kalimantan Barat	13,771	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	8,099,517
16	1600	Kalimantan Timur	13,607,000	5,421,370
17	1700	Sulawesi Utara	2,916,779	5,028,699
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	114,194,956	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	849,138,502
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	3,853,303,477
24	2400	Nusa Tenggara Timur	338,575	326,135
25	2500	Papua	9,550,461	-
26	2600	Bengkulu	7,175	328,825
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	83,629,734	4,227,978
29	3000	Bangka Belitung	52,929	-
30	3100	Gorontalo	2,407,625	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	46,803	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			10,915,757,698	17,479,584,538

KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal		
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam		
4	04	Ditjen Pendidikan Islam		
5	05	Ditjen Bimas Kristen		
6	06	Ditjen Bimas Katolik		
7	07	Ditjen Bimas Hindu		
8	08	Ditjen Bimas Budha		
9	09	Ditjen Haji dan Umroh		
10	11	Badan Litbang		
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	33,621,441,942	
2	0200	Jawa Barat	9,161,588,899	
3	0300	Jawa Tengah	6,210,767,302	
4	0400	DI. Yogyakarta	26,083,384,687	
5	0500	Jawa Timur	16,608,114,829	
6	0600	Aceh	-	
7	0700	Sumatera Utara	2,591,894,308	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	15,457,592,876	
10	1000	Jambi	1,508,967,407	
11	1100	Sumatera Selatan	304,330,638	
12	1200	Lampung	2,625,111,246	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	14,777,513,560	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	-	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	3,286,171,400	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	
33	3400	Sulawesi Barat	-	
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			132,236,879,094	-

PIUTANG BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	7,065,430	
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam		
4	04	Ditjen Pendidikan Islam		
5	05	Ditjen Bimas Kristen		
6	06	Ditjen Bimas Katolik		
7	07	Ditjen Bimas Hindu		
8	08	Ditjen Bimas Budha		
9	09	Ditjen Haji dan Umroh		
10	11	Badan Litbang		
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	3,095,166	
2	0200	Jawa Barat	-	
3	0300	Jawa Tengah	598,900,000	
4	0400	DI. Yogyakarta	-	
5	0500	Jawa Timur	2,000,000	
6	0600	Aceh	2,790,000	
7	0700	Sumatera Utara	50,557,600	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	-	
10	1000	Jambi	504,470,000	
11	1100	Sumatera Selatan	727,056	
12	1200	Lampung	156,400,000	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	-	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	227,340,000	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	21,417,874	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	41,637,061	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	
33	3400	Sulawesi Barat	-	
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			1,616,400,187	-

BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal		
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam		
4	04	Ditjen Pendidikan Islam		
5	05	Ditjen Bimas Kristen		
6	06	Ditjen Bimas Katolik		
7	07	Ditjen Bimas Hindu		
8	08	Ditjen Bimas Budha		
9	09	Ditjen Haji dan Umroh		
10	11	Badan Litbang		
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta		
2	0200	Jawa Barat		
3	0300	Jawa Tengah		
4	0400	DI. Yogyakarta		
5	0500	Jawa Timur		
6	0600	Aceh		
7	0700	Sumatera Utara		
8	0800	Sumatera Barat		
9	0900	Riau		
10	1000	Jambi		
11	1100	Sumatera Selatan	-	
12	1200	Lampung	-	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	-	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali		
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	3,000,000	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	
33	3400	Sulawesi Barat	-	
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			3,000,000	-

UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal		
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam		
4	04	Ditjen Pendidikan Islam		
5	05	Ditjen Bimas Kristen		
6	06	Ditjen Bimas Katolik		
7	07	Ditjen Bimas Hindu		
8	08	Ditjen Bimas Budha		
9	09	Ditjen Haji dan Umroh		
10	11	Badan Litbang		
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	361,333	
2	0200	Jawa Barat	1,051,105,000	
3	0300	Jawa Tengah	-	
4	0400	DI. Yogyakarta	-	
5	0500	Jawa Timur	225,207,768	
6	0600	Aceh	1,852,995,833	
7	0700	Sumatera Utara	-	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	469,100,000	
10	1000	Jambi	-	
11	1100	Sumatera Selatan	-	
12	1200	Lampung	-	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	-	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	67,897,325	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	-	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	
33	3400	Sulawesi Barat	-	
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			3,666,667,259	-

**PIUTANG DARI KEGIATAN OPERSIONAL BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal		
2	02	Inspektorat Jenderal	-	
3	03	Ditjen Bimas Islam		
4	04	Ditjen Pendidikan Islam		
5	05	Ditjen Bimas Kristen		
6	06	Ditjen Bimas Katolik		
7	07	Ditjen Bimas Hindu		
8	08	Ditjen Bimas Budha		
9	09	Ditjen Haji dan Umroh		
10	11	Badan Litbang		
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1,124,766,256	
2	0200	Jawa Barat	1,456,250,000	
3	0300	Jawa Tengah	-	
4	0400	DI. Yogyakarta	33,749,858	
5	0500	Jawa Timur	-	
6	0600	Aceh	-	
7	0700	Sumatera Utara	-	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	-	
10	1000	Jambi	-	
11	1100	Sumatera Selatan	-	
12	1200	Lampung	-	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	25,597,220	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	-	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten		
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	
33	3400	Sulawesi Barat	-	
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			2,640,363,334	-

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1,751,617,516	1,802,290,537
2	02	Inspektorat Jenderal	523,878,959	316,179,754
3	03	Ditjen Bimas Islam	1,493,773,141	1,278,964,424
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	327,183,500	39,549,500
5	05	Ditjen Bimas Kristen	162,853,911	8,154,500
6	06	Ditjen Bimas Katolik	451,382,688	333,682,573
7	07	Ditjen Bimas Hindu	17,613,503	8,755,531,590
8	08	Ditjen Bimas Budha	91,386,960	11,268,959,910
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	1,068,368,865	275,937,767
10	11	Badan Litbang	514,373,096	108,301,569
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1,691,789,612	657,070,559
2	0200	Jawa Barat	3,241,627,701	3,277,900,419
3	0300	Jawa Tengah	2,935,182,097	2,305,692,457
4	0400	DI. Yogyakarta	1,179,533,512	466,139,365
5	0500	Jawa Timur	2,920,932,932	6,030,012,117
6	0600	Aceh	2,875,405,366	3,050,072,733
7	0700	Sumatera Utara	317,767,436	1,288,865,795
8	0800	Sumatera Barat	1,489,074,658	1,130,184,440
9	0900	Riau	169,873,705	241,189,985
10	1000	Jambi	332,610,264	503,099,834
11	1100	Sumatera Selatan	329,021,741	64,201,975
12	1200	Lampung	456,404,466	352,090,992
13	1300	Kalimantan Barat	93,929,412	148,956,410
14	1400	Kalimantan Tengah	239,246,742	753,253,940
15	1500	Kalimantan Selatan	332,110,327	504,504,988
16	1600	Kalimantan Timur	463,224,417	347,451,564
17	1700	Sulawesi Utara	29,865,605	124,317,776
18	1800	Sulawesi Tengah	209,044,917	106,566,460
19	1900	Sulawesi Selatan	585,570,189	3,149,925,489
20	2000	Sulawesi Tenggara	230,765,938	513,336,000
21	2100	Maluku	174,605,047	283,068,447
22	2200	Bali	273,087,933	294,489,345
23	2300	Nusa Tenggara Barat	745,359,270	629,520,662
24	2400	Nusa Tenggara Timur	315,616,265	156,909,100
25	2500	Papua	91,572,788	74,903,999
26	2600	Bengkulu	242,624,985	401,427,801
27	2800	Maluku Utara	111,235,886	74,048,276
28	2900	Banten	540,076,046	802,466,432
29	3000	Bangka Belitung	112,214,531	570,697,925
30	3100	Gorontalo	231,068,003	854,534,318
31	3200	Kepulauan Riau	202,126,154	500,979,263
32	3300	Papua Barat	77,845,050	1,021,785,500
33	3400	Sulawesi Barat	2,090,000	30,838,481
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			29,644,935,134	54,898,054,971

**PERSEDIAAN BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	656,448,766	-
2	0200	Jawa Barat	24,683,969	-
3	0300	Jawa Tengah	180,752,800	-
4	0400	DI. Yogyakarta	122,193,161	-
5	0500	Jawa Timur	5,054,297,249	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	124,203,753	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	37,108,000	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	296,905,550	-
12	1200	Lampung	304,315,988	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	13,536,120	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	823,029,466	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			7,637,474,822	-

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	651,220,550,000	441,500,950,000
2	02	Inspektorat Jenderal	42,871,914,931	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	2	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	15,778,222,945	15,778,222,945
10	11	Badan Litbang	20,842,500,000	20,842,500,000
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	249,317,466,949	773,493,026,927
2	0200	Jawa Barat	402,833,548,499	642,287,824,107
3	0300	Jawa Tengah	842,317,001,422	1,024,033,761,329
4	0400	DI. Yogyakarta	164,044,454,291	160,843,201,703
5	0500	Jawa Timur	964,139,241,589	1,412,929,814,443
6	0600	Aceh	582,896,706,179	504,192,220,244
7	0700	Sumatera Utara	226,270,470,342	415,592,166,138
8	0800	Sumatera Barat	274,276,634,472	222,354,724,366
9	0900	Riau	180,706,025,054	512,942,298,842
10	1000	Jambi	24,423,592,100	64,380,954,900
11	1100	Sumatera Selatan	146,551,047,427	219,147,986,038
12	1200	Lampung	70,626,043,203	211,990,800,141
13	1300	Kalimantan Barat	148,653,265,793	148,497,294,693
14	1400	Kalimantan Tengah	91,785,344,178	71,250,188,991
15	1500	Kalimantan Selatan	480,561,606,872	474,339,039,873
16	1600	Kalimantan Timur	164,096,384,501	161,444,571,849
17	1700	Sulawesi Utara	39,643,550,900	31,978,682,555
18	1800	Sulawesi Tengah	107,558,292,214	100,650,803,426
19	1900	Sulawesi Selatan	242,523,943,554	239,348,253,520
20	2000	Sulawesi Tenggara	100,366,124,986	99,123,299,986
21	2100	Maluku	63,788,886,155	51,143,672,236
22	2200	Bali	92,037,539,613	90,132,083,750
23	2300	Nusa Tenggara Barat	122,569,349,099	125,348,958,599
24	2400	Nusa Tenggara Timur	62,543,191,981	59,322,530,900
25	2500	Papua	22,792,632,580	15,934,384,000
26	2600	Bengkulu	69,117,768,874	64,316,278,618
27	2800	Maluku Utara	20,426,634,560	18,707,423,560
28	2900	Banten	60,414,822,500	221,665,057,700
29	3000	Bangka Belitung	38,232,140,899	34,518,824,868
30	3100	Gorontalo	28,054,200,000	23,892,611,000
31	3200	Kepulauan Riau	42,068,217,060	39,242,511,810
32	3300	Papua Barat	35,614,550,000	29,413,177,435
33	3400	Sulawesi Barat	22,350,374,150	20,285,374,150
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			6,914,314,239,874	8,762,865,475,642

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	95,006,673,045	67,392,763,331
2	02	Inspektorat Jenderal	21,723,150,165	20,867,914,901
3	03	Ditjen Bimas Islam	20,256,291,541	19,230,149,041
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	34,357,475,787	38,189,051,292
5	05	Ditjen Bimas Kristen	7,201,299,637	6,888,788,732
6	06	Ditjen Bimas Katolik	4,418,494,444	3,767,975,185
7	07	Ditjen Bimas Hindu	4,318,748,267	4,810,764,835
8	08	Ditjen Bimas Budha	8,817,137,772	9,094,847,772
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	38,912,761,649	33,618,612,113
10	11	Badan Litbang	44,304,790,107	39,985,715,305
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	68,931,494,560	165,508,981,083
2	0200	Jawa Barat	101,048,939,912	100,862,959,148
3	0300	Jawa Tengah	162,849,531,339	145,804,774,464
4	0400	DI. Yogyakarta	32,220,568,353	28,284,604,452
5	0500	Jawa Timur	179,339,265,868	211,675,246,128
6	0600	Aceh	123,600,051,519	99,167,357,633
7	0700	Sumatera Utara	58,462,807,901	56,907,829,028
8	0800	Sumatera Barat	104,720,135,686	84,588,562,957
9	0900	Riau	30,739,118,768	112,642,426,707
10	1000	Jambi	53,734,187,188	58,068,168,801
11	1100	Sumatera Selatan	37,224,061,187	45,866,789,929
12	1200	Lampung	38,984,901,137	45,089,785,375
13	1300	Kalimantan Barat	28,574,381,484	74,403,798,010
14	1400	Kalimantan Tengah	53,793,707,180	30,670,806,415
15	1500	Kalimantan Selatan	60,045,017,649	47,644,647,187
16	1600	Kalimantan Timur	34,797,983,494	25,628,135,102
17	1700	Sulawesi Utara	37,140,955,027	25,326,979,154
18	1800	Sulawesi Tengah	34,951,276,257	25,962,183,467
19	1900	Sulawesi Selatan	86,279,072,453	145,720,096,251
20	2000	Sulawesi Tenggara	43,934,304,577	40,244,762,242
21	2100	Maluku	45,385,417,265	32,731,990,982
22	2200	Bali	37,749,172,236	28,789,139,232
23	2300	Nusa Tenggara Barat	42,975,769,858	37,932,995,957
24	2400	Nusa Tenggara Timur	21,305,423,940	16,899,311,128
25	2500	Papua	22,673,938,744	19,815,290,970
26	2600	Bengkulu	44,135,611,836	37,841,615,491
27	2800	Maluku Utara	38,517,312,167	26,119,692,316
28	2900	Banten	35,289,190,495	38,568,422,797
29	3000	Bangka Belitung	30,264,404,317	25,090,590,153
30	3100	Gorontalo	38,343,196,523	33,585,734,833
31	3200	Kepulauan Riau	13,060,823,757	10,398,350,534
32	3300	Papua Barat	12,446,636,250	9,415,429,043
33	3400	Sulawesi Barat	12,781,265,026	9,843,278,312
34	5000	Atase Haji	460,936,580	354,472,344
JUMLAH			2,046,077,682,947	2,141,301,790,132

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	304,214,492,257	336,870,208,434
2	02	Inspektorat Jenderal	22,712,632,125	182,563,000
3	03	Ditjen Bimas Islam	7,143,819,000	7,095,459,000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	6,849,643,329	6,849,643,329
10	11	Badan Litbang	71,434,869,580	36,661,054,535
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	308,419,266,997	448,790,292,794
2	0200	Jawa Barat	767,295,549,258	592,608,322,880
3	0300	Jawa Tengah	870,556,770,264	792,457,538,283
4	0400	DI. Yogyakarta	222,975,334,135	138,878,790,432
5	0500	Jawa Timur	1,119,238,271,720	1,050,708,784,854
6	0600	Aceh	987,002,667,923	809,941,368,920
7	0700	Sumatera Utara	460,331,621,571	507,587,653,930
8	0800	Sumatera Barat	421,640,288,818	362,796,288,835
9	0900	Riau	175,277,429,206	324,889,340,665
10	1000	Jambi	232,732,083,994	244,916,992,739
11	1100	Sumatera Selatan	233,164,537,685	253,780,925,390
12	1200	Lampung	200,850,955,382	209,847,698,072
13	1300	Kalimantan Barat	143,816,962,482	120,526,233,542
14	1400	Kalimantan Tengah	194,633,254,539	160,355,976,683
15	1500	Kalimantan Selatan	356,966,723,306	281,379,406,894
16	1600	Kalimantan Timur	128,992,259,629	110,950,095,592
17	1700	Sulawesi Utara	153,940,819,361	107,066,217,823
18	1800	Sulawesi Tengah	157,393,874,712	119,760,647,513
19	1900	Sulawesi Selatan	353,471,956,249	274,541,136,432
20	2000	Sulawesi Tenggara	175,944,805,088	139,215,170,679
21	2100	Maluku	158,292,501,396	117,212,869,419
22	2200	Bali	125,664,265,783	115,903,730,512
23	2300	Nusa Tenggara Barat	262,976,446,475	223,165,548,185
24	2400	Nusa Tenggara Timur	90,918,016,039	76,613,273,426
25	2500	Papua	103,416,756,984	55,389,087,550
26	2600	Bengkulu	181,923,585,772	143,832,292,402
27	2800	Maluku Utara	116,885,430,415	95,363,094,115
28	2900	Banten	190,862,862,892	190,476,333,055
29	3000	Bangka Belitung	80,418,333,720	68,264,906,283
30	3100	Gorontalo	94,790,211,760	78,904,303,311
31	3200	Kepulauan Riau	61,312,777,342	40,692,192,299
32	3300	Papua Barat	60,382,692,500	41,437,363,686
33	3400	Sulawesi Barat	33,955,920,184	24,568,545,616
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			9,638,800,689,872	8,710,481,351,109

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	4,406,841,481	4,398,201,482
2	02	Inspektorat Jenderal	398,160,000	284,200,000
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	379,470,346	379,470,346
10	11	Badan Litbang	1,112,588,850	1,046,344,700
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	2,383,819,440	5,586,236,860
2	0200	Jawa Barat	5,470,619,953	4,251,479,126
3	0300	Jawa Tengah	12,032,295,264	12,990,872,121
4	0400	DI. Yogyakarta	962,764,908	3,009,915,138
5	0500	Jawa Timur	5,666,260,946	10,777,900,478
6	0600	Aceh	7,139,358,076	4,366,276,838
7	0700	Sumatera Utara	5,264,025,831	4,506,394,113
8	0800	Sumatera Barat	2,567,403,230	1,773,185,570
9	0900	Riau	847,408,770	5,979,421,000
10	1000	Jambi	8,507,910,111	11,209,757,401
11	1100	Sumatera Selatan	1,675,793,500	1,812,011,136
12	1200	Lampung	2,725,891,123	2,668,303,622
13	1300	Kalimantan Barat	1,638,252,186	837,882,186
14	1400	Kalimantan Tengah	2,611,620,299	1,307,507,999
15	1500	Kalimantan Selatan	2,553,345,248	1,255,330,118
16	1600	Kalimantan Timur	2,030,405,500	1,812,804,000
17	1700	Sulawesi Utara	2,506,065,650	1,986,705,800
18	1800	Sulawesi Tengah	2,387,685,353	1,847,919,103
19	1900	Sulawesi Selatan	6,900,949,435	3,019,564,281
20	2000	Sulawesi Tenggara	4,869,802,719	4,964,229,779
21	2100	Maluku	1,313,598,824	1,141,968,824
22	2200	Bali	425,026,000	399,026,000
23	2300	Nusa Tenggara Barat	844,490,000	798,139,000
24	2400	Nusa Tenggara Timur	420,623,362	280,530,417
25	2500	Papua	7,979,988,800	4,560,310,000
26	2600	Bengkulu	4,238,194,301	2,619,977,300
27	2800	Maluku Utara	666,929,000	-
28	2900	Banten	2,307,059,650	2,610,661,650
29	3000	Bangka Belitung	975,550,000	375,350,000
30	3100	Gorontalo	1,464,667,000	1,156,472,000
31	3200	Kepulauan Riau	663,096,415	643,812,321
32	3300	Papua Barat	306,302,001	50,547,001
33	3400	Sulawesi Barat	609,760,000	483,350,000
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			109,254,023,572	107,192,057,710

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	726,474,445	725,674,445
2	02	Inspektorat Jenderal	534,033,253	356,364,753
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	4,468,111,510	3,907,242,260
5	05	Ditjen Bimas Kristen	481,076,710	481,076,710
6	06	Ditjen Bimas Katolik	107,000,000	107,000,000
7	07	Ditjen Bimas Hindu	137,335,000	5,219,408,632
8	08	Ditjen Bimas Budha	5,777,565,000	5,777,565,000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	1,524,076,800	1,524,142,171
10	11	Badan Litbang	2,870,114,057	2,598,774,763
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	18,578,162,267	30,784,907,396
2	0200	Jawa Barat	23,511,679,569	21,819,975,581
3	0300	Jawa Tengah	62,583,544,221	62,796,574,031
4	0400	DI. Yogyakarta	3,165,238,082	3,826,323,300
5	0500	Jawa Timur	41,362,506,926	53,783,108,543
6	0600	Aceh	16,745,398,748	16,126,485,734
7	0700	Sumatera Utara	14,421,437,481	13,145,812,587
8	0800	Sumatera Barat	23,566,970,807	21,783,129,031
9	0900	Riau	6,087,908,433	8,756,296,095
10	1000	Jambi	12,129,822,683	12,579,836,815
11	1100	Sumatera Selatan	4,098,785,494	5,004,760,162
12	1200	Lampung	4,265,820,513	7,910,701,803
13	1300	Kalimantan Barat	2,281,457,286	2,156,161,036
14	1400	Kalimantan Tengah	8,023,087,104	4,901,626,647
15	1500	Kalimantan Selatan	11,630,084,750	11,106,337,522
16	1600	Kalimantan Timur	3,350,624,678	2,989,996,976
17	1700	Sulawesi Utara	3,081,414,929	2,403,705,929
18	1800	Sulawesi Tengah	3,590,575,775	2,527,722,252
19	1900	Sulawesi Selatan	5,713,863,651	5,049,202,095
20	2000	Sulawesi Tenggara	8,213,881,448	7,610,756,260
21	2100	Maluku	4,639,246,412	2,457,131,350
22	2200	Bali	3,541,291,434	2,313,665,851
23	2300	Nusa Tenggara Barat	6,654,161,735	7,896,231,211
24	2400	Nusa Tenggara Timur	2,893,438,510	2,510,805,010
25	2500	Papua	4,950,804,053	4,631,055,570
26	2600	Bengkulu	7,079,672,412	6,132,635,155
27	2800	Maluku Utara	2,040,281,489	1,555,189,250
28	2900	Banten	14,804,769,182	15,695,015,160
29	3000	Bangka Belitung	3,445,729,145	3,210,381,993
30	3100	Gorontalo	4,752,903,584	4,254,298,109
31	3200	Kepulauan Riau	555,333,512	229,230,200
32	3300	Papua Barat	1,299,697,800	1,215,530,650
33	3400	Sulawesi Barat	400,119,284	807,549,284
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			350,085,500,172	370,669,387,322

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	342,212,033,070	318,756,497,320
2	02	Inspektorat Jenderal	16,998,029,000	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	7,100,475,800	7,100,475,800
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	46,769,078,724
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	14,890,530,100	110,742,271,871
2	0200	Jawa Barat	14,033,922,013	17,497,046,150
3	0300	Jawa Tengah	26,009,184,500	13,156,062,500
4	0400	DI. Yogyakarta	6,414,111,800	4,025,621,000
5	0500	Jawa Timur	16,208,643,087	43,472,483,211
6	0600	Aceh	102,427,374,399	48,536,900,546
7	0700	Sumatera Utara	9,663,914,000	4,444,886,000
8	0800	Sumatera Barat	11,167,862,130	10,584,204,955
9	0900	Riau	151,718,249	18,440,316,912
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	407,862,450	3,533,379,210
12	1200	Lampung	-	2,149,540,000
13	1300	Kalimantan Barat	9,501,381,243	2,694,916,983
14	1400	Kalimantan Tengah	18,466,484,996	2,905,154,150
15	1500	Kalimantan Selatan	23,209,181,100	102,908,409
16	1600	Kalimantan Timur	22,314,172,825	11,388,190,375
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	9,157,786,241	4,655,617,089
19	1900	Sulawesi Selatan	1,653,129,500	176,318,565,167
20	2000	Sulawesi Tenggara	2,759,714,843	3,668,233,600
21	2100	Maluku	30,562,575,243	14,421,562,300
22	2200	Bali	5,715,618,100	306,793,500
23	2300	Nusa Tenggara Barat	23,912,883,521	8,891,734,870
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	1,467,666,650
25	2500	Papua	15,740,525,600	12,372,581,000
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	6,322,066,300	2,703,541,300
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	176,000,000	176,000,000
31	3200	Kepulauan Riau	-	3,413,045,500
32	3300	Papua Barat	3,032,546,400	10,867,220,000
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			740,209,726,510	905,562,495,092

TANAH BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	593,758,743,000	-
2	0200	Jawa Barat	238,940,610,949	-
3	0300	Jawa Tengah	236,003,145,308	-
4	0400	DI. Yogyakarta	489,218,689,800	-
5	0500	Jawa Timur	563,363,115,733	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	178,145,969,872	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	292,286,471,575	-
10	1000	Jambi	40,847,740,000	-
11	1100	Sumatera Selatan	113,991,188,200	-
12	1200	Lampung	138,139,672,950	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	299,802,740,000	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	112,043,013,000	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			3,296,541,100,387	-

**PERALATAN DAN MESIN BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	112,164,147,313	-
2	0200	Jawa Barat	17,721,417,422	-
3	0300	Jawa Tengah	16,073,835,217	-
4	0400	DI. Yogyakarta	106,549,151,069	-
5	0500	Jawa Timur	73,484,281,221	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	13,709,556,975	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	94,587,766,946	-
10	1000	Jambi	16,234,349,579	-
11	1100	Sumatera Selatan	17,199,599,034	-
12	1200	Lampung	15,382,902,166	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	371,355,290,781	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	8,005,983,320	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			862,468,281,043	-

**GEDUNG DAN BANGUNAN BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	386,255,400,675	-
2	0200	Jawa Barat	47,486,350,686	-
3	0300	Jawa Tengah	42,545,924,700	-
4	0400	DI. Yogyakarta	319,900,992,920	-
5	0500	Jawa Timur	239,230,761,102	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	66,366,540,699	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	203,418,037,507	-
10	1000	Jambi	56,015,955,526	-
11	1100	Sumatera Selatan	92,809,920,420	-
12	1200	Lampung	42,648,351,511	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	67,431,314,458	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	29,210,599,225	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			1,593,320,149,429	-

**JALAN IRIGASI DAN JARINGAN BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	3,222,217,420	-
2	0200	Jawa Barat	778,012,925	-
3	0300	Jawa Tengah	4,464,858,770	-
4	0400	DI. Yogyakarta	1,520,571,500	-
5	0500	Jawa Timur	7,026,284,384	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	4,497,754,500	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	5,540,150,000	-
10	1000	Jambi	5,870,585,070	-
11	1100	Sumatera Selatan	724,371,000	-
12	1200	Lampung	8,154,504,100	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	24,929,748,800	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	442,151,000	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			67,171,209,469	-

**ASET TETAP LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	18,762,149,465	-
2	0200	Jawa Barat	1,694,113,426	-
3	0300	Jawa Tengah	2,504,183,293	-
4	0400	DI. Yogyakarta	3,035,164,535	-
5	0500	Jawa Timur	15,172,517,825	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	1,390,995,750	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	4,298,797,990	-
10	1000	Jambi	2,332,362,217	-
11	1100	Sumatera Selatan	643,046,064	-
12	1200	Lampung	2,940,540,040	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	8,416,855,102	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	644,679,710	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			61,835,405,417	-

**KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Badan Layanan Umum
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	99,442,586,271	-
2	0200	Jawa Barat	1,997,644,000	-
3	0300	Jawa Tengah	-	-
4	0400	DI. Yogyakarta	62,101,807,049	-
5	0500	Jawa Timur	87,046,758,162	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	54,791,000	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	19,195,275,177	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	274,123,121,746	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			543,961,983,405	-

ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	4,897,371,400	3,900,485,000
2	02	Inspektorat Jenderal	399,987,800	90,000,000
3	03	Ditjen Bimas Islam	630,663,003	193,490,000
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	34,897,852	28,407,852
5	05	Ditjen Bimas Kristen	94,500,000	94,500,000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	61,582,350	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	91,250,000	91,250,000
8	08	Ditjen Bimas Budha	99,825,000	99,825,000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	14,074,791,681	3,010,121,173
10	11	Badan Litbang dan Diklat	275,750,900	226,300,900
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	93,337,000	363,900,000
2	0200	Jawa Barat	29,480,000	191,393,000
3	0300	Jawa Tengah	2,058,678,000	942,718,000
4	0400	DI. Yogyakarta	93,570,000	120,675,000
5	0500	Jawa Timur	147,721,000	463,488,293
6	0600	Aceh	3,130,000	76,324,300
7	0700	Sumatera Utara	55,000,000	74,000,000
8	0800	Sumatera Barat	999,156,242	864,389,875
9	0900	Riau	29,580,000	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	341,644,900	43,330,000
13	1300	Kalimantan Barat	458,157,127	436,557,127
14	1400	Kalimantan Tengah	22,415,000	16,915,000
15	1500	Kalimantan Selatan	394,690,506	128,505,000
16	1600	Kalimantan Timur	19,800,000	-
17	1700	Sulawesi Utara	90,675,000	80,675,000
18	1800	Sulawesi Tengah	295,150,000	-
19	1900	Sulawesi Selatan	353,000,000	1,341,375,600
20	2000	Sulawesi Tenggara	200,476,220	220,463,100
21	2100	Maluku	63,500,000	63,500,000
22	2200	Bali	2,310,000	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	119,750,000	69,050,000
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	140,057,000	64,057,000
27	2800	Maluku Utara	8,677,778	8,677,778
28	2900	Banten	5,000,000	749,385,000
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	413,923,438	295,912,038
31	3200	Kepulauan Riau	1,350,000	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	76,570,000	49,900,000
34	5000	Atase Haji	3,492,560	-
JUMLAH			27,180,911,757	14,399,571,036

**ASET TAK BERWUJUD BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	6,843,553,376	
2	0200	Jawa Barat	199,315,000	
3	0300	Jawa Tengah	85,587,550	
4	0400	DI. Yogyakarta	256,750,000	
5	0500	Jawa Timur	490,955,293	
6	0600	Aceh	-	
7	0700	Sumatera Utara	34,000,000	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	190,588,845	
10	1000	Jambi	-	
11	1100	Sumatera Selatan	-	
12	1200	Lampung	-	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	1,897,885,600	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	-	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	744,385,000	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			10,743,020,664	-

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	-
		Wilayah		-
1	0100	DKI Jakarta	-	-
2	0200	Jawa Barat	-	-
3	0300	Jawa Tengah	-	-
4	0400	DI. Yogyakarta	-	-
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	4,099,200	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			4,099,200	-

ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	1,561,833,440	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	304,451,600	420,333,600
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	140,475,000	45,075,000
5	05	Ditjen Bimas Kristen	42,664,195	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	786,806,801	729,285,444
7	07	Ditjen Bimas Hindu	262,897,203	293,494,597
8	08	Ditjen Bimas Budha	6,510,604	6,510,604
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	86,566,775	-
10	11	Badan Litbang dan Diklat	993,496,920	592,072,235
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	500,197,876	755,287,410
2	0200	Jawa Barat	3,566,773,650	409,878,899
3	0300	Jawa Tengah	3,166,418,696	930,517,951
4	0400	DI. Yogyakarta	345,858,820	26,520,000
5	0500	Jawa Timur	2,371,577,540	1,031,437,697
6	0600	Aceh	10,173,800	-
7	0700	Sumatera Utara	794,371,888	241,195,450
8	0800	Sumatera Barat	31,940,000	-
9	0900	Riau	1,807,626,898	396,471,000
10	1000	Jambi	386,269,837	211,358,893
11	1100	Sumatera Selatan	125,616,000	-
12	1200	Lampung	2,444,529,603	312,488,805
13	1300	Kalimantan Barat	34,053,287	12,911,287
14	1400	Kalimantan Tengah	101,393,000	-
15	1500	Kalimantan Selatan	83,009,400	12,782,400
16	1600	Kalimantan Timur	527,029,083	50,266,275
17	1700	Sulawesi Utara	299,006,664	298,781,664
18	1800	Sulawesi Tengah	3,729,000	-
19	1900	Sulawesi Selatan	1,407,897,670	859,960,902
20	2000	Sulawesi Tenggara	77,244,000	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	348,261,700	3,131,524,920
23	2300	Nusa Tenggara Barat	91,768,000	33,450,000
24	2400	Nusa Tenggara Timur	144,799,375	22,389,250
25	2500	Papua	24,626,500	-
26	2600	Bengkulu	144,458,390	86,457,498
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	965,933,000	345,093,000
29	3000	Bangka Belitung	27,708,000	1,850,000
30	3100	Gorontalo	175,391,000	62,707,000
31	3200	Kepulauan Riau	29,121,000	35,492,600
32	3300	Papua Barat	24,570,685	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
35	-	BPIH dan BPDAU	2,617,237,058,588	-
JUMLAH			2,641,484,115,488	11,355,594,381

ASET LAIN LAIN BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	Pusat	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	
10	11	Badan Litbang dan Diklat	-	
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	315,037,813	
2	0200	Jawa Barat	-	
3	0300	Jawa Tengah	343,164,000	
4	0400	DI. Yogyakarta	39,445,000	
5	0500	Jawa Timur	40,000,000	
6	0600	Aceh	-	
7	0700	Sumatera Utara	-	
8	0800	Sumatera Barat	-	
9	0900	Riau	17,821,000	
10	1000	Jambi	-	
11	1100	Sumatera Selatan	5,495,000	
12	1200	Lampung	464,670,900	
13	1300	Kalimantan Barat	-	
14	1400	Kalimantan Tengah	-	
15	1500	Kalimantan Selatan	-	
16	1600	Kalimantan Timur	-	
17	1700	Sulawesi Utara	-	
18	1800	Sulawesi Tengah	-	
19	1900	Sulawesi Selatan	1,273,770,250	
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	
21	2100	Maluku	-	
22	2200	Bali	-	
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	
25	2500	Papua	-	
26	2600	Bengkulu	-	
27	2800	Maluku Utara	-	
28	2900	Banten	73,925,000	
29	3000	Bangka Belitung	-	
30	3100	Gorontalo	-	
31	3200	Kepulauan Riau	-	
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			2,573,328,963	-



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINCIAN AKUN-AKUN KEWAJIBAN

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	112,600,000	1,787,833,198
3	03	Ditjen Bimas Islam	3,560,840	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	194,203,157	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	726,033	93,000,000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	11,806,770	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	44,655,000
8	08	Ditjen Bimas Budha	8,186,854	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	3,275,091,977	493,718,827
2	0200	Jawa Barat	4,732,612,348	31,431,750
3	0300	Jawa Tengah	22,675,599,550	8,505,284
4	0400	DI. Yogyakarta	6,287,454,651	550,726,381
5	0500	Jawa Timur	177,574,980,570	12,022,669,163
6	0600	Aceh	1,414,622,926	960,695,187
7	0700	Sumatera Utara	43,003,937,788	-
8	0800	Sumatera Barat	2,352,512,912	-
9	0900	Riau	7,007,863,828	-
10	1000	Jambi	2,549,009,471	587,165,529
11	1100	Sumatera Selatan	18,402,936,443	96,580,955
12	1200	Lampung	7,019,863,230	-
13	1300	Kalimantan Barat	1,127,786,932	-
14	1400	Kalimantan Tengah	1,165,497,220	-
15	1500	Kalimantan Selatan	3,846,358,626	-
16	1600	Kalimantan Timur	210,215,834	-
17	1700	Sulawesi Utara	562,291,529	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	3,301,981,970	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	583,568,434	-
21	2100	Maluku	174,343,607	46,220,677
22	2200	Bali	97,195,959	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	1,361,026,667	62,534,134
24	2400	Nusa Tenggara Timur	22,020,594,939	-
25	2500	Papua	10,918,697	-
26	2600	Bengkulu	359,968,438	147,441,022
27	2800	Maluku Utara	233,252,520	-
28	2900	Banten	221,360,890	2,000,000
29	3000	Bangka Belitung	36,010,749	-
30	3100	Gorontalo	1,026,955,082	358,578,903
31	3200	Kepulauan Riau	133,276,041	-
32	3300	Papua Barat	1,018,948,745	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			334,119,122,227	17,293,756,010

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	341,349,365	-
2	02	Inspektorat Jenderal	565,100	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	2,147,282,283	-
2	0200	Jawa Barat	255,000,000	-
3	0300	Jawa Tengah	6,583,333	-
4	0400	DI. Yogyakarta	80,000,000	-
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	-
10	1000	Jambi	10,209,000	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	122,000,000	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			2,962,989,081	-

UANG MUKA DARI KPPN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	932,349,260
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	100,000
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	284,431,150	(566,228,968)
2	0200	Jawa Barat	304,367,158	98,551,546
3	0300	Jawa Tengah	106,045,385	124,995,837
4	0400	DI. Yogyakarta	3,221,150	5,297,630
5	0500	Jawa Timur	149,909,366	146,110,322
6	0600	Aceh	321,991,396	49,150,969
7	0700	Sumatera Utara	1,207,627,372	131,496,169
8	0800	Sumatera Barat	127,091,441	360,095,495
9	0900	Riau	145,914,384	99,086,519
10	1000	Jambi	183,463,743	339,000,069
11	1100	Sumatera Selatan	32,320,450	14,589,490
12	1200	Lampung	490,402,075	30,008,440
13	1300	Kalimantan Barat	79,457,683	31,772,509
14	1400	Kalimantan Tengah	31,009,450	10,875,893
15	1500	Kalimantan Selatan	146,057,196	100,176,793
16	1600	Kalimantan Timur	1,205,196	74,362,500
17	1700	Sulawesi Utara	201,196,309	61,514,838
18	1800	Sulawesi Tengah	174,188,933	73,492,904
19	1900	Sulawesi Selatan	83,576,450	87,069,155
20	2000	Sulawesi Tenggara	39,038,965	-
21	2100	Maluku	205,902,353	119,587,500
22	2200	Bali	5,921,536	53,943,504
23	2300	Nusa Tenggara Barat	195,366,849	77,099,678
24	2400	Nusa Tenggara Timur	360,958,246	19,972,081
25	2500	Papua	30,819,300	64
26	2600	Bengkulu	73,574,832	53,539,780
27	2800	Maluku Utara	12,458,500	36,658,400
28	2900	Banten	67,523,674	97,313,134
29	3000	Bangka Belitung	15,533,188	11,225,852
30	3100	Gorontalo	11,634,241	3,300,000
31	3200	Kepulauan Riau	61,696,050	66,944,468
32	3300	Papua Barat	1,378,091	75,390,184
33	3400	Sulawesi Barat	2,728,800	35,693,400
34	5000	Atase Haji	4,565,637,000	68,281,996
JUMLAH			9,723,647,912	2,922,817,411

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	200,529,920	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	770,459,054	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	14,848,844
6	06	Ditjen Bimas Katolik	9,499,000	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	853,000	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	506,424,365	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	18,609,890	204,188,442
2	0200	Jawa Barat	155,238,741	330,488,573
3	0300	Jawa Tengah	764,377,616	1,306,887,316
4	0400	DI. Yogyakarta	1,677,392,881	11,689,275
5	0500	Jawa Timur	216,789,288	8,172,342,838
6	0600	Aceh	479,400,186	3,125,810
7	0700	Sumatera Utara	88,833,875	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	10,800,610	20,919,000
10	1000	Jambi	16,172,420	3,214,881,341
11	1100	Sumatera Selatan	45,370,179	109,600
12	1200	Lampung	166,627,250	3,642,368
13	1300	Kalimantan Barat	13,771	-
14	1400	Kalimantan Tengah	258,588,000	-
15	1500	Kalimantan Selatan	4,840,000	8,099,517
16	1600	Kalimantan Timur	13,607,000	20,937,937
17	1700	Sulawesi Utara	3,216,779	19,953,483
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	21,385,545	201,496,651
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	802,917,825	809,877,825
22	2200	Bali	-	1,728,500
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	3,975,552,357
24	2400	Nusa Tenggara Timur	338,575	326,135
25	2500	Papua	3,111,391	73,759,253
26	2600	Bengkulu	14,438,175	484,236
27	2800	Maluku Utara	3,881,500	-
28	2900	Banten	101,544,734	3,912,656
29	3000	Bangka Belitung	4,432,929	-
30	3100	Gorontalo	186,121,315	-
31	3200	Kepulauan Riau	5,100,000	37,440,000
32	3300	Papua Barat	46,800	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			6,550,962,614	18,436,691,957

**BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	7,398,501
2	02	Inspektorat Jenderal	-	52,451,424
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	2,552,700
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	1,776,343,013
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	34,460,200
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	1,651,611
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	57,543,796
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	4,306,575
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	78,203,630
10	11	Badan Litbang	-	13,652,100
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	-	2,685,873,984
2	0200	Jawa Barat	-	7,050,614,015
3	0300	Jawa Tengah	-	5,407,992,389
4	0400	DI. Yogyakarta	-	1,392,963,944
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	2,552,753,280
9	0900	Riau	-	1,811,534,228
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	56,698,507
12	1200	Lampung	-	115,005,945
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	6,625,648,016
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	2,991,081,661
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	752,586,604
22	2200	Bali	-	7,878,100
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	1,890,105,207
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	147,441,022
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	335,303,200
31	3200	Kepulauan Riau	-	2,533,800
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			-	35,854,577,452

**BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	72,894,653
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	1,215,796
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	73,444,515
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	-	-
2	0200	Jawa Barat	-	137,261,611
3	0300	Jawa Tengah	-	100,315,141
4	0400	DI. Yogyakarta	-	106,921,296
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	81,382,967
10	1000	Jambi	-	36,119,592
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	1,205,953
13	1300	Kalimantan Barat	-	7,255,441
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	96,183,207
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	5,979,605
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	21,772,174
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	53,070,013
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	2,273,103
32	3300	Papua Barat	-	6,217,501
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			-	803,512,568

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Daerah		
1	0100	DKI Jakarta	-	-
2	0200	Jawa Barat	-	-
3	0300	Jawa Tengah	5,676,240	8,776,885
4	0400	DI. Yogyakarta	-	-
5	0500	Jawa Timur	-	10,542,737
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	(1,633,500)	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			4,042,740	19,319,622



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

RINCIAN AKUN-AKUN EKUITAS

CADANGAN PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	7,065,430	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1,381,201,491	-
2	0200	Jawa Barat	1,456,259,404	1,848,250,000
3	0300	Jawa Tengah	598,900,000	-
4	0400	DI. Yogyakarta	33,749,858	-
5	0500	Jawa Timur	2,000,000	10,173,828,702
6	0600	Aceh	2,790,000	292,153,501
7	0700	Sumatera Utara	50,557,600	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	-
10	1000	Jambi	504,470,000	325,800,000
11	1100	Sumatera Selatan	727,056	16,334,397
12	1200	Lampung	156,400,000	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	25,597,220	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	227,340,000	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	21,417,874	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	14,050,000	19,572
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	44,637,061	3,541,350
29	3000	Bangka Belitung	4,432,929	-
30	3100	Gorontalo	-	497
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			4,531,595,923	12,659,928,019

CADANGAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1,751,617,516	1,802,290,537
2	02	Inspektorat Jenderal	523,878,959	316,179,754
3	03	Ditjen Bimas Islam	1,493,773,141	1,278,964,424
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	327,183,500	39,549,500
5	05	Ditjen Bimas Kristen	162,853,911	8,154,500
6	06	Ditjen Bimas Katolik	451,382,688	333,682,573
7	07	Ditjen Bimas Hindu	17,613,503	8,755,531,590
8	08	Ditjen Bimas Budha	91,386,960	11,268,959,910
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	1,068,368,865	275,937,767
10	11	Badan Litbang	514,373,096	108,301,569
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	2,348,238,378	906,350,280
2	0200	Jawa Barat	3,266,311,670	3,277,900,419
3	0300	Jawa Tengah	3,115,934,897	2,305,692,457
4	0400	DI. Yogyakarta	1,301,726,673	551,689,123
5	0500	Jawa Timur	7,975,230,181	6,030,012,117
6	0600	Aceh	2,875,405,366	3,050,072,733
7	0700	Sumatera Utara	441,971,189	1,288,865,795
8	0800	Sumatera Barat	1,489,074,658	1,130,184,440
9	0900	Riau	206,981,795	241,189,985
10	1000	Jambi	332,610,264	503,099,834
11	1100	Sumatera Selatan	625,927,291	64,201,975
12	1200	Lampung	760,720,454	352,090,992
13	1300	Kalimantan Barat	93,929,412	148,956,410
14	1400	Kalimantan Tengah	239,246,742	753,253,940
15	1500	Kalimantan Selatan	332,110,327	504,504,988
16	1600	Kalimantan Timur	463,224,417	347,451,564
17	1700	Sulawesi Utara	29,865,605	124,317,776
18	1800	Sulawesi Tengah	209,044,917	106,566,460
19	1900	Sulawesi Selatan	599,106,309	3,149,925,489
20	2000	Sulawesi Tenggara	230,765,938	513,336,000
21	2100	Maluku	174,605,047	283,068,447
22	2200	Bali	273,087,933	294,489,345
23	2300	Nusa Tenggara Barat	745,359,270	629,520,662
24	2400	Nusa Tenggara Timur	315,616,265	156,909,100
25	2500	Papua	91,572,788	74,903,999
26	2600	Bengkulu	242,624,985	401,427,801
27	2800	Maluku Utara	111,235,886	74,048,276
28	2900	Banten	1,363,105,512	802,466,432
29	3000	Bangka Belitung	112,214,531	570,697,925
30	3100	Gorontalo	231,068,003	854,534,318
31	3200	Kepulauan Riau	202,126,154	500,979,263
32	3300	Papua Barat	77,845,050	1,021,785,500
33	3400	Sulawesi Barat	2,090,000	30,838,481
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			37,282,410,046	55,232,884,450

**DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	(7,398,501)
2	02	Inspektorat Jenderal	-	(125,346,077)
3	03	Ditjen Bimas Islam	(3,560,840)	(2,552,700)
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	(194,203,157)	(1,776,343,013)
5	05	Ditjen Bimas Kristen	(726,033)	(127,460,200)
6	06	Ditjen Bimas Katolik	(11,806,770)	(1,651,611)
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	(102,198,796)
8	08	Ditjen Bimas Budha	(8,186,854)	(5,522,371)
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	(78,203,630)
10	11	Badan Litbang	-	(87,096,615)
		Wilayah		-
1	0100	DKI Jakarta	(3,275,091,977)	(2,823,135,595)
2	0200	Jawa Barat	(5,366,160,465)	(7,182,360,906)
3	0300	Jawa Tengah	(21,075,294,641)	(5,532,195,854)
4	0400	DI. Yogyakarta	(4,840,899,518)	(1,943,290,446)
5	0500	Jawa Timur	(174,483,086,316)	(12,033,211,900)
6	0600	Aceh	(1,329,182,926)	(960,695,187)
7	0700	Sumatera Utara	(42,717,437,788)	-
8	0800	Sumatera Barat	(2,352,512,912)	(2,634,136,247)
9	0900	Riau	(6,965,884,122)	(1,847,653,820)
10	1000	Jambi	(2,549,009,485)	(477,165,529)
11	1100	Sumatera Selatan	(18,072,649,660)	(154,485,415)
12	1200	Lampung	(7,014,823,230)	(122,261,386)
13	1300	Kalimantan Barat	(1,127,786,932)	-
14	1400	Kalimantan Tengah	(1,165,497,220)	(4,840,922,098)
15	1500	Kalimantan Selatan	(3,851,198,626)	-
16	1600	Kalimantan Timur	(210,215,834)	-
17	1700	Sulawesi Utara	(562,291,529)	(2,997,061,266)
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	(3,187,787,014)	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	(583,568,434)	-
21	2100	Maluku	(174,343,607)	(774,358,778)
22	2200	Bali	(97,195,959)	(60,948,113)
23	2300	Nusa Tenggara Barat	(1,361,026,667)	(31,267,067)
24	2400	Nusa Tenggara Timur	(22,020,594,939)	(1,890,105,207)
25	2500	Papua	(1,736,147)	-
26	2600	Bengkulu	(358,715,938)	(294,882,044)
27	2800	Maluku Utara	(236,134,020)	-
28	2900	Banten	(221,360,890)	(2,000,000)
29	3000	Bangka Belitung	(36,010,749)	(220,923,903)
30	3100	Gorontalo	(1,024,555,072)	(337,576,303)
31	3200	Kepulauan Riau	(133,276,041)	(8,751,301)
32	3300	Papua Barat	(1,018,948,741)	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			(327,632,761,053)	(49,483,161,879)

DANA LANCAR BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	33,621,441,942	-
2	0200	Jawa Barat	9,161,588,899	14,605,701,864
3	0300	Jawa Tengah	6,210,767,302	1,950,185,539
4	0400	DI. Yogyakarta	26,083,384,687	-
5	0500	Jawa Timur	16,608,114,829	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	2,591,894,308	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	15,457,592,876	-
10	1000	Jambi	1,508,967,407	-
11	1100	Sumatera Selatan	304,330,638	-
12	1200	Lampung	2,625,111,246	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	14,777,513,560	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	3,286,171,400	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			132,236,879,094	16,555,887,403

BARANG/JASA YANG HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	-	-
2	02	Inspektorat Jenderal	-	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	361,333	-
2	0200	Jawa Barat	1,104,127,800	-
3	0300	Jawa Tengah	-	-
4	0400	DI. Yogyakarta	-	-
5	0500	Jawa Timur	225,207,768	-
6	0600	Aceh	1,852,995,833	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	469,100,000	-
10	1000	Jambi	-	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	67,897,325	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	-	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			3,719,690,059	-

BARANG/JASA YANG HARUS DISERAHKAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	(341,349,365)	-
2	02	Inspektorat Jenderal	(565,100)	-
3	03	Ditjen Bimas Islam	-	-
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	-	-
5	05	Ditjen Bimas Kristen	-	-
6	06	Ditjen Bimas Katolik	-	-
7	07	Ditjen Bimas Hindu	-	-
8	08	Ditjen Bimas Budha	-	-
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	-	-
10	11	Badan Litbang	-	-
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	(2,147,282,283)	-
2	0200	Jawa Barat	(255,000,000)	-
3	0300	Jawa Tengah	(6,583,333)	-
4	0400	DI. Yogyakarta	(80,000,000)	-
5	0500	Jawa Timur	-	-
6	0600	Aceh	-	-
7	0700	Sumatera Utara	-	-
8	0800	Sumatera Barat	-	-
9	0900	Riau	-	-
10	1000	Jambi	(10,209,000)	-
11	1100	Sumatera Selatan	-	-
12	1200	Lampung	-	-
13	1300	Kalimantan Barat	-	-
14	1400	Kalimantan Tengah	-	-
15	1500	Kalimantan Selatan	-	-
16	1600	Kalimantan Timur	-	-
17	1700	Sulawesi Utara	-	-
18	1800	Sulawesi Tengah	-	-
19	1900	Sulawesi Selatan	-	-
20	2000	Sulawesi Tenggara	-	-
21	2100	Maluku	-	-
22	2200	Bali	-	-
23	2300	Nusa Tenggara Barat	-	-
24	2400	Nusa Tenggara Timur	-	-
25	2500	Papua	-	-
26	2600	Bengkulu	-	-
27	2800	Maluku Utara	-	-
28	2900	Banten	(122,000,000)	-
29	3000	Bangka Belitung	-	-
30	3100	Gorontalo	-	-
31	3200	Kepulauan Riau	-	-
32	3300	Papua Barat	-	-
33	3400	Sulawesi Barat	-	-
34	5000	Atase Haji	-	-
JUMLAH			(2,962,989,081)	-

DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	1,397,787,064,298	1,169,644,295,012
2	02	Inspektorat Jenderal	105,237,919,474	21,691,042,654
3	03	Ditjen Bimas Islam	27,400,110,543	26,325,608,041
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	45,926,063,097	49,196,769,352
5	05	Ditjen Bimas Kristen	7,682,376,347	7,369,865,442
6	06	Ditjen Bimas Katolik	4,525,494,444	3,874,975,185
7	07	Ditjen Bimas Hindu	4,456,083,267	10,030,173,467
8	08	Ditjen Bimas Budha	14,594,702,772	14,872,412,772
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	63,444,175,069	58,150,090,904
10	11	Badan Litbang	140,564,862,594	147,903,468,027
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	1,876,125,984,457	1,534,905,716,931
2	0200	Jawa Barat	1,622,812,408,612	1,379,327,606,992
3	0300	Jawa Tengah	2,277,940,274,298	2,051,239,582,728
4	0400	DI. Yogyakarta	1,412,108,848,442	1,355,184,578,143
5	0500	Jawa Timur	3,311,277,908,563	2,783,347,337,657
6	0600	Aceh	1,819,811,556,844	1,482,330,609,915
7	0700	Sumatera Utara	1,038,579,885,922	1,002,184,741,796
8	0800	Sumatera Barat	837,939,295,143	703,880,095,714
9	0900	Riau	1,013,136,107,675	983,650,100,221
10	1000	Jambi	452,828,588,468	391,155,710,656
11	1100	Sumatera Selatan	648,490,212,461	529,145,851,865
12	1200	Lampung	524,719,582,125	479,656,829,013
13	1300	Kalimantan Barat	334,465,700,474	349,116,286,450
14	1400	Kalimantan Tengah	369,313,498,296	271,391,260,885
15	1500	Kalimantan Selatan	934,965,958,925	815,827,670,003
16	1600	Kalimantan Timur	355,581,830,627	314,213,793,894
17	1700	Sulawesi Utara	236,312,805,867	168,762,291,261
18	1800	Sulawesi Tengah	315,039,490,552	255,404,892,850
19	1900	Sulawesi Selatan	1,742,601,985,729	843,996,817,746
20	2000	Sulawesi Tenggara	336,088,633,661	294,826,452,546
21	2100	Maluku	303,982,225,295	219,109,195,111
22	2200	Bali	265,132,913,166	237,844,438,845
23	2300	Nusa Tenggara Barat	459,933,100,688	404,033,607,822
24	2400	Nusa Tenggara Timur	178,080,693,832	157,094,117,531
25	2500	Papua	177,554,646,761	112,702,709,090
26	2600	Bengkulu	306,494,833,195	254,742,798,966
27	2800	Maluku Utara	178,536,587,631	141,745,399,241
28	2900	Banten	460,347,197,274	471,719,031,662
29	3000	Bangka Belitung	153,336,158,080	131,460,053,297
30	3100	Gorontalo	167,581,178,867	141,969,419,253
31	3200	Kepulauan Riau	117,660,248,086	94,619,142,664
32	3300	Papua Barat	113,082,424,951	92,399,267,815
33	3400	Sulawesi Barat	70,097,438,644	55,988,097,362
34	5000	Atase Haji	460,936,580	354,472,344
JUMLAH			26,224,039,992,096	22,014,388,679,125

DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KODE	UNIT AKUNTANSI	2010	2009
		Eselon 1		
1	01	Sekretariat Jenderal	4,897,371,400	3,900,485,000
2	02	Inspektorat Jenderal	1,961,821,240	90,000,000
3	03	Ditjen Bimas Islam	935,114,603	613,823,600
4	04	Ditjen Pendidikan Islam	175,372,852	73,482,852
5	05	Ditjen Bimas Kristen	137,164,195	94,500,000
6	06	Ditjen Bimas Katolik	848,389,151	729,285,444
7	07	Ditjen Bimas Hindu	354,147,203	384,744,597
8	08	Ditjen Bimas Budha	106,335,604	106,335,604
9	09	Ditjen Haji dan Umroh	14,161,358,456	3,010,121,173
10	11	Badan Litbang	1,269,247,820	818,373,135
		Wilayah		
1	0100	DKI Jakarta	7,752,126,065	1,119,187,410
2	0200	Jawa Barat	3,795,568,650	601,271,899
3	0300	Jawa Tengah	5,653,848,246	1,873,235,951
4	0400	DI. Yogyakarta	735,623,820	147,195,000
5	0500	Jawa Timur	3,050,253,833	1,494,925,990
6	0600	Aceh	13,303,800	76,324,300
7	0700	Sumatera Utara	883371888	315,195,450
8	0800	Sumatera Barat	1,031,096,242	864,389,875
9	0900	Riau	2,045,616,743	396,471,000
10	1000	Jambi	386,269,837	211,358,893
11	1100	Sumatera Selatan	131,111,000	-
12	1200	Lampung	3,250,845,403	355,818,805
13	1300	Kalimantan Barat	492,210,414	449,468,414
14	1400	Kalimantan Tengah	123,808,000	16,915,000
15	1500	Kalimantan Selatan	477,699,906	141,287,400
16	1600	Kalimantan Timur	546,829,083	50,266,275
17	1700	Sulawesi Utara	389,681,664	379,456,664
18	1800	Sulawesi Tengah	298,879,000	-
19	1900	Sulawesi Selatan	4,932,553,520	2,201,336,502
20	2000	Sulawesi Tenggara	277,720,220	220,463,100
21	2100	Maluku	63,500,000	63,500,000
22	2200	Bali	350,571,700	3,131,524,920
23	2300	Nusa Tenggara Barat	211,518,000	102,500,000
24	2400	Nusa Tenggara Timur	148,898,575	22,389,250
25	2500	Papua	24,626,500	-
26	2600	Bengkulu	284,515,390	150,514,498
27	2800	Maluku Utara	8,677,778	8,677,778
28	2900	Banten	1,789,243,000	1,094,478,000
29	3000	Bangka Belitung	27,708,000	1,850,000
30	3100	Gorontalo	589,314,438	358,619,038
31	3200	Kepulauan Riau	30,471,000	35,492,600
32	3300	Papua Barat	24,570,685	-
33	3400	Sulawesi Barat	76,570,000	49,900,000
34	5000	Atase Haji	3,492,560	-
JUMLAH			64,748,417,484	1,575,365,960,712



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

**Penjelasan
Umum****A. PENJELASAN UMUM**

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai

masukan (*inputs*) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (*outputs*).

Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Orientasi pada *outputs* semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

**Persyaratan
BLU**

Suatu instansi dapat menjadi satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (PPK-BLU), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Substantive;

Persyaratan substantive dapat dipenuhi apabila satuan kerja pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

2. Persyaratan Teknis.

Persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administrative

Persyaratan administrative terpenuhi, apabila satuan kerja pemerintah dapat menyajikan dokumen sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar layanan minimum
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

B. DASAR HUKUM**Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai satuan kerja dengan PPK-BLU antara lain adalah :

1. UU RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 dan Pasal 69);
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (sebagai Pengganti Peraturan Menteri Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewa Pengawas BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK BLU;
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU);
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Profil
perguruan
Tinggi BLU

C. PROFIL PEGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU

Perguruan Tinggi Agama dalam perjalanannya telah menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu-ilmu keislaman serta dijuluki sebagai *feeder* bagi perguruan tinggi lainnya.

Program studi dan kurikulum yang ada terus dievaluasi serta disempurnakan agar semakin relevan dengan tuntutan zaman. PTAIN membekali dan mengantarkan alumnusnya ke berbagai Kementerian/Lembaga dan bidang pengabdian, seperti sebagai dosen, guru, pegawai negeri, tokoh politik, TNI/Polri, wiraswasta, pengusaha, dan bahkan diplomat.

Kebijakan kearah pengembangan PTAIN sebagai universitas bertumpu pada paradigma baru yaitu bertumpu pada tiga pilar utama; kemandirian (*autonomy*), akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*).

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas selayaknya dapat

menyesuaikan sistem pengelolaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 23 Tahun 2005.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diatas Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama mulai tahun 2005 melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi instansi pemerintah dengan PPK-BLU sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memajukan pendidikan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasar prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerepan praktek bisnis yang sehat.

Sebagai langkah awal proses pengajuan menjadi satuan kerja yang menerapkan PPK-BLU, pada bulan Februari 2006 dilaksanakan Workshop Sosialisasi PPK-BLU dengan mengundang Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan sebagai pembicara. Dalam Workshop tersebut diperoleh informasi bahwa untuk menjadi instansi dengan PPK-BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Proposal tersebut selanjutnya akan diuji dan dinilai oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan untuk menentukan apakah Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut layak menjadi satuan kerja dengan PPK-BLU.

Setelah mendapat persetujuan Menteri Agama RI, proposal tersebut selanjutnya dikirim ke Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan untuk dimintakan pengesahan. Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang sudah mengajukan untuk menjadi satuan kerja PPK-BLU, mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proposal tersebut dihadapan Tim Penilai BLU Kementerian Keuangan.

Akhirnya setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI maka status BLU Penuh resmi disandang oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk menjalankan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU.

Sampai dengan tahun 2010, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ada tiga belas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang terdiri dari 6 (enam) Universitas Islam Negeri dan 7 (tujuh) Institut Agama Islam Negeri di lingkungan

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

Kementerian Agama. Dalam perkembangan terakhirnya, perguruan tinggi agama Islam yang menerpakan PPK-BLU memiliki Fakultas-fakultas, yaitu:

- a. UIN Syarif Hidayatullah
 - 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - 2) Fakultas Adab dan Humaniora
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
 - 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum
 - 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - 6) Fakultas Dirasat Islamiyah
 - 7) Fakultas Psikologi
 - 8) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 - 9) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 10) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 - 11) Sekolah Pascasarjana

- b. UIN Gunung Djati Bandung
 - 1) Fakultas Adab dan Humaniora;
 - 2) Fakultas Syariah dan Hukum;
 - 3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
 - 4) Fakultas Ushuluddin;
 - 5) Fakultas Psikologi;
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi;
 - 7) Fakultas Dakwah dan Komunikasi;
 - 8) Pasca Sarjana.

- c. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - 1) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
 - 2) Fakultas Dakwah
 - 3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 4) Fakultas Syariah dan Hukum
 - 5) Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 7) Fakultas Sosial dan Humaniora
 - 8) Pasca Sarjana

- d. UIN Malang
 - 1) Fakultas Tarbiyah
 - 2) Fakultas Syariah
 - 3) Fakultas Humaniora dan Budaya
 - 4) Fakultas Psikologi
 - 5) Fakultas Ekonomi
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

- 7) Pasca Sarjana
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - 1) Fakultas Adab
 - 2) Fakultas Dakwah
 - 3) Fakultas Syariah
 - 4) Fakultas Tarbiyah
 - 5) Fakultas Ushuludin
 - 6) Pasca Sarjana
- f. IAIN Sumatera Utara
 - 1) Fakultas Dakwah
 - 2) Fakultas Syariah
 - 3) Fakultas Tarbiyah
 - 4) Fakultas Ushuludin
- g. Pasca Sarjana UIN Alaudin Makassar
 - 1) Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 - 4) Fakultas Ushuludin dan Filsafat
 - 5) Fakultas Adab dan Humaniora
 - 6) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 7) Fakultas Ilmu Kesehatan
 - 8) Pasca Sarjana
- h. Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim
 - 1) Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 - 4) Fakultas Ushuludin
 - 5) Fakultas Sains dan Teknologi
 - 6) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 - 7) Fakultas Pertanian dan Peternakan
 - 8) Pasca Sarjana
- i. Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang
 - 1) Fakultas Dakwah
 - 2) Fakultas Syariah
 - 3) Fakultas Tarbiyah
 - 4) Fakultas Ushuludin
- j. IAIN Sultan Thaha
 - 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

- 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Adab
 - 5) Pasca Sarjana
- k. IAIN Raden Intan Lampung
- 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Dakwah
 - 5) Pasca Sarjana
- l. IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten
- 1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 - 2) Fakultas Tarbiyah dan Adab
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 - 4) Pasca Sarjana
- m. IAIN Raden Fatah, Palembang
- 1) Fakultas Syariah
 - 2) Fakultas Tarbiyah
 - 3) Fakultas Ushuluddin
 - 4) Fakultas Dakwah
 - 5) Fakultas Adab
 - 6) Pasca Sarjana

D. PELAPORAN KEUANGAN

Sebagai instansi pemerintah dengan PPK - BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disusun paling sedikit terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran dan/ atau Laporan Operasional/Aktivitas; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun tersebut selanjutnya dikirim secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan secara periodik setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum, system akuntansi BLU terdiri dari :

1. Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

2. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
3. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana tersebut diatas dan ditetapkan oleh Menteri. Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan:

1. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
2. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
3. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
4. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
5. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Ciri dasar akuntansi keuangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri adalah akuntansi dana (*fund accounting*). Akuntansi dana terkait dengan karakteristik operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menunjukkan adanya penerimaan dan pengeluaran operasional yang rutin dengan penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan tujuannya sesuai dengan acuan dari pemberi dana (donor).

Dana untuk operasional pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri bersumber dari pemerintah (APBN) yang didroping secara kontinyu melalui prosedur keuangan negara dan penerimaan PNBPN BLU yang berupa penerimaan pendidikan, hibah, dan lain-lain. Sedangkan dana non operasional yang berkaitan dengan donor disesuaikan dengan tujuan pemberi dana (donatur). Kegiatan-kegiatan non operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mencakup kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penerimaan bea siswa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan non operasional tersebut dalam pelaksanaannya lebih banyak ditangani oleh Lembaga-

lembaga/unit non struktural yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Satuan Akuntansi

1. Satuan Akuntansi

Satuan akuntansi dalam lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan satuan organisasi struktural dan non struktural yang dalam operasionalnya mengelola dana atau keuangan. Sumber dana yang dikelola tidak terbatas pada dana pemerintah (APBN) namun mencakup seluruh dana yang masuk berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sumber dana berasal dari berbagai sumber antara lain hasil kerjasama, pungutan pelayanan, penjualan, sewa-menyewa, bunga bank, dan sumber-sumber lain. Satuan akuntansi bertugas melakukan pengelolaan keuangan dilingkungannya dan melaporkan secara periodik kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Lingkup Laporan BLU

2. Lingkup Laporan

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menerapkan PPK-BLU menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan
- b. Laporan Keuangan untuk tujuan Konsolidasian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAP
- c. Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Kebijakan Akuntansi BLU

3. Kebijakan Akuntansi BLU

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

**Laporan
Keuangan BLU****4. Laporan Keuangan BLU**

Laporan Keuangan BLU disusun dengan dua tujuan yaitu:

- a. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya serta untuk
- b. Dalam rangka konsolidasi.

Untuk tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, BLU menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sedangkan untuk tujuan konsolidasi, BLU menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan di lampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar SAK/Industri yang spesifik.

**Periode
Akuntansi****5. Periode Akuntansi**

Periode akuntansi adalah satu tahun dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

**Penjabaran
Kurs Valuta
Asing****6. Penjabaran Kurs Valuta Asing**

Elemen laporan keuangan dalam valuta asing, dilaporkan dalam nilai Rupiah. Konversi didasarkan atas Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan hak dan kewajiban BLU, sehingga dapat diketahui seberapa besar kekayaan dari pada BLU tersebut. Neraca Badan Layanan Umum ini merupakan Neraca Gabungan dari Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah menerapkan PPK-BLU dan telah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

NERACA BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA PER 31 DESEMBER 2010

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009	KENAIKAN/PENURUNAN	
			JUMLAH	%
Aset				
Aset Lancar				
Kas Setara Kas	95,005,380,340.46	45,562,175,171	49,443,205,169	52%
Investasi Jangka Pendek	35,000,000,000.00	-	35,000,000,000	100%
Piutang Usaha	1,456,250,000.00	1,456,250,000	-	0%
Piutang Lain-Lain	1,853,036,908.00	-	1,853,036,908	100%
Persediaan	2,527,506,034.00	373,346,206	2,154,159,828	85%
Uang Muka	26,659,785.00	61,777,200	(35,117,415)	-132%
Biaya Yang Masih Harus Diterima		-	-	0%
Jumlah Aset Lancar	135,868,833,067.46	47,453,548,577	88,415,284,490	65%
Investasi Jangka Panjang				
Aset tetap				
Tanah	2,839,804,418,973.00	1,514,401,949,790	1,325,402,469,183	47%
Gedung dan Bangunan	1,184,836,954,917.04	625,221,246,613	559,615,708,304	47%
Peralatan dan Mesin	774,349,451,362.00	223,834,639,141	550,514,812,221	71%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	52,926,893,899.00	11,801,822,682	41,125,071,217	78%
Aset Tetap Lainnya	45,032,295,094.00	10,339,363,384	34,692,931,710	77%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	494,386,977,978.00	62,560,632,322	431,826,345,656	87%
Jumlah Aset tetap	5,391,336,992,223.04	2,448,159,653,932	2,943,177,338,291	55%
Akumulasi Penyusutan	211,741,655,872.00	33,545,216,145	178,196,439,727	84%
Nilai Buku Aset Tetap	5,179,595,336,351.04	2,414,614,437,787	2,764,980,898,564	53%
Aset Lainnya				
Aset Kerjasama Operasi	-	-	-	
Aset Guna Usaha	-	-	-	
Aset Tak Berwujud	10,215,465,372.00	230,838,000	9,984,627,372	98%
Aset lain-Lain	2,456,239,963.00	5,180,200,000	(2,723,960,037)	-111%
Jumlah Aset Lainnya	12,671,705,335.00	5,411,038,000	7,260,667,335	57%

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009	KENAIKAN/PENURUNAN	
			JUMLAH	%
JUMLAH ASET	5,294,579,605,238.50	2,467,479,024,364	2,827,100,580,875	53%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	331,629,016	-	331,629,016	
Utang Pajak	-	-	-	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	721,404,455	-	721,404,455	100%
Pendapatan Diterima Di muka	9,430,600,283	5,194,007,500	4,236,592,783	45%
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek	-	-	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	1,029,051,876	263,673,900	765,377,976	74%
Utang Jangka Pendek Lainnya	625,607,600	-	625,607,600	100%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12,138,293,230	5,457,681,400	6,680,611,830	55%
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	12,138,293,230	5,457,681,400	6,680,611,830	55%
EKUITAS				
Ekuitas Tidak Terikat				
Ekuitas Awal	2,812,688,490,403.86	1,246,874,885,678	1,565,813,604,726	56%
Surplus & Defisit Tahun Lalu	114,732,563,518.00	124,769,059,811		
Surplus & Defisit Tahun Berjalan	352,192,464,840.64	182,787,303,511	169,405,161,330	48%
Ekuitas Donasi	384,765,302,311.00	482,352,854,076	(97,587,551,765)	-25%
Jumlah Ekuitas Tidak terikat				
Ekuitas Terikat Temporer	863,876,000.00	-	863,876,000	100%
Ekuitas Terikat Permanen	1,548,572,718,478.00	398,057,167,412	1,150,515,551,066	74%
			-	
JUMLAH EKUITAS	5,213,815,415,551.50	2,434,841,270,488	2,778,974,145,064	53%
			-	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,294,579,605,238.50	2,440,298,951,888	2,854,280,653,351	54%

Aset Lancar

1. ASET

a). ASET LANCAR

1). KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara Kas per 31 Desember 2010 senilai Rp95.005.380.340,46,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1
Kas dan Setara Kas

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	4,234,778,555.00	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	9,161,588,899.00	8,474,725,987.00
3	IAIN Walisongo	7,364,792,302.00	-
4	UIN Malang	708,680,494.46	-
5	IAIN Sunan Ampel	9,787,463,580.00	8,124,774,159.00
6	UIN Sunan Kalijaga	26,083,384,687.00	18,316,199,250.00
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	15,457,592,876.00	10,646,475,775.00
9	IAIN Sulthan Thaha	1,508,967,407.00	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	3,295,506,734.00	-
11	UIN Alauddin	14,777,513,560.00	-
12	IAIN Raden Intan	2,625,111,246.00	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		95,005,380,340.46	45,562,175,171.00

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Investasi
Jangka
Pendek

2). INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek yang telah dilakukan Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp 35.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2
Investasi Jangka Pendek

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	30,000,000,000	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	5,000,000,000	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		35,000,000,000	-

Piutang Usaha

3). PIUTANG USAHA

Piutang Usaha yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp 1.456.250.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3
Piutang Usaha

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	1,456,250,000	1,456,250,000
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,456,250,000	1,456,250,000

Piutang Lain-Lain

4). PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp 1.853.036.908,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 4
Piutang Lain-Lain

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	610,466,736	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	1,216,972,952	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	25,597,220	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,853,036,908	-

Persediaan

5). PERSEDIAAN

Persediaan yang masih dimiliki Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp 2.527.506.034,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 5
Persediaan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	656,448,766	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	24,683,969	-
3	IAIN Walisongo	180,752,800	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	341,554,771	78,554,760
6	UIN Sunan Kalijaga	122,193,161	85,549,758
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	37,107,993	150,618,853
9	IAIN Sulthan Thaha	23,883,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	823,029,466	-
11	UIN Alauddin	13,536,120	-
12	IAIN Raden Intan	304,315,988	58,622,835
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		2,527,506,034	373,346,206

Uang Muka

6). UANG MUKA

Uang Muka Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp26.659.785,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 6
Uang Muka

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	16,450,785	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	61,777,200
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	10,209,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		26,659,785	61,777,200

Biaya Dibayar
Dimuka

7). BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Dibayar Dimuka Satker BLU per 31 Desember 2010 senilai Rp1.269.660.227,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 7
Biaya Dibayar Dimuka

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	1,073,362,500	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	196,297,727	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,269,660,227	-

b). ASET TETAP

Aset Tetap Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan harta benda berbentuk fisik yang digunakan untuk sarana dan prasarana proses belajar mengajar dan administrasi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2010 terdiri dari:

Tanah

1). TANAH

Nilai aset tanah BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.839.804.418.973,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 8
Tanah

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	593,758,743,000	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	238,940,610,949	229,618,499,449
3	IAIN Walisongo	236,003,145,308	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	389,329,832,391	324,041,475,691
6	UIN Sunan Kalijaga	489,218,689,800	490,068,886,800
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	339,700,371,575	332,736,784,850
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	114,910,613,000	-
11	UIN Alauddin	299,802,740,000	-
12	IAIN Raden Intan	138,139,672,950	137,936,303,000
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		2,839,804,418,973	1,514,401,949,790

Gedung dan Bangunan

2). GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.184.836.954.917.04,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 9
Gedung dan Bangunan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	386,255,400,675.00	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	47,486,350,686.00	41,554,770,535.00
3	IAIN Walisongo	42,545,924,700.00	-
4	UIN Malang	936,722,800.04	-
5	IAIN Sunan Ampel	51,227,321,720.00	41,445,816,260.00
6	UIN Sunan Kalijaga	319,900,992,920.00	319,418,862,920.00
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	196,751,268,222.00	188,078,366,737.00
9	IAIN Sulthan Thaha	442,708,000.00	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	29,210,599,225.00	-
11	UIN Alauddin	67,431,314,458.00	-
12	IAIN Raden Intan	42,648,351,511.00	34,723,430,161.00
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,184,836,954,917.04	625,221,246,613.00

**Peralatan dan
Mesin**

3). PERALATAN DAN MESIN

Nilai aset tanah BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp774.349.451.362,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 10
Peralatan dan Mesin

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	112,164,147,313	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	17,721,417,422	13,599,733,625
3	IAIN Walisongo	16,073,835,217	-
4	UIN Malang	6,570,023,791	-
5	IAIN Sunan Ampel	23,010,788,017	13,452,863,567
6	UIN Sunan Kalijaga	106,549,151,069	97,651,442,358
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	95,105,667,266	88,558,556,925
9	IAIN Sulthan Thaha	2,338,651,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	8,077,577,320	-
11	UIN Alauddin	371,355,290,781	-
12	IAIN Raden Intan	15,382,902,166	10,572,042,666
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		774,349,451,362	223,834,639,141

**Jalan, Irigasi
dan Jaringan**

4). JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai aset Jaringan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp52.926.893.899,- terinci sebagai berikut :

Tabel. 11
Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	3,222,217,420	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	778,012,925	748,361,050
3	IAIN Walisongo	4,464,858,770	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	3,818,399,384	3,492,106,632
6	UIN Sunan Kalijaga	1,520,571,500	1,499,429,500
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	5,540,150,000	5,540,150,000
9	IAIN Sulthan Thaha	56,280,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	442,151,000	-
11	UIN Alauddin	24,929,748,800	-
12	IAIN Raden Intan	8,154,504,100	521,775,500
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		52,926,893,899	11,801,822,682

**Aset Tetap
Lainnya**

5). ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 senilai Rp45.032.295.094,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 12
Aset Tetap Lainnya**

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	18,762,149,465	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	1,694,113,426	897,114,166
3	IAIN Walisongo	2,504,183,293	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	2,364,578,533	1,851,756,633
6	UIN Sunan Kalijaga	3,035,164,535	1,709,331,460
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	4,298,797,990	3,271,476,585
9	IAIN Sulthan Thaha	371,233,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	644,679,710	-
11	UIN Alauddin	8,416,855,102	-
12	IAIN Raden Intan	2,940,540,040	2,609,684,540
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		45,032,295,094	10,339,363,384

**Konstruksi
dalam
Pengerjaan**

6). KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 senilai Rp494.386.977.978,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 13
Konstruksi Dalam Pengerjaan**

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	99,442,586,271	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	1,997,644,000	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	31,237,056,450	5,771,716,410
6	UIN Sunan Kalijaga	62,101,807,049	36,290,856,000
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	25,484,762,462	18,348,519,912
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	274,123,121,746	-
12	IAIN Raden Intan	-	2,149,540,000
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		494,386,977,978	62,560,632,322

**Akumulasi
Penyusutan**

7). AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2010 senilai Rp211.741.655.872,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 14
Akumulasi Penyusutan**

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	141,427,116,425	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	39,090,563,198	33,545,216,145
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	31,223,976,249	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		211,741,655,872	33,545,216,145

c). ASET LAINNYA

**Aset
Kerjasama
Operasi**

1). ASET KERJASAMA OPERASI

Aset Kerjasama Operasi yang didapat oleh BLU per 31 Desember 2010 adalah RpNIHIL.

**Aset Sewa
Guna Usaha**

2). ASET SEWA GUNA USAHA

Aset Sewa Guna Usaha BLU per 31 Desember 2010 adalah sebesar RpNIHIL.

**Aset Tidak
Berwujud**

3). ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp10.215.465.372,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 15
Aset Tidak Berwujud

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	6,843,553,377	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	199,315,000	191,393,000
3	IAIN Walisongo	85,587,550	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	256,750,000	39,445,000
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	187,988,845	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	744,385,000	-
11	UIN Alauddin	1,897,885,600	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		10,215,465,372	230,838,000

Aset Lain-Lain

4). ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-Lain BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.456.239.963,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 16
Aset Lain-Lain

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	315,037,813	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	5,180,200,000
3	IAIN Walisongo	343,164,000	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	39,445,000	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	17,821,000	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	2,331,000	-
11	UIN Alauddin	1,273,770,250	-
12	IAIN Raden Intan	464,670,900	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		2,456,239,963	5,180,200,000

Utang Usaha

2. KEWAJIBAN

a). KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1). UTANG USAHA

Utang Usaha yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp.331.629.016,-

Tabel. 17
Utang Usaha

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	331,629,016	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		331,629,016	-

Utang Pajak

2). UTANG PAJAK

Utang Pajak yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

3). BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya Yang Masih Harus Dibayar yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp721.404.455, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 18
Biaya Yang Masih Harus di Bayar

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	30,693,955	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	1,650,000	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	689,060,500	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		721,404,455	-

**Pendapatan
Diterima di
Muka**

4). PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.430.600.283,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 19
Pendapatan Diterima Dimuka

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	2,133,483,533	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	255,000,000	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	7,031,907,750	5,194,007,500
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	10,209,000	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		9,430,600,283	5,194,007,500

**Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang**

5). BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL

**Utang Pada
Pihak Ketiga**

6). UTANG PADA PIHAK KETIGA

Utang Pada Pihak Ketiga yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.029.051.876,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 20
Utang Kepada Pihak Ketiga

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	228,131,876	263,673,900
6	UIN Sunan Kalijaga	245,864,500	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	555,055,500	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,029,051,876	263,673,900

**Utang Jangka
Pendek
Lainnya**

7). UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp625.607.600,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 21

Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	614,594,882	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	1,677,384	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	9,335,334	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		625,607,600	-

3. EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri dari ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat terdiri dari : 1) Ekuitas awal; 2) Surplus dan Defisit Tahun Lalu; 3) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan dan 4) Ekuitas Donasi.

a). EKUITAS TIDAK TERIKAT

Ekuitas Awal

1). EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.812.688.490.403,86,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 22
Ekuitas Awal

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	1,083,724,350,910	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	268,175,768,667	104,990,792,436
3	IAIN Walisongo	283,973,582,696	-
4	UIN Malang	25,760,247,338.86	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	959,532,906,546	928,884,772,598
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	188,078,366,737	58,541,532,134
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	3,286,171,400	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	157,096,109	154,457,788,510
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		2,812,688,490,403.86	1,246,874,885,678

Surplus dan
Defisit Tahun
Berjalan

2). SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN LALU

Surplus dan Defisit Tahun Lalu yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp114.732.563.518,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 23
Surplus dan Defisit Tahun Lalu

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	106,436,563,427	124,769,059,811
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	8,296,000,091	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		114,732,563,518	124,769,059,811

Ekuitas Donasi

3). SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN BERJALAN

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp352.192.464.840,64,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 24
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	128,756,393,445.00	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	12,909,768,706.00	163,185,039,231
3	IAIN Walisongo	25,592,661,244.00	-
4	UIN Malang	(11,116,748,789.36)	-
5	IAIN Sunan Ampel	9,267,474,685.00	-
6	UIN Sunan Kalijaga	42051220782,65	31,001,222,948
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	2,746,240,254.00	(18,332,496,384)
9	IAIN Sulthan Thaha	4,717,839,407.00	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	154,824,671,768.00	-
11	UIN Alauddin	7,245,429,469.00	-
12	IAIN Raden Intan	17,248,734,652.00	6,933,537,716
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		352,192,464,840.64	182,787,303,511

4). EKUITAS DONASI

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. Ekuitas Donasi yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp 384.765.302.311,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 25
Ekuitas Donasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	384,765,302,311	482,352,854,076
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		384,765,302,311	482,352,854,076

Ekuitas
Terikat
Temporer

b). EKUITAS TERIKAT TEMPORER

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan

penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU. Ekuitas Terikat Temporer BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp863.876.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 26
Ekuitas Terikat Temporer

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	863,876,000	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		863,876,000	-

Ekuitas
Terikat
Permanen

c). EKUITAS TERIKAT PERMANEN

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur. Ekuitas Terikat Permanen BLU per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.546.572.718.478,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 27
Ekuitas Terikat Permanen

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-
4	UIN Malang	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	501,619,710,901	398,057,167,412
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-
11	UIN Alauddin	1,046,953,007,577	-
12	IAIN Raden Intan	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-
JUMLAH		1,548,572,718,478	398,057,167,412

F. LAPORAN AKTIVITAS/OPERASIONAL

**LAPORAN AKTIFITAS/OPERASIONAL
BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA
PER 31 DESEMBER 2010**

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009	KENAIKAN/PENURUNAN	
			JUMLAH	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Dari Jasa Layanan				
Pendapatan Layanan Pendidikan	280,450,914,429	95,774,636,254	184,676,278,175	66%
Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	34,798,542,535	7,053,156,000	27,745,386,535	80%
Hibah				
Hibah Terikat	2,868,094,000		2,868,094,000	100%
Hibah Tidak terikat	78,429,872,695	3,000,000,000	75,429,872,695	2514%
Pendapatan APBN				
Pendapatan Operasional	649,539,561,006	272,891,593,192	376,647,967,814	58%
Pendapatan Investasi	360,820,338,986	168,698,922,235	192,121,416,751	53%
Pendapatan Usaha Lainnya				
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	142,037,354,497	43,416,001,217	98,621,353,280	69%
Sewa	2,578,456,455	524,787,000	2,053,669,455	80%
Jasa Lembaga Keuangan	4,961,578,741	1,245,164,168	3,716,414,573	75%
Lain-Lain	4,057,386,985	857,237,589	3,200,149,396	79%
JUMLAH PENDAPATAN	1,560,542,100,329	593,461,497,655	967,080,602,674	62%
BIAYA				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai	400,932,572,656	34,729,846,775	366,202,725,881	91%
Biaya Bahan	59,254,039,743	57,135,300,960	2,118,738,783	4%
Biaya Jasa Layanan	9,357,747,144	492,442,000	8,865,305,144	95%
Biaya Pemeliharaan	3,130,771,029	380,863,753	2,749,907,276	88%
Biaya Daya dan Jasa	-			
Biaya Perjalanan	90,386,924,773	1,547,305,567	88,839,619,206	98%
Biaya Lain-Lain	46,278,330,351	37,134,177,421	9,144,152,930	20%
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Pegawai	301,924,490,229	143,220,317,034	158,704,173,195	53%
Biaya Administrasi dan Perkantoran	81,407,292,417	31,014,026,857	50,393,265,560	62%
Biaya Pemeliharaan	25,790,949,447	5,345,447,473	20,445,501,974	79%
Biaya Daya dan Jasa	23,759,888,896	1,864,452,037	21,895,436,859	92%
Biaya Promosi	2,455,157,114	49,850,000	2,405,307,114	4825%
Biaya Lain-Lain	68,394,813,253	89,850,331,287	(21,455,518,034)	-31%
Biaya Lainnya				
Biaya Bunga	6,854,201			
Biaya Administrasi Bank	902,000			
Lain-Lain	-			
JUMLAH BIAYA	1,113,080,733,253	402,764,361,164	710,316,372,089	64%

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 (Audited)

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009	KENAIKAN/PENURUNAN	
			JUMLAH	%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUANTUNGAN/KERUGIAN				
Keuntungan/Kerugian				
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penurunan Nilai				
Lain-Lain				
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa				
Biaya Dari Kejadian Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN	265,845,545,777	180,737,121,491	85,108,424,286	32%
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN	(744,514,354,215)	(262,353,393,936)	(482,160,960,279)	65%

**Pendapatan
Jasa Layanan**

1. PENDAPATAN

a). Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan BLU terdiri dari Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Jasa Layanan Lainnya. Usaha dari Jasa layanan Pendidikan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 sebesar Rp280.450.914.429.15,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 28
Pendapatan Layanan Pendidikan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	82,522,587,297.00	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	26,997,439,000.00	31,253,748,254.00	-16%
3	IAIN Walisongo	16,704,091,623.00	-	100%
4	UIN Malang	2,001,133,790.15	-	100%
5	IAIN Sunan Ampel	29,047,174,904.00	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	25,383,548,750.00	19,712,290,000.00	22%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	41,473,253,000.00	35,806,488,000.00	14%
9	IAIN Sulthan Thaha	15,226,506,744.00	-	100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	11,066,108,375.00	6,098,710,000.00	45%
11	UIN Alauddin	23,948,695,916.00	-	100%
12	IAIN Raden Intan	6,080,375,030.00	4,403,400,000.00	28%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		280,450,914,429.15	97,274,636,254.00	65%

**Pendapatan
Jasa Layanan
Lainnya**

Pendapatan Jasa Layanan Lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 sebesar Rp34.798.542.535,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 29
Pendapatan Jasa Layanan Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	15,511,601,750	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	39,505,000	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	12,709,859,294	6,379,006,000	50%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	5,673,371,491	-	100%
12	IAIN Raden Intan	864,205,000	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		34,798,542,535	6,379,006,000	82%

Hibah

b). Hibah

Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah terikat dan hibah tidak terikat. Pendapatan Hibah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 sebesar Rp81.297.966.695,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 30
Pendapatan Hibah

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	144,000,000	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	2,387,302,250	-	-
3	IAIN Walisongo	6,351,931,695	-	100%
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	71,933,941,000	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	3,000,000,000	-100%
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	480,791,750	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		81,297,966,695	3,000,000,000	96%

Pendapatan
APBN**c). Pendapatan APBN**

Realisasi Pendapatan APBN terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan APBN Investasi. Realisasi Pendapatan APBN periode Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 yang sudah disahkan (SP2D) adalah sebesar Rp1.010.359.899.992,-

Tabel. 31
Pendapatan APBN

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	259,498,410,866	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	110,361,325,748	233,106,639,274	-111%
3	IAIN Walisongo	71,168,464,363	-	100%
4	UIN Malang	48,973,967,475	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	171,779,046,418	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	102,073,238,031	79,453,747,367	22%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	71,933,941,000	65,281,013,000	9%
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	43,798,557,531	27,887,609,494	36%
11	UIN Alauddin	78,851,811,650	-	100%
12	IAIN Raden Intan	51,921,136,910	35,861,506,292	31%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		1,010,359,899,992	462,802,805,427	54%

**Hasil
Kerjasama
dengan Pihak
Lain**

d). Pendapatan usaha lainnya

1) Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pendapatan BLU dari sumber Kerjasama Dengan Pihak Lain terdiri dari PHLN, Hasil Kerjasama dan Pendapatan Usaha Lainnya. Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp142.037.354.497,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 32
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	3,605,264,280	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	450,360,000	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	6,258,207,428	18,401,019,217	-194%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	25,014,982,000	-100%
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	137,250,000	-	100%
11	UIN Alauddin	131,586,272,789	-	100%
12	IAIN Raden Intan	-	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		142,037,354,497	43,416,001,217	69%

2) Sewa

Sewa

Pendapatan BLU dari sumber Sewa periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.578.456.455,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 33
Pendapatan Sewa

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	1,151,092,432	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	798,677,441	264,692,000	67%
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	140,805,582	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	387,960,000	260,095,000	33%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	22,321,000	-	100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	77,600,000	-	100%
12	IAIN Raden Intan	-	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		2,578,456,455	524,787,000	80%

Jasa Lembaga Keuangan

3) Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan BLU dari Jasa Lembaga Keuangan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.961.578.741,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 34
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	2,716,337,784	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	245,200,234	316,746,877	-29%
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	297,100,533	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	1,352,239,370	928,417,291	31%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	316,220,473	-	100%
12	IAIN Raden Intan	34,480,347	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
	JUMLAH	4,961,578,741	1,245,164,168	75%

Pendapatan Usaha Lain- lain

4) Pendapatan Usaha Lain-Lain

Pendapatan usaha lainnya periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.057.386.985,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 35
Pendapatan Usaha Lain-Lain

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	132,522,916	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	32,347,242	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	3,882,307,827	857,237,589	78%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	10,209,000	-	100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	-	-	-
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
	JUMLAH	4,057,386,985	857,237,589	79%

Biaya Layanan

2. BIAYA

a). Biaya Layanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU. Realisasi biaya layanan BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp609.340.385.696,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 36
Biaya Layanan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	118.652.517,971	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	62.973.188,497	55.572.650,960	12%
3	IAIN Walisongo	68.631.826,437	-	0%
4	UIN Malang	16.337.337,247	-	100%
5	IAIN Sunan Ampel	67.197.187,681	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	109.996.139,918	60.563.084,904	82%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	110.660.953,746	-	0%
9	IAIN Sulthan Thaha	10.541.197,337	-	0%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	7.917.186,975	5.148.892,020	35%
11	UIN Alauddin	22.770.458,411	-	100%
12	IAIN Raden Intan	13.662.391,476	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	0%
JUMLAH		609.340.385,696	121.284.627,884	80%

Biaya Umum
dan
Administrasi

b). Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi. Realisasi biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp503.732.591.356,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 37
Biaya Umum dan Administrasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	117,871,505,909	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	58,597,733,707	46,184,136,214	21%
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	55,735,439,715	-	0%
5	IAIN Sunan Ampel	15,035,274,211	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	109,996,139,925	7,613,003,487	93%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	43,798,557,531	30,887,609,494	29%
11	UIN Alauddin	74,234,931,650	-	100%
12	IAIN Raden Intan	28,463,008,708	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		503,732,591,356	84,684,749,195	83%

Biaya Lainnya

c). Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank. Realisasi Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp7.756.201,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 38
Biaya Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	902,000	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	6,854,201	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		7,756,201	-	100%

3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya sedangkan Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

Surplus/defisit BLU sampai per 31 Desember 2010 sebesar Rp265.845.545.777,- sebagaimana rincian table berikut ini:

Tabel. 39
SURPLUS/DEFISIT

NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
UIN Syarif Hidayatullah	128,756,393,445	-	100%
UIN Sunan Gunung Djati	12,909,768,706	163,185,039,231	-1164%
IAIN Walisongo	25,592,551,244	-	100%
UIN Malang	12,023,721,732	-	100%
IAIN Sunan Ampel	9,267,474,685	-	100%
UIN Sunan Kalijaga	42,051,220,783	-	100%
IAIN Sumatera Utara	-	-	0%
UIN Sultan Syarif Kasim	2,746,240,254	18,332,496,384	-568%
IAIN Sulthan Thaha	4,717,839,407	-	0%
IAIN Sultan Maulana Hasanudin	3,286,171,400	949,817,980	71%
UIN Alauddin	7,245,429,469	-	100%
IAIN Raden Intan	17,248,734,652	-	100%
IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH	265,845,545,777	182,467,353,595	31%

LAPORAN ARUS KAS
BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA
PER 31 DESEMBER 2010

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009	KENAIKAN/PENURUNAN	
			JUMLAH	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Masuk				
Pendapatan Jasa Layanan	280,450,914,429.15	97,274,636,254	183,176,278,175	65%
Pendapatan Hibah	81,297,966,695.00	3,000,000,000	78,297,966,695	2610%
Pendapatan APBN	1,010,359,899,992.00	462,802,805,427	547,557,094,565	54%
Pendapatan Usaha Lainnya	237,300,232,976	24,827,411,446	212,472,821,530	90%
Total Arus Kas Masuk	1,609,409,014,092.15	587,904,853,127	1,021,504,160,965	63%
Arus Kas Keluar				
Biaya Layanan	609,340,385,696.00	121,284,627,884	488,055,757,812	80%
Biaya Umum dan Administrasi	503,732,591,356.00	84,684,749,195	419,047,842,161	83%
Biaya Lainnya	7,756,201.00	-	7,756,201	100%
Total Arus Kas Keluar	1,113,080,733,253.00	205,969,377,079	907,111,356,174	81%
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	496,328,280,839.15	381,935,476,048	114,392,804,791	23%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
Hasil Penjualan Aset tetap	-	-	-	-
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panja	-	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-
Total Arus Kas Masuk	-	-	-	-
Arus Kas Keluar				
Perolehan Aset Tetap	282,258,877,930	238,186,827,312	44,072,050,618	16%
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Perolehan Aset Lainnya	21,595,024,074	45,437,591,713	(23,842,567,639)	-110%
Total Arus Kas Keluar	303,853,902,004	283,624,419,025	20,229,482,979	7%
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(462,629,419,880)	(283,624,419,025)	(179,005,000,855)	39%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
Perolehan Pinjaman	10,209,000	-	10,209,000	
Perolehan Kembali Pokok Pinjaman	-	-	-	-
Total Arus Kas Masuk	10,209,000	-	10,209,000	
Arus Kas Keluar				
Pemberian Pinjaman	-	79,421,239,326	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	10,209,000	(79,421,239,326)	79,431,448,326	36%
KENAIKAN BERSIH KAS	33,709,069,959	21,500,277,693	12,208,792,266	36%
KAS DAN SETARA KAS AWAL	79,421,239,326.00	37,367,480,734	42,053,758,592	53%
JUMLAH SALDO KAS	113,130,309,285.15	58,867,758,427	54,262,550,858	48%

G. LAPORAN ARUS KAS**1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI****a). ARUS MASUK****1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan**

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp280.450.914.429.15,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 40**Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan**

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	82,522,587,297.00	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	26,997,439,000.00	31,253,748,254.00	-16%
3	IAIN Walisongo	16,704,091,623.00	-	100%
4	UIN Malang	2,001,133,790.15	-	100%
5	IAIN Sunan Ampel	29,047,174,904.00	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	25,383,548,750.00	19,712,290,000.00	22%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	41,473,253,000.00	35,806,488,000.00	14%
9	IAIN Sulthan Thaha	15,226,506,744.00	-	100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	11,066,108,375.00	6,098,710,000.00	45%
11	UIN Alauddin	23,948,695,916.00	-	100%
12	IAIN Raden Intan	6,080,375,030.00	4,403,400,000.00	28%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
	JUMLAH	280,450,914,429.15	97,274,636,254.00	65%

2) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp81.297.966.695,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 41**Pendapatan Hibah**

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	144,000,000	-	100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	2,387,302,250	-	-
3	IAIN Walisongo	6,351,931,695	-	100%
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	-	-	-
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	71,933,941,000	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	3,000,000,000	-100%
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	480,791,750	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
	JUMLAH	81,297,966,695	3,000,000,000	96%

Pendapatan
Usaha Dari
Jasa Layanan

Pendapatan
Hibah

**Pendapatan
APBN**

3) Pendapatan APBN (Rupiah Murni)

Pendapatan APBN BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.010.359.899.992,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 42
Pendapatan APBN

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	259,498,410,866	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	110,361,325,748	233,106,639,274	-111%
3	IAIN Walisongo	71,168,464,363	-	100%
4	UIN Malang	48,973,967,475	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	171,779,046,418	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	102,073,238,031	79,453,747,367	22%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	71,933,941,000	65,281,013,000	9%
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	43,798,557,531	27,887,609,494	36%
11	UIN Alauddin	78,851,811,650	-	100%
12	IAIN Raden Intan	51,921,136,910	35,861,506,292	31%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		1,010,359,899,992	462,802,805,427	54%

**Pendapatan
Usaha Lainnya**

4) Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya BLU adalah pendapatan diluar dari jasa pokok yang disediakan oleh BLU, yang terdiri dari Hasil Kerjasama, Sewa, Pendapatan Jasa lembaga Keuangan dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Usaha Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.350.839.004,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 43
Pendapatan Usaha Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	166,609,803,636	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	788,877,675	316,746,877	60%
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	1,440,602,252	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	40,104,095	36,941,919	8%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	68,199,807,748	23,514,982,000	-100%
9	IAIN Sulthan Thaha	22,321,000	-	100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	164,236,223	694,048,650	-323%
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	34,480,347	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		237,300,232,976	24,562,719,446	90%

Biaya Layanan

b). ARUS KELUAR

1) Biaya Layanan

Realisasi Biaya Layanan BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp609.340.385.696,- sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel. 44
Biaya Layanan

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	118,652,517,971	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	62,973,188,497	55,572,650,960	12%
3	IAIN Walisongo	68,631,826,437	-	0%
4	UIN Malang	16,337,337,247	-	100%
5	IAIN Sunan Ampel	67,197,187,681	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	109,996,139,918	60,563,084,904	82%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	110,660,953,746	-	0%
9	IAIN Sulthan Thaha	10,541,197,337	-	0%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	7,917,186,975	5,148,892,020	35%
11	UIN Alauddin	22,770,458,411	-	100%
12	IAIN Raden Intan	13,662,391,476	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	0%
JUMLAH		609,340,385,696	121,284,627,884	80%

Biaya Umum
dan
Administrasi

2) Biaya umum dan Administrasi

Realisasi Biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp205.576.152.568,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 45
Biaya umum dan Administrasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	117,871,505,909	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	58,597,733,707	46,184,136,214	21%
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	55,735,439,715	-	0%
5	IAIN Sunan Ampel	15,035,274,211	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	109,996,139,925	7,613,003,487	93%
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	43,798,557,531	30,887,609,494	29%
11	UIN Alauddin	74,234,931,650	-	100%
12	IAIN Raden Intan	28,463,008,708	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		503,732,591,356	84,684,749,195	83%

Biaya Lainnya

3) Biaya Lainnya

Realisasi Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp7.756.201- sebagaimana rincian tabel berikut ini

Tabel. 46
Biaya Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	-	-	-
2	UIN Sunan Gunung Djati	-	-	-
3	IAIN Walisongo	-	-	-
4	UIN Malang	-	-	-
5	IAIN Sunan Ampel	902,000	-	100%
6	UIN Sunan Kalijaga	-	-	-
7	IAIN Sumatera Utara	-	-	-
8	UIN Sultan Syarif Kasim	-	-	-
9	IAIN Sulthan Thaha	-	-	-
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	-	-	-
11	UIN Alauddin	-	-	-
12	IAIN Raden Intan	6,854,201	-	100%
13	IAIN Raden Fatah	-	-	-
JUMLAH		7,756,201	-	100%

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

a). ARUS MASUK

1) Hasil Penjualan Aset Tetap

Hasil Penjualan
Aset Tetap

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Aset Tetap BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL.

2) Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang

Hasil Penjualan
Investasi
Jangka Panjang

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL.

3) Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan
Aset Lainnya

Kas Masuk dari Hasil Penjualan Aset Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL.

b). ARUS KELUAR**1) Perolehan Aset Tetap**

Kas untuk Perolehan Aset Tetap BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp456.993.681.895,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 47
Perolehan Aset Tetap

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	172,697,216,128		
2	UIN Sunan Gunung Djati	22,271,496,594	158,287,600,265	-611%
3	IAIN Walisongo	19,972,635,610		100%
4	UIN Malang			
5	IAIN Sunan Ampel	110,285,501,102		100%
6	UIN Sunan Kalijaga	30,510,874,549	19,889,389,331	35%
7	IAIN Sumatera Utara			
8	UIN Sultan Syarif Kasim	83,423,462,506	53,076,300,000	36%
9	IAIN Sulthan Thaha	3,208,872,000		
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin			
11	UIN Alauddin			
12	IAIN Raden Intan	14,623,623,406	0	100%
13	IAIN Raden Fatah			
JUMLAH		456,993,681,895	231,253,289,596	49%

2) Perolehan Investasi Jangka Panjang

Kas untuk Perolehan Investasi Jangka Panjang BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp NIHIL.

3) Perolehan Aset Lainnya

Kas untuk Perolehan Aset Lainnya BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp23.520.740.938,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 48
Perolehan Aset Lainnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	1,925,716,864		
2	UIN Sunan Gunung Djati		337,537,770	-100%
3	IAIN Walisongo			
4	UIN Malang			
5	IAIN Sunan Ampel			
6	UIN Sunan Kalijaga			
7	IAIN Sumatera Utara			
8	UIN Sultan Syarif Kasim	21,595,024,074	45,100,053,943	-109%
9	IAIN Sulthan Thaha			
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin			
11	UIN Alauddin			
12	IAIN Raden Intan			
13	IAIN Raden Fatah			
JUMLAH		23,520,740,938	45,437,591,713	-93%

Perolehan
Aset Tetap

Perolehan
Investasi
Jangka
Panjang

Perolehan
Aset Lainnya

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPerolehan
Pinjaman**a). ARUS MASUK****1) Perolehan Pinjaman**

Kas Masuk dari Perolehan Pinjaman BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.209.000,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 49
Perolehan Pinjaman

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah			
2	UIN Sunan Gunung Djati	-		
3	IAIN Walisongo	-		
4	UIN Malang	-		
5	IAIN Sunan Ampel			
6	UIN Sunan Kalijaga	-		
7	IAIN Sumatera Utara			
8	UIN Sultan Syarif Kasim			
9	IAIN Sulthan Thaha	10,209,000		100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin			
11	UIN Alauddin			
12	IAIN Raden Intan			
13	IAIN Raden Fatah			
JUMLAH		10,209,000	-	100%

Penerimaan
Kembali Pokok
Pinjaman**2) Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman**

Kas Masuk dari Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL, sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Pembayaran
Pokok
Pinjaman**b). ARUS KELUAR****1) Pembayaran Pokok Pinjaman**

Kas untuk Pembayaran Pokok Pinjaman BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL, sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Pemberian
Pinjaman**2) Pemberian Pinjaman**

Pemberian Pinjaman BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar RpNIHIL, sebagaimana rincian tabel berikut ini:

**Kenaikan
Bersih Kas**

4. KENAIKAN BERSIH KAS

Kenaikan Bersih Kas BLU periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp33.709.069.959,- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 50
Kenaikan Bersih Kas

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	(8,013,129,356)		
2	UIN Sunan Gunung Djati	686,862,912	7,375,272,224	
3	IAIN Walisongo	5,414,606,763		100%
4	UIN Malang	-		
5	IAIN Sunan Ampel	9,787,463,580		100%
6	UIN Sunan Kalijaga	7,767,185,437	4,914,978,015	37%
7	IAIN Sumatera Utara			
8	UIN Sultan Syarif Kasim	4,164,317,101	8,260,209,484	-98%
9	IAIN Sulthan Thaha	1,508,967,407		
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	3,286,171,400	949,817,970	71%
11	UIN Alauddin	6,481,513,469		100%
12	IAIN Raden Intan	2,625,111,246		100%
13	IAIN Raden Fatah			
JUMLAH		33,709,069,959	21,500,277,693	36%

**Jumlah
Saldo Kas**

5. JUMLAH SALDO KAS

Saldo Kas BLU periode 31 Desember 2010 sebesar Rp113.130.309.285.17- sebagaimana rincian tabel berikut ini:

Tabel. 51
Jumlah Saldo Kas

NO	NAMA SATUAN KERJA	2010	2009	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	4,234,778,555		100%
2	UIN Sunan Gunung Djati	9,161,588,899	8,474,725,987	7%
3	IAIN Walisongo	7,364,792,302		100%
4	UIN Malang	19,489,744,773.17		100%
5	IAIN Sunan Ampel	9,787,463,580		100%
6	UIN Sunan Kalijaga	26,083,384,687	18,316,199,250	30%
7	IAIN Sumatera Utara			
8	UIN Sultan Syarif Kasim	14,810,792,876	10,646,475,775	28%
9	IAIN Sulthan Thaha	1,508,967,407		100%
10	IAIN Sultan Maulana Hasanudin	3,286,171,400	1,029,533,485	69%
11	UIN Alauddin	14,777,513,560		100%
12	IAIN Raden Intan	2,625,111,246		100%
13	IAIN Raden Fatah			
JUMLAH		113,130,309,285.17	38,466,934,497	66%

